



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 112A/KEP/BSN/5/2023
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan sistem informasi di Badan Standardisasi Nasional, perlu disusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai rencana induk teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 501);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

- KESATU : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional disusun untuk:
1. menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi; dan
 2. menghasilkan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan BSN yang terpadu secara nasional.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 112A/KEP/BSN/5/2023
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang untuk dapat dimanfaatkan secara luas termasuk dalam pemerintahan. Salah satu usaha dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan menerapkan Tata Kelola TI yang selaras dengan tujuan organisasi yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan Tata Kelola TI saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TI yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah bentuk penerapan Tata Kelola TI dalam organisasi yang mengelola sejumlah penyelenggaraan layanan TI yang

dilengkapi dengan sejumlah kebijakan, proses/aktivitas dan prosedur untuk mendukung implementasi TI agar hasilnya sejalan dengan strategi bisnis (strategi organisasi). Dengan demikian, pembangunan dan penerapan SPBE instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lingkup pekerjaan yang melayani stakeholder nasional dan menjadi *contact point* beberapa organisasi internasional di bidang standar dan penilaian kesesuaian dalam memberikan layanan kepada stakeholder lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih baik sudah menjadi suatu kebutuhan untuk terwujudnya tata kelola TI yang handal.

Tantangan yang paling sering terjadi dalam pemanfaatan TI saat ini adalah investasi yang besar sering kali tidak dibarengi dengan manfaat optimal yang diperoleh oleh pemerintah. Padahal manajemen yang efektif serta eksploitasi informasi dan transformasi digital adalah faktor kunci untuk kesuksesan dan keunggulan kompetitif organisasi. Arsitektur SPBE menangani kebutuhan ini dengan menyediakan konteks strategis untuk evolusi dan menjangkau kemampuan digital (*digital capability*) sebagai respon terhadap kebutuhan yang terus berubah dari lingkungan bisnis.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BSN ini merupakan cetak biru yang menerjemahkan strategi dan proses bisnis organisasi menjadi rencana implementasi berbasis digital. Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BSN diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi. Selain itu permasalahan *legacy system* (sistem warisan) yang kompleks dan *fragmented* (terpecah-pecah) baik

manual maupun otomatis diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan mendukung strategi organisasi yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. menelaraskan inisiatif pemerintah pusat dalam konsep, penerapan, dan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional.
2. mewujudkan rancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BSN
3. menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BSN
4. menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan BSN yang terpadu secara nasional.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN adalah sebagai berikut:

1. menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. menelaraskan inisiatif pemerintah pusat dalam konsep, penerapan, dan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
3. mewujudkan rancangan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional.
4. menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi:

1. Arsitektur SPBE yang mencakup 6 domain utama SPBE yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE.
2. Peta Rencana SPBE yang mencakup 7 domain Peta Rencana SPBE yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BSN ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor xx);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. IPPD adalah instansi pusat dan pemerintah daerah
3. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
4. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
5. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
7. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
8. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
9. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat

diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan data di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) adalah Pusat Data (*Data Center*) cadangan untuk melakukan pencadangan (*backup*) Pusat Data (*Data Center*) bila terjadi kegagalan, gangguan, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Tata Kelola TI adalah Tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola organisasi yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya.
14. Transformasi Digital adalah Pemanfaatan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital dengan tujuan untuk mengefisiensikan bisnis proses organisasi.
15. DevOps adalah serangkaian pekerjaan yang mengotomatisasi proses antara *Software Development* dan *Development Team* agar mereka dapat melakukan proses build, test dan release perangkat lunak lebih cepat dan lebih handal.
16. *Agile Development* adalah merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek yang membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan.
17. Portal Aplikasi adalah *Platform* aplikasi *all in one* (satu pintu) untuk mengakses berbagai layanan BSN. Adanya aplikasi ini tentu akan memudahkan pengguna jika dibandingkan dengan harus mengakses berbagai aplikasi yang ada.

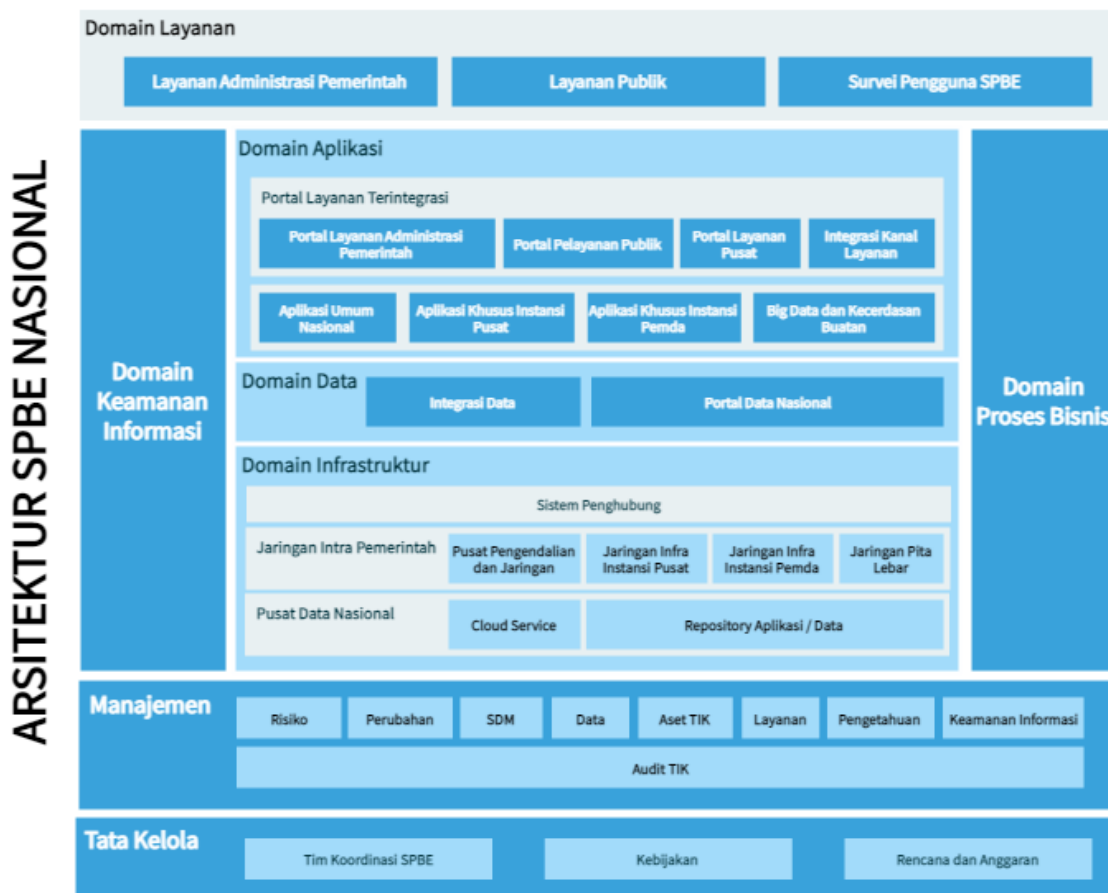
18. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional.
19. *Artificial Intelligence* adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh Manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya dengan manusia.
20. *Microservice* adalah metode dengan membagi *services* ke bagian yang lebih kecil namun masih saling berkaitan, sehingga memungkinkan antar *service* untuk ditempatkan pada *environment* yang berbeda-beda dengan bahasa pemrograman dan jenis dbms yang berbeda juga.
21. *Internet of Things* adalah sebuah program otomatisasi dimana sebuah teknologi memiliki kapabilitas sensorik untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia.
22. *Effort Impact Analysis* adalah analisis untuk prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kegiatan apa yang paling membantu tim mencapai tujuan akhir mereka dan mengidentifikasi cara paling bermanfaat untuk menghabiskan waktu mereka.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk kepada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan BSN harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.



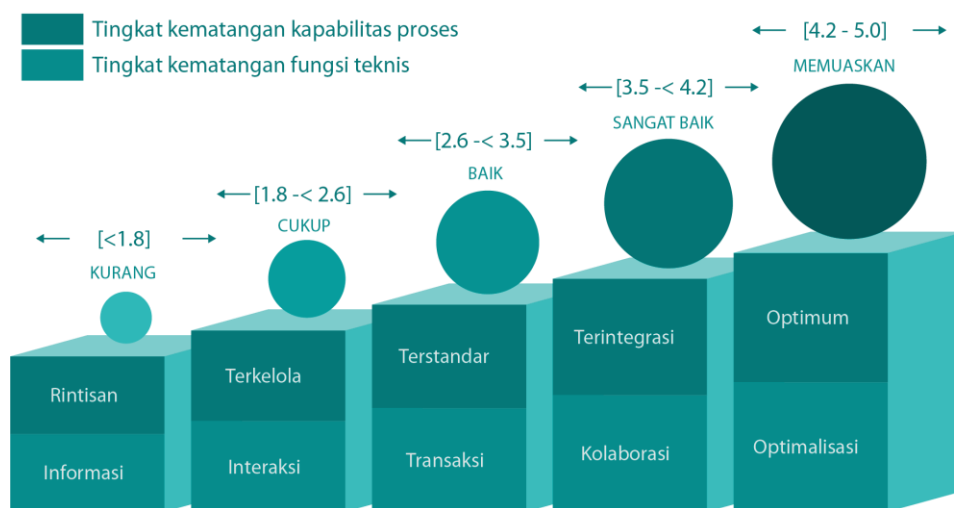
Gambar 2.1 Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Untuk mengimplementasikan Arsitektur SPBE Nasional, BSN perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM. Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan SPBE:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi).
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progress penerapan Arsitektur SPBE khususnya Roadmap, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di BSN saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 2.2 Tingkat Kematangan Proses SPBE

Tabel 2.1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

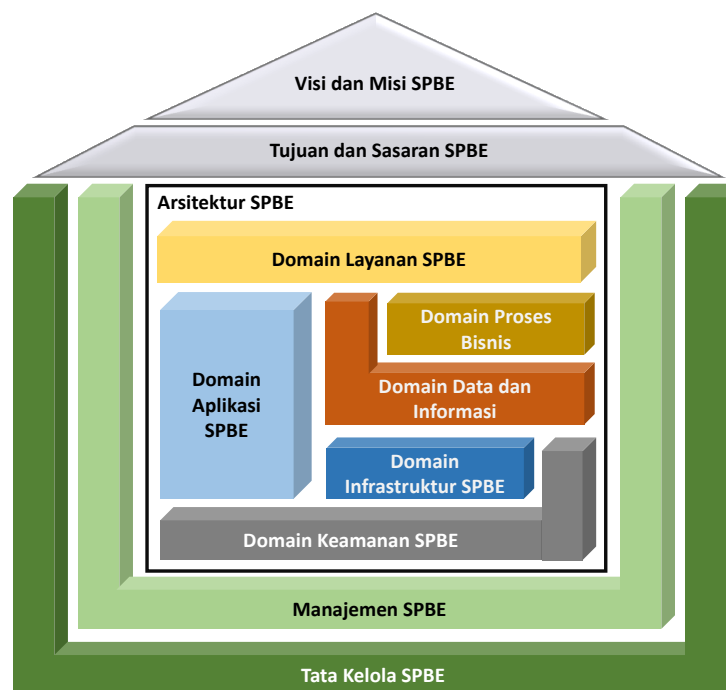
Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	<p>Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.</p>
2 - Terkelola	<p>Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.</p>
3 - TerStandardisasi	<p>Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan Standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.</p>
4 - Terintegrasi	<p>Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.</p>
5 - Optimum	<p>Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.</p>

Tabel 2.2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

B. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Kerangka dasar ini dibentuk dalam sebuah kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.3 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Nasional

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *electronic government* (e-government) hingga saat ini, penerapan e-gov belum dapat berjalan dengan baik. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE diharapkan dapat memicu penerapan egov tersebut yang kini berganti dengan istilah SPBE dengan lebih baik. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPBE yang ditemukan, antara lain:

- a. Belum adanya panduan dalam penyusunan arsitektur SPBE, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) membangun dan menyusun Arsitektur SPBE dengan penafsiran yang multidimensi dan menghambat pengintegrasian terpadu secara nasional.
- b. Berbagai penerapan SPBE atau yang dikenal dengan istilah *e-government* (e-govt) ataupun *digital government* telah dihasilkan oleh IPPD untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IPPD. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya masih sangat beragam antar IPPD. Hal ini tercermin hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dimana penerapan SPBE di IPPD dilaksanakan secara sendiri-sendiri (*silo*).
- c. Inisiatif strategis SPBE yang terdiri dari pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE dan penguatan kebijakan SPBE perlu lebih dipacu guna penyelarasan proses pembangunan dan penerapan SPBE di IPPD. Pemantauan dan evaluasi SPBE perlu dilaksanakan terutama terhadap program/kegiatan inisiatif strategis yang tercantum ada Rencana Induk yang terlampir

Mengacu pada definisi dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam bentuk RPJPN (periode 20 tahun) yang terbagi dalam 4 (empat) RPJMN (periode 5 tahun). Perencanaan tersebut berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan secara nasional dan disusun secara terstruktur.

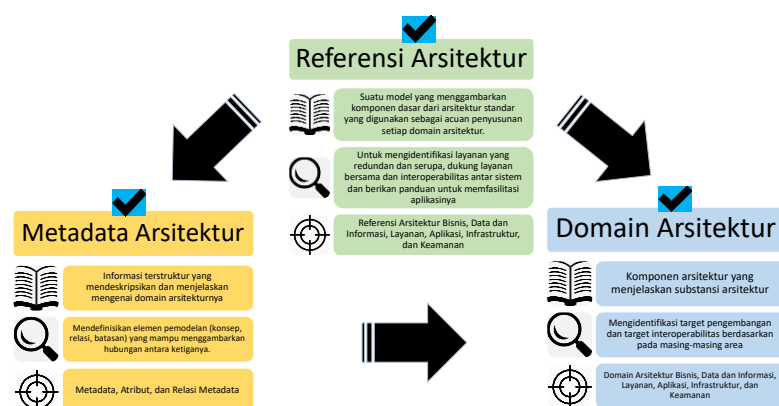
Adapun tujuan dari disusunnya Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE ini adalah penyamaan pemahaman atas penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh pada

setiap IPPD, standardisasi penyusunan dokumen arsitektur SPBE IPPD sehingga menghasilkan dokumen arsitektur SPBE yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional, petunjuk teknis untuk penyelenggara SPBE dalam menyusun arsitektur SPBE IPPD pada domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE hingga terbentuknya metadata arsitektur SPBE yang diperlukan dalam pengintegrasian arsitektur SPBE baik dalam IPPD ataupun secara nasional, menghilangkan silo-minded yang masih banyak terjadi di IPPD.

Selanjutnya, dalam menyusun arsitektur SPBE Nasional diperlukan beberapa komponen penyusun arsitektur SPBE yang diperlukan sebagai model referensi dan penjabaran rinci terkait informasi substansi arsitektur. Komponen penyusun tersebut antara lain:

- a. referensi arsitektur;
- b. metadata arsitektur; dan
- c. domain arsitektur.

Ketiga komponen ini saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional karena menggambarkan informasi detail terhadap tata kelola SPBE Nasional, dimana ketiga komponen tersebut juga harus diselaraskan dalam penyusunan arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



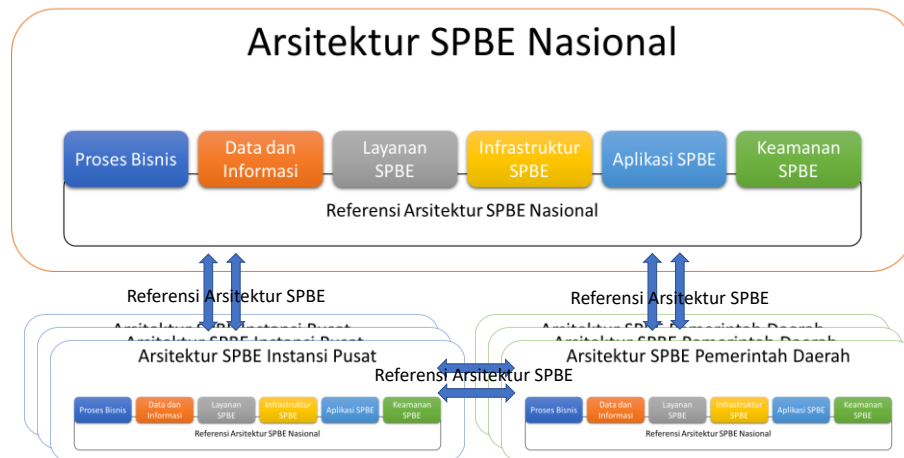
Gambar 2.4 Komponen penyusun Arsitektur SPBE

Langkah awal dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional adalah dengan mendefinisikan visi dan misi dalam penyelenggaraan SPBE. Selanjutnya didefinisikan juga visi disusunnya Arsitektur SPBE Nasional. Metode penyusunan arsitektur SPBE Nasional mencakup Pendefinisian visi dan misi SPBE, Pendefinisian visi Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Domain Arsitektur SPBE Nasional, Pengisian Metadata Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Manajemen Risiko dalam Penerapan Arsitektur SPBE Nasional dan Penyusunan Manajemen Perubahan dalam Penerapan Arsitektur SPBE Nasional.

Sedangkan Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Dalam hal penyusunan referensi arsitektur, perlu dipahami bersama prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan referensi arsitektur agar referensi arsitektur yang disusun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pola pemahaman dan penyusunan yang selaras. Beberapa prinsip tersebut, di antaranya:

- a. Bertujuan untuk mengelompokkan domain arsitektur sejenis.
- b. Bersifat umum, dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara SPBE.
- c. Mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebagai acuan penetapan sebuah referensi arsitektur dapat digunakan regulasi dan peraturan terkait pembentukan instansi (untuk proses bisnis, data dan informasi, dan layanan serta aplikasi), sedangkan untuk Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE dapat digunakan kajian-kajian ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
- d. Sebagai bahasa pemersatu. Referensi Arsitektur SPBE akan digunakan oleh seluruh penyelenggara SPBE. Untuk itu kesamaan pemahaman atas referensi sangat diperlukan agar dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pengintegrasian sistem pemerintahan yang ada.

Kesamaan pemahaman ini berperan penting dalam proses pengintegrasian Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah agar selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.



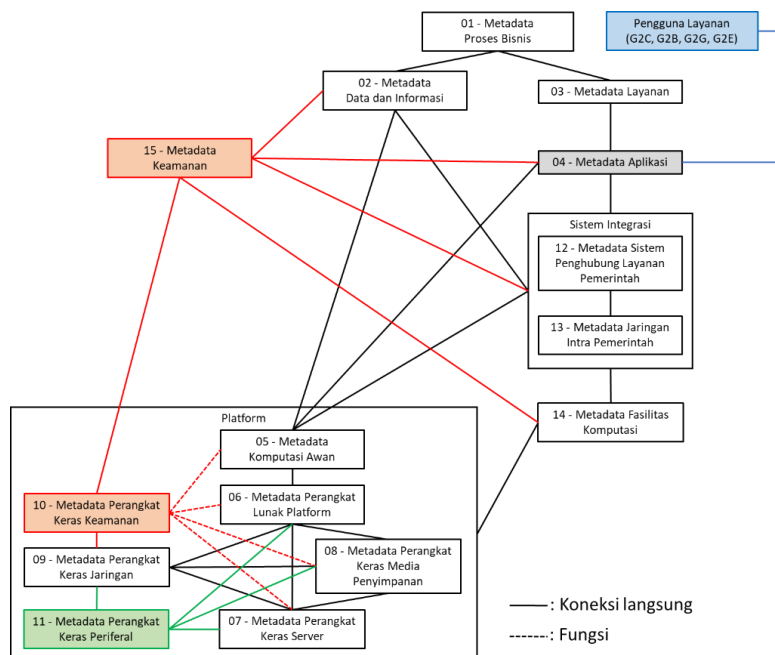
Gambar 2.5 Keterkaitan Domain Arsitektur SPBE Nasional dan IPPD

Sebagai panduan dalam tata kelola SPBE di IPPD, diperlukan Domain Arsitektur SPBE Nasional. Domain Arsitektur SPBE ini diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada IPPD. Kolaborasi dan integrasi baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur dalam menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu, dimana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif didalamnya termasuk pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik. Tidak hanya dapat melihat adanya duplikasi aplikasi maupun infrastruktur saja, dengan penerapan Domain Arsitektur SPBE yang saling terkait ini, diharapkan dapat memberikan kondisi riil pelaksanaan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi di tingkat nasional.

Penerapan Arsitektur SPBE menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis dan layanan pemerintahan di IPPD. Hal ini tentu saja dapat menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, menuju terwujudnya *collaborative* dan *smart government*. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain

arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

Arsitektur SPBE memiliki Metadata Arsitektur SPBE yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar Domain Arsitektur SPBE tersebut. Metadata Arsitektur SPBE memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Setiap Metadata Arsitektur SPBE memiliki beberapa atribut yang berupa karakteristik/ciri yang merepresentasikan entitas yang terdapat pada Metadata Arsitektur SPBE secara lebih jelas. Metadata Arsitektur SPBE ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada Arsitektur SPBE secara lebih jelas. Oleh karena itu, dapat disusun sebuah model metadata (metamodel) yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang ada dalam Arsitektur SPBE. Model Metadata Arsitektur SPBE Nasional ini dapat dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga/ daerah dalam menyusun Arsitektur SPBE-nya masing-masing.



Gambar 2.6 Relasi Metadata Arsitektur SPBE

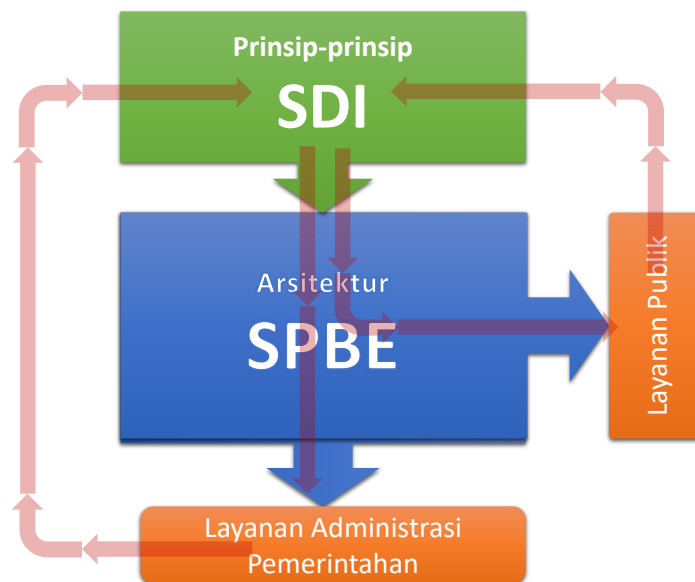
Penyusunan, penerapan, dan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional merupakan tanggung jawab bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional khususnya bagi Instansi Pusat yang menjadi pengampu domain arsitektur SPBE Nasional. Agar proses penyusunan, penerapan, dan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Arsitektur SPBE Nasional yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur manajemen arsitektur SPBE. Struktur manajemen arsitektur SPBE merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait penyusunan, penerapan, dan pengelolaan arsitektur SPBE.

Subtansi Arsitektur SPBE Nasional Domain Proses Bisnis dapat ditemukan dengan menganalisa RPJMN. Sedangkan subtansi arsitektur proses bisnis untuk Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah dapat ditemukan pada perencanaan pembangunan masing-masing dalam bentuk RPJMD ataupun Rencana Strategis (Renstra). Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Tugas dan fungsi dari instansi tersebut dinyatakan secara tersurat pada peraturan dan perundang-undangan pembentukan sebuah instansi penyelenggara pemerintahan. Hal ini menjadi dasar dalam pengidentifikasian substansi proses bisnis yang ada.

Proses bisnis sebagai gambaran atas tugas dan fungsi instansi tentunya bersifat tetap selama instansi tersebut berdiri. Sifat ini yang menjadi prinsip utama dalam mengidentifikasi substansi domain proses bisnis dari instansi tersebut. Tugas dan fungsi tersebut perlu diuraikan berdasarkan entitas proses bisnis tersendiri dengan memisahkan setiap tugas dan fungsi tersendiri. Proses ini akan menghasilkan sebuah daftar proses bisnis yang ada di lingkungan organisasi terkait. Setelah

dilakukan penguraian seluruh entitas proses bisnis di lingkungan instansi, entitas proses bisnis ini perlu dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang ada pada nomenklatur entitas proses bisnis secara tidak bergantung pada nama unit kerja terkait.

Selain itu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, didefinisikan bahwa data dan informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Dengan definisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa SPBE perlu meliputi seluruh jenis data dan informasi yang ada di Indonesia.



Gambar 2.7 Hubungan Satu Data Indonesia dan SPBE

Pengaturan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan data lainnya akan menjadi masukan pada manajemen pengetahuan sebagai *big data* yang dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang lebih akurat. Data dan informasi yang dimiliki oleh sebuah instansi merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai

pengampu proses bisnis tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data dan informasi sebuah instansi akan dipertanggung-jawabkan oleh Walidata. SPBE diharapkan dapat menggunakan data dan informasi dari walidata terkait. Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.

Seperti halnya pada referensi arsitektur proses bisnis, referensi arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan hasil penguraian dari tugas dan fungsi yang tercantum pada peraturan dan perundang-undangan terkait pendirian instansi terkait. Jika pada proses bisnis diurai bidang/area/cakupan dari tugas dan fungsi, pada layanan SPBE, diurai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam penguraian Layanan SPBE ini, perlu diperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. berbentuk kegiatan/pelaksanaan yang bersifat aksi;
- b. memiliki target layanan yang jelas (G2C, G2B, G2G, atau G2E);
- c. memiliki target capaian yang jelas dengan batasan waktu; dan
- d. biasanya nomenklatur utama terletak di awal kalimat.

Dengan berbekal pada kriteria di atas, hasil penguraian tugas dan fungsi pada regulasi dan perundang-undangan terkait akan berbeda dengan hasil pada penguraian proses bisnis. Salah satu tujuan pengelompokan layanan yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk layanan-layanan yang serupa sehingga dapat dilakukan penyederhanaan proses dalam menghasilkan hasil yang diharapkan.

Setelah proses penguraian tersebut di atas, proses yang dilakukan akan sama seperti pada proses bisnis hingga menghasilkan daftar usulan referensi arsitektur Layanan SPBE. Untuk mendapatkan informasi terhadap seluruh layanan yang ada dalam pembangunan di Indonesia, IPPD diharapkan dapat menyusun dan menetapkan seluruh layanan yang terdapat pada RPJMD/Renstra. Proses Bisnis, Data dan

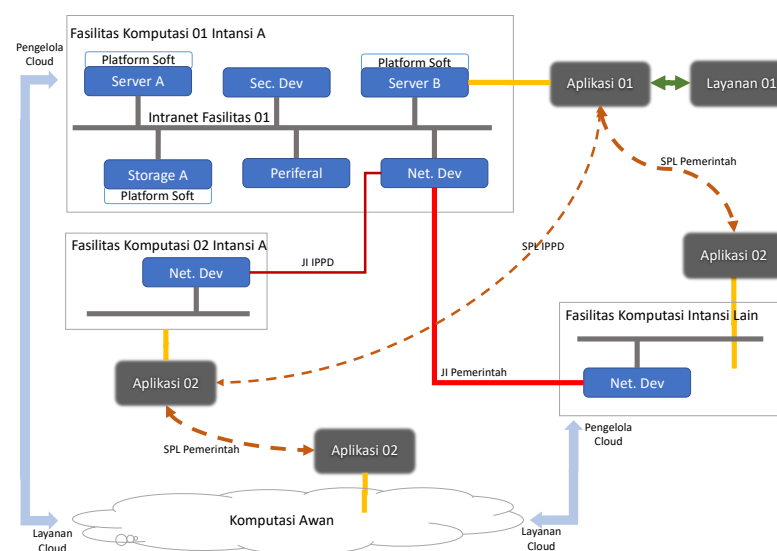
Informasi, Layanan SPBE, dan Aplikasi SPBE terkait erat dengan tugas dan fungsi dari sebuah instansi. Dengan demikian dalam rangka menetapkan aplikasi yang ada, perlu memperhatikan Layanan SPBE yang didukung. Hal ini berlaku baik untuk Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus.

Aplikasi SPBE akan menggunakan data dan informasi baik yang dimiliki sendiri oleh instansi tersebut sebagai walidata, maupun data dan informasi yang dimiliki oleh walidata lain dengan menggunakan Infrastruktur SPBE sebagai wahana. Aplikasi akan menghasilkan manfaat yang sesuai dengan Layanan SPBE yang didukung. Pengintegrasian Aplikasi SPBE memungkinkan terbentuknya Layanan SPBE yang terintegrasi. Prinsip-prinsip dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE akan diatur tersendiri dalam pedoman standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Sebuah Aplikasi Umum akan digunakan secara berbagai oleh seluruh IPPD yang membutuhkan fungsi dari aplikasi umum ini. Dengan demikian dalam pembangunan dan pengembangannya, IPPD perlu mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebagai tingkat 3 (tiga) pada Referensi Arsitektur Aplikasi mengacu pada Area Layanan (Referensi Arsitektur Layanan SPBE tingkat 2) dan untuk penetapan Referensi Arsitektur Aplikasi tingkat 4 (empat) perlu memperhatikan pertimbangan terkait. Dalam membangun aplikasi khusus, IPPD perlu mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dengan demikian dapat diusulkan referensi arsitektur yang sesuai dalam mengelompokkan aplikasi yang dibangun. Selain itu dalam menyusun dan membangun domain arsitektur aplikasi, IPPD perlu memperhatikan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi terkait.

Seperti halnya aplikasi, penyelenggaraan infrastruktur SPBE perlu dijelaskan dengan rinci dengan banyaknya ragam infrastruktur TIK yang digunakan, maka perlu adanya kesamaan persepsi mengenai penggunaan TIK dalam SPBE. Infrastruktur SPBE terbagi menjadi 3 berdasarkan penyelenggaranya, yaitu Infrastruktur SPBE Nasional, diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, infrastruktur SPBE Instansi Pusat, diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh masing-masing kepala daerah.

Pada tahap awal penyelenggaraan SPBE, perlu dilakukan pemetaan secara keseluruhan baik atas infrastruktur yang diselenggarakan secara nasional, maupun yang diselenggarakan oleh IPPD. Untuk itu diperlukan informasi secara detil atas arsitektur infrastruktur yang dimiliki oleh IPPD. Dengan dilengkapinya atribut metadata yang diperlukan, dapat disusun Arsitektur Infrastruktur SPBE menggunakan relasi metadata arsitektur/metamodel SPBE. Untuk penyajian luarannya dapat menggunakan aplikasi untuk pengolahan *enterprise architecture* (EA Tool Applications). Bentuk luaran dari Arsitektur Infrastruktur SPBE.



Gambar 2.8 Ilustrasi Sederhana Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur keamanan SPBE sedikit berbeda dengan metode penyusunan domain arsitektur SPBE lainnya. Pada penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE, pendefinisian domain atau substansi arsitektur SPBE dilakukan dengan melakukan pengisian metadata arsitekturnya. Berbeda dengan Arsitektur SPBE pada domain lainnya, keamanan TIK (*cyber security*) sangat bergantung pada peran aktif pengelola asset TIK terkait. Menghadapai hal ini telah diterbitkan sebuah regulasi Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dijadikan acuan IPPD dalam menyelenggarakan/ mengelola manajemen keamanan di instansi masing-masing.

Subtansi domain Keamanan SPBE akan menggambarkan kematangan manajemen keamanan yang dilakukan oleh IPPD sebagai penyelenggara SPBE. Terdapat berbagai standar dan acuan dalam pengelolaan keamanan TIK, baik berupa standar internasional terhadap spesifik entitas infrastruktur tertentu ataupun secara umum ataupun berupa peraturan internal instansi pemerintahan yang ada. Audit TIK merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keamanan TIK pada penyelenggaraan SPBE. Semua kegiatan audit keamanan TIK, baik audit keamanan aplikasi ataupun audit keamanan infrastruktur yang dilakukan oleh internal dan eksternal selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Kegiatan-kegiatan instansi dalam rangka manajemen keamanan TIK selama kurun waktu setahun terakhir dirangkum pada sebuah atribut tersendiri. Kelompok kegiatan penerapan manajemen keaman yang dicatatkan diantaranya edukas kesadaran keaman SPBE, penilaian kerentanan keamanan SPBE, peningkatan keamanan SPBE, penangann insiden keamanan SPBE. Penggunaan teknologi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dikawal dengan penggunaan teknologi yang layak dari sisi keamanan. Untuk itu dilakukan uji

kelaikan baik pada aplikasi umum dan juga infrastruktur yang digunakan. Rekomendasi kelaikan keamanan SPBE diperlukan IPPD untuk menunjukkan penggunaan teknologi TIK yang layak.

Perlu diperhatikan dalam penyusunan arsitektur ini adalah Arsitektur SPBE Instansi Pusat ataupun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional. Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian IPPD yang membangun arsitekturnya perlu memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Demikian juga dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam SPBE perlu dipahami secara bersama-sama sehingga memudahkan pengintegrasian seluruh arsitektur SPBE yang ada dalam Arsitektur SPBE Nasional. Pada pedoman ini diterangkan kembali terkait pemahaman-pemahaman yang diperlukan untuk penyusunan arsitektur SPBE IPPD. Diharapkan akan dapat membantu dalam penyamaan pemahaman yang benar bagi penyelenggara SPBE di IPPD.

Dalam Arsitektur SPBE Nasional terdapat enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD), dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

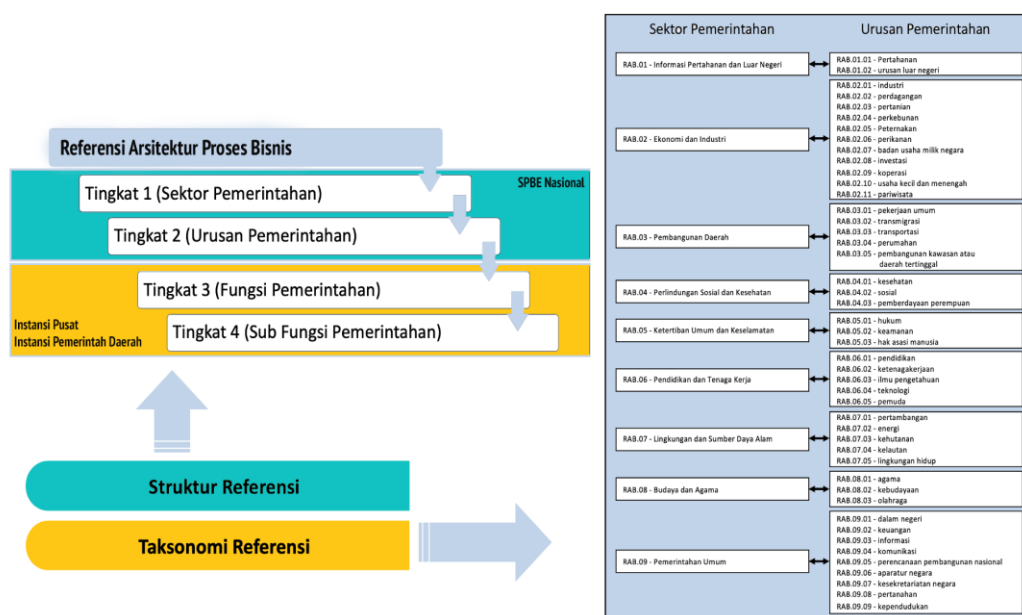
1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur proses bisnis dijelaskan pada gambar berikut ini.



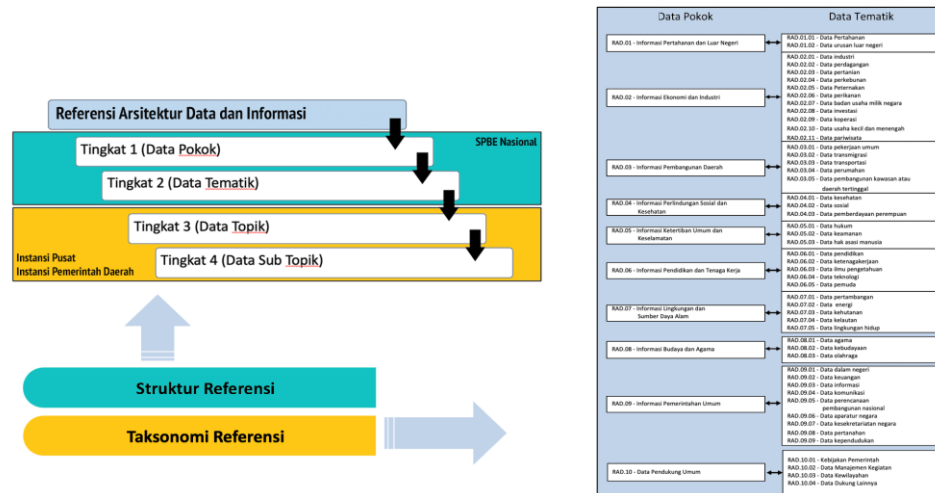
Gambar 2.9 Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

2. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi kedalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur data dijelaskan pada gambar berikut ini.



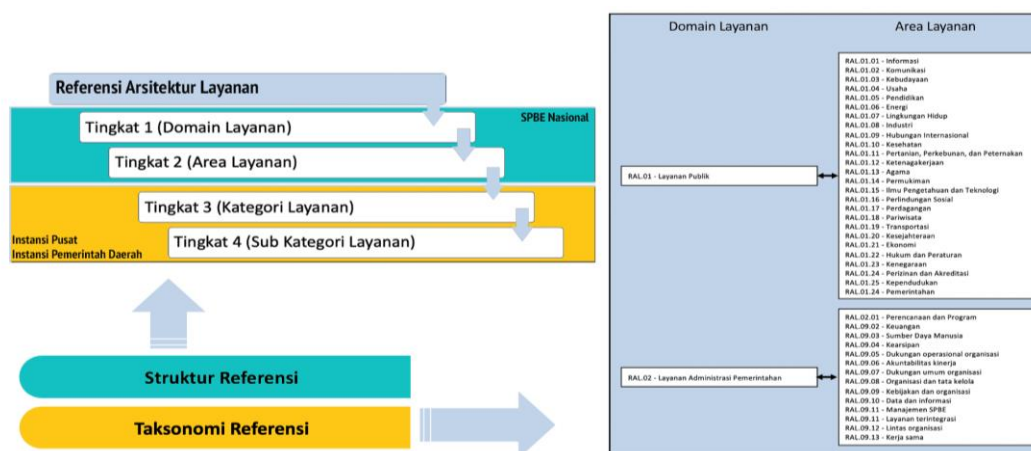
Gambar 2.10 Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

3. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada

struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional. Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur layanan dijelaskan pada gambar 2.11 berikut ini.



Gambar 2.11 Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

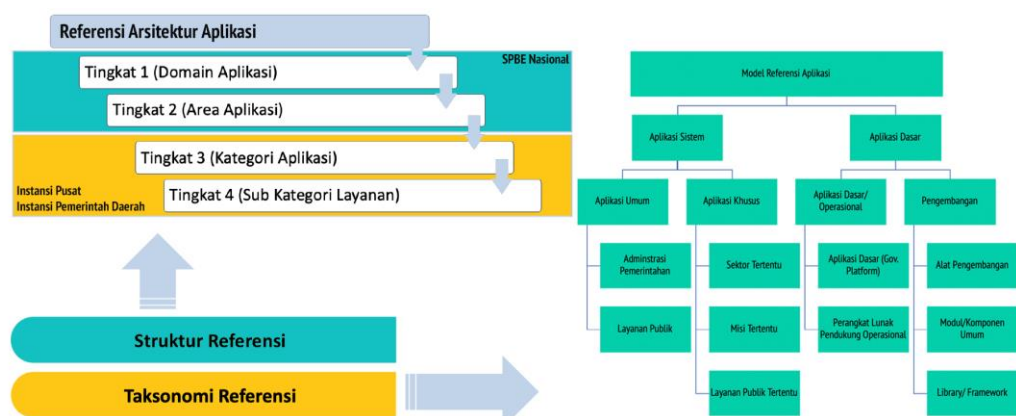
4. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada

struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar 2.12 berikut ini.



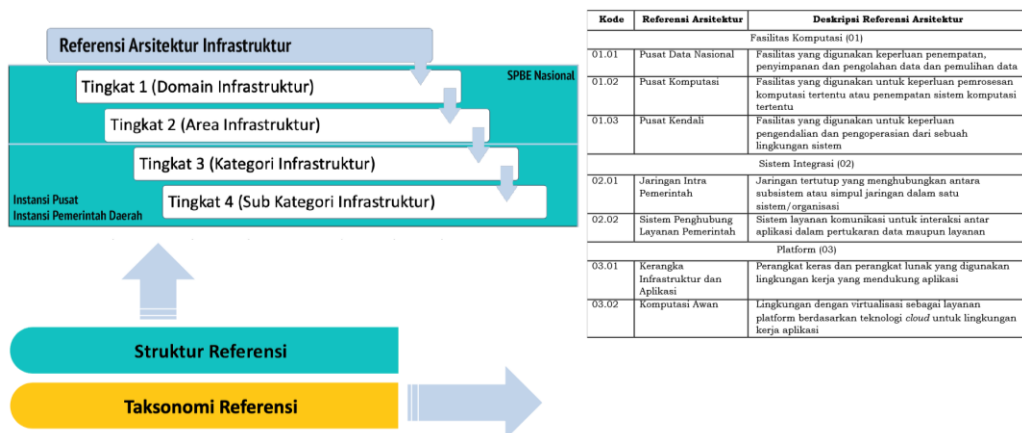
Gambar 2.12 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

5. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar 2.13 berikut ini.



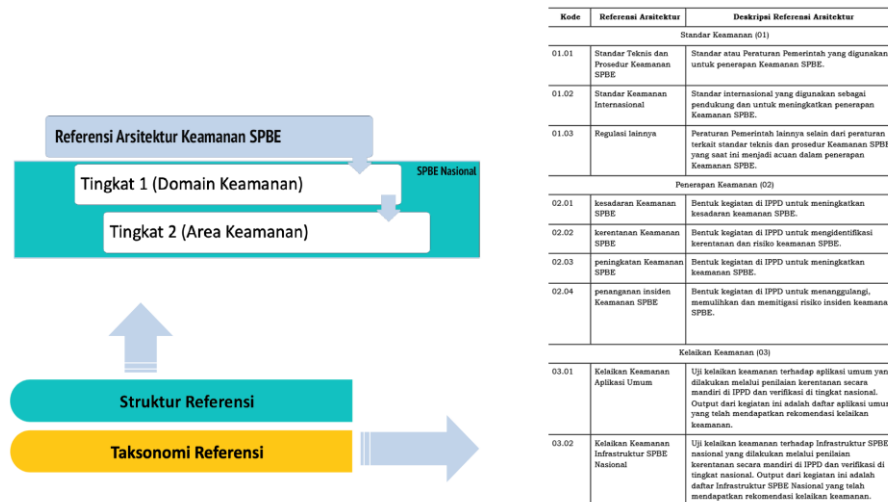
Gambar 2.13 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

6. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar 2.14 berikut ini.



Gambar 2.14 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

C. Visi Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara kolaboratif dan saling berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang diatur oleh hukum di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, semua Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki satu visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024.

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah:

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN melalui perannya mampu menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan di pasar domestik maupun global.
- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa BSN dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder dan produk kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada kajian ilmiah.
- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

D. Misi Badan Standardisasi Nasional

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional adalah “Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;

2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

E. Kerangka Strategis Badan Standardisasi Nasional

Kerangka strategis Badan Standardisasi Nasional (BSN) dirancang untuk menjadi panduan yang menyeluruh dan terarah dalam mencapai tujuan utama BSN dalam memajukan standardisasi di Republik Indonesia. Kerangka strategis ini mencakup langkah yang diperlukan untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan standar nasional yang berkualitas, menjaga konsistensi dan keterpaduan antara standar nasional dan internasional, serta meningkatkan peran BSN dalam mendukung kebijakan pemerintah, kemajuan industri, dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka strategis ini, BSN juga fokus pada peningkatan kesadaran, pendidikan, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses standardisasi, serta memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mempromosikan harmonisasi dan saling pengakuan standar.



Gambar 2.15 Kerangka Strategis BSN

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global. Dampak yang ditimbulkan adalah produk Indonesia berdaya saing, baik terhadap produk domestik maupun luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan “Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global”, terdapat 4 (empat) pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Pilar pertama: Pengembangan dan Evaluasi Standar, Pilar kedua: Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Pilar Ketiga: Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Pilar keempat: Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

Keempat pilar tersebut dapat berdiri tegak diikat dengan adanya Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal yang digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, melibatkan layanan jasa kalibrasi, pengujian, dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di



- 39 -

luar negeri. Untuk itu, kebutuhan tata kelola TI dalam upaya mendukung tata kelola SPK menjadi keharusan untuk mempermudah layanan SPK dengan menghasilkan layanan digital yang bisa terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain.

BAB III

ARSITEKTUR SPBE

A. Arsitektur Domain Proses Bisnis

Arsitektur Proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing unit kerja sesuai tugas dan fungsi berdasarkan dokumen peta proses bisnis BSN. Pemetaan proses bisnis di masing-masing unit kerja ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional.

1. Arsitektur Proses Bisnis

Secara ideal Arsitektur proses bisnis pemerintah melibatkan beberapa hal yang berhubungan dengan operasional pemerintahan serta kaitannya dengan pelaksanaan transformasi digital pemerintah atau dalam konteks ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemetaan Proses: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses unik yang ada di dalam pemerintah, termasuk kegiatan seperti pemberian layanan publik, pengembangan kebijakan, kepatuhan terhadap peraturan, pengadaan, penganggaran, dan fungsi administrasi.
- b) Integrasi Proses: Membangun koneksi dan saling ketergantungan antara proses dan sistem pemerintah yang berbeda. Hal ini memastikan kelancaran arus informasi dan koordinasi lintas instansi, mempromosikan kolaborasi yang efektif dan penyampaian layanan.
- c) Standardisasi dan *compliance*: Menerapkan prosedur dan praktik standar untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan.
- d) Pendekatan yang Berpusat pada Masyarakat: Merancang proses dengan fokus pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini

dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh *experience* masyarakat dalam mengakses pelayanan publick dan menggabungkan mekanisme umpan balik untuk terus meningkatkan pemberian layanan dan daya tanggap.

- e) Transformasi Digital: Memanfaatkan solusi teknologi untuk mengotomatisasi dan merampingkan proses pemerintahan, seperti menerapkan platform digital, SPBE, dan saluran penyampaian layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi.
- f) Pengukuran Kinerja: Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan metrik untuk mengukur kinerja proses pemerintahan sebagai pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dari proses untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari keterhubungan hal tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari arsitektur proses bisnis pemerintah meliputi:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Meningkatkan penyampaian dan kepuasan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola.
- 4) Memperlancar koordinasi dan kerjasama antar lembaga.
- 5) Beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi baru.
- 6) Mengoptimalkan alokasi sumber daya dan proses penganggaran.

Dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintah yang dirancang dengan baik, pemerintah dapat mencapai penyampaian layanan yang lebih baik, peningkatan efisiensi, dan tata kelola yang berpusat pada warga negara yang lebih baik. Dengan demikian dapat membantu mendorong transformasi digital, merampingkan operasi, dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan

efektif.

Katalog Proses Bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing unit kerja untuk mendukung tercapainya visi dan misi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dimana untuk Level 1 dan 2 nya mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 3 hingga seterusnya mengacu pada proses bisnis pada BSN.

Sesuai dengan kebijakan di nasional, struktur dari RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama)
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia

Tabel 3.1 Arsitektur Proses Bisnis BSN

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.02 Urusan Luar Negeri	RAB.01.02.01 Hubungan Luar Negeri	RAB.01.02.01.01 Kerja Sama Luar Negeri	RAB.01.02.01.01.01 Pengoordinasian dan Pengelolaan Serta Dukungan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri		RAB.01.02.01.01. 01	Pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama luar negeri
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar	RAB.02.01.05.01.01 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional Sektor Pertanian,	RAB.02.01.05.01. 01.01	Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan standar Sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Kimia, Kesehatan, dan Halal		kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan	RAB.02.01.05.01.01 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional Sektor	RAB.02.01.05.01.01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan standar Sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Kimia, Kesehatan, dan Halal		lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01.01 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar	RAB.02.01.05.01. 01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan standar Sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	Internasional Sektor Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Kimia, Kesehatan, dan Halal		pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan	RAB.02.01.05.01.01 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang	RAB.02.01.05.01.01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan standar Sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	Pengembangan Standar Sektor Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Kimia, Kesehatan, dan Halal		standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	RAB.02.01.05.01.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan	RAB.02.01.05.01.02 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01. 02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Pengembangan Standar	Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Telekomunikasi	Indonesia dan Standar Internasional Sektor Mekanika dan Material, Energi Baru Terbarukan dan Energi Tak Terbarukan, Elektronika dan Ketenagalistrikan, Transportasi, dan Teknologi Informasi		standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan	RAB.02.01.05.01.02 Penyusunan dan Pelaksanaan	RAB.02.01.05.01.02 .02 Penyiapan Pelaksanaan	RAB.02.01.05.01. 02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
		Standar Nasional	Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Intemasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Intenasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Telekomunikasi	Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Intemasional Sektor Mekanika dan Material, Energi Baru Terbarukan dan Energi Tak Terbarukan, Elektronika dan Ketenagalistrikan, Transportasi, dan Teknologi Informasi		pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar intemasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia danStandar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Energi,	RAB.02.01.05.01.02 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia danStandar Internasional Sektor Mekanika dan Material, Energi Baru Terbarukan dan Energi Tak Terbarukan, Elektronika dan Ketenagalistrikan, Transportasi, dan Teknologi Informasi	RAB.02.01.05.01. 02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Elektroteknika, Transportasi, dan Telekomunikasi			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang	RAB.02.01.05.01.02 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Mekanika dan Material, Energi Baru Terbarukan dan Energi Tak Terbarukan, Elektronika dan	RAB.02.01.05.01. 02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Pengembangan Standar Sektor Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Telekomunikasi	Ketenagalistrikan, Transportasi, dan Teknologi Informasi		transportasi, dan teknologi informasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.03 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan	RAB.02.01.05.01.03 .01 Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional Sektor Infrastruktur, Kebumian, Kebencanaan,	RAB.02.01.05.01. 03.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Infrastruktur, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Inovasi Baru, dan Aneka	Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Jasa, Personal, Ekonomi Kreatif, Teknologi Khusus, Inovasi Baru, dan Aneka		penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.03 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01.03 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar	RAB.02.01.05.01. 03.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Intemasionsil di Bidang Pengembangan Standar Sektor Infrastruktur, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Inovasi Baru, dan Aneka	Internasional Sektor Infrastruktur, Kebumian, Kebencanaan, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Jasa, Personal, Ekonomi Kreatif, Teknologi Khusus, Inovasi Baru, dan Aneka		infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di	RAB.02.01.05.01.03 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan	RAB.02.01.05.01.03 .03 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	RAB.02.01.05.01. 03.03	pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Bidang Pengembangan Standar	Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Infrastruktur, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Inovasi Baru, dan Aneka	Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional Sektor Infrastruktur, Kebumian, Kebencanaan, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Jasa, Personal, Ekonomi Kreatif, Teknologi Khusus, Inovasi Baru, dan Aneka		Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Standar	RAB.02.01.05.01.03 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, Serta Pemenuhan Kewajiban Intemasionsil di Bidang Pengembangan Standar Sektor Infrastruktur,	RAB.02.01.05.01.03 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Standar Sektor Infrastruktur, Kebumian, Kebencanaan, Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Jasa, Personal, Ekonomi Kreatif, Teknologi	RAB.02.01.05.01. 03.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Sistem Manajemen, Penilaian Kesesuaian, Inovasi Baru, dan Aneka	Khusus, Inovasi Baru, dan Aneka		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Sistem dan Pengendalian Penerapan Standar	RAB.02.01.05.02.01 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian, Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian, Pengendalian	RAB.02.01.05.02.01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				dan Penilaian Kesesuaian	Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		dan penilaian kesesuaian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Sistem dan Pengendalian Penerapan Standar	RAB.02.01.05.02.01 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian, Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian, Pengendalian Penerapan Standar	RAB.02.01.05.02. 01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				dan Penilaian Kesesuaian	dan Penilaian Kesesuaian		dan penilaian kesesuaian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Sistem danPengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian, Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian, Pengendalian Penerapan Standar	RAB.02.01.05.02. 01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
					dan Penilaian Kesesuaian		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Sistem dan Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.01 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengembangan Sistem dan Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02. 01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Konsultasi dan Diseminasi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.02 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian, Fasilitasi Pelaku Usaha dan Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02. 02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di	RAB.02.01.05.02.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan	RAB.02.01.05.02.02 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	RAB.02.01.05.02. 02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Konsultasi dan Diseminasi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian, Fasilitasi Pelaku Usaha dan Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan	RAB.02.01.05.02.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban	RAB.02.01.05.02.02 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian, Fasilitasi Pelaku	RAB.02.01.05.02. 02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Penilaian Kesesuaian	Intemasional di Bidang Konsultasi dan Diseminasi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Usaha dan Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Intemasional di Bidang Konsultasi dan Diseminasi Penerapan Standar	RAB.02.01.05.02.02 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Intemasional Bidang Diseminasi dan Konsultasi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.02.02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				dan Penilaian Kesesuaian			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.03.01 Penyusunan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem dan Harmonisasi di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan	RAB.02.01.05.03.01 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan	RAB.02.01.05.03. 01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Acuan, dan Lembaga Sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Serta Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Acuan, dan Lembaga Sertifikasi		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan	RAB.02.01.05.03 Penyusunan dan Pelaksanakan	RAB.02.01.05.03.01 Penyusunan Kebijakan dan	RAB.02.01.05.03.01 .02 Penyiapan Pengembangan	RAB.02.01.05.03. 01.02	penyiapan pengembangan sistem akreditasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
		Standar Nasional	Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Pengelolaan Sistem dan Harmonisasi di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Sistem Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi		laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Serta Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga	RAB.02.01.05.03.01 Penyusunan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem danHarmonisasi di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian,	RAB.02.01.05.03.01 .03 Penyiapan Pelaksanaan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium	RAB.02.01.05.03. 01.03	penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Penilaian Kesesuaian	Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Serta Pelaksanaan Pemenuhan	Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi		laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Kewajiban Internasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.03.01 Penyusunan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem dan Harmonisasi di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi,	RAB.02.01.05.03.01 .04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengembangsin Sistem danHarmonisasi Akreditasi	RAB.02.01.05.03. 01.04	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangsin sistem dan harmonisasi akreditasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Serta Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Intemasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian			

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.03.01 Penyusunan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem dan Harmonisasi di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan, dan Lembaga Sertifikasi,	RAB.02.01.05.03.01 .05 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Intemasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.03. 01.05	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Serta Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan dan Pelaksanakan Kebijakan di Bidang	RAB.02.01.05.03.02 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	RAB.02.01.05.03.02 .01 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Akreditasi	RAB.02.01.05.03. 02.01	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan	Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan		pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan dan Pelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan	RAB.02.01.05.03.02 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan	RAB.02.01.05.03.02 .02 Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium	RAB.02.01.05.03. 02.02	pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Akreditasi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan	Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan		laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan dan Pelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi	RAB.02.01.05.03.02 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi	RAB.02.01.05.03.02 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian,	RAB.02.01.05.03.02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Lembaga Penilaian Kesesuaian	Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, danProdusen Bahan Acuan	Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, danProdusen Bahan Acuan		kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga	RAB.02.01.05.03.03 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Inspeksi	RAB.02.01.05.03.03 .01 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi danLembaga Sertifikasi	RAB.02.01.05.03. 03.01	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Penilaian Kesesuaian	danLembaga Sertifikasi			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	RAB.02.01.05.03.03 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Inspeksi danLembaga Sertifikasi	RAB.02.01.05.03.03 .02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Inspeksi danLembaga Sertifikasi	RAB.02.01.05.03. 03.02	pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.03 Penyusunan danPelaksanakan Kebijakan di	RAB.02.01.05.03.03 Pelaksanaan Kebijakan Serta Evaluasi dan	RAB.02.01.05.03.03 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang	RAB.02.01.05.03. 03.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.		inspeksi dan lembaga sertifikasi.
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan	RAB.02.01.05.04.01 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Massa, Panjang, Akustik dan Vibrasi, Serta Radiasi dan Biologi;	RAB.02.01.05.04.01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Sistem Ketertelusuran Pengukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi.			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem	RAB.02.01.05.04.01 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Massa, Panjang, Akustik dan Vibrasi, Serta Radiasi dan Biologi	RAB.02.01.05.04. 01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Ketertelusuran Pengukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi.			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran	RAB.02.01.05.04.01 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Massa, Panjang, Akustik dan Vibrasi, Serta Radiasi dan Biologi	RAB.02.01.05.04. 01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Pengukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi.			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Intemasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04.01 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Intemasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran	RAB.02.01.05.04. 01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi.	Pengukuran Massa, Panjang, Akustik dan Vibrasi, Serta Radiasi dan Biologi		panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan	RAB.02.01.05.04.02 .01 Penyiapan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Suhu, Fotometri dan Radiometri,	RAB.02.01.05.04.02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Sistem Ketertelusuran Pengukuran Termoelektrik dan Kimia	Kelistrikan dan Waktu, Serta Kimia		
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem	RAB.02.01.05.04.02 .02 Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Suhu, Fotometri dan Radiometri, Kelistrikan dan Waktu, Serta Kimia;	RAB.02.01.05.04. 02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Ketertelusuran Pengukuran Termoelektrik dan Kimia			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran	RAB.02.01.05.04.02 .03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Suhu, Fotometri dan Radiometri, Kelistrikan dan Waktu, Serta Kimia	RAB.02.01.05.04. 02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Pengukuran Termoelektrik dan Kimia			
RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAB.02.01.05.04 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	RAB.02.01.05.04.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran	RAB.02.01.05.04.02 .04 Penyiapan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Internasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dan Sistem Ketertelusuran Pengukuran Suhu, Fotometri dan Radiometri,	RAB.02.01.05.04. 02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Termoelektrik dan Kimia	Kelistrikan dan Waktu, Serta Kimia		
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 Hukum	RAB.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-Undangan	RAB.05.01.01.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.05.01.01.01.01 Pengoordinasian dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Badan		RAB.05.01.01.01.01	pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan Badan
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 Hukum	RAB.05.01.06 Penegakan Hukum	RAB.05.01.06.01 Advokasi Hukum di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.05.01.06.01.01 Pelaksanaan Advokasi Hukum Badan		RAB.05.01.06.01.01	pelaksanaan advokasi hukum Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	RAB.08.02.05.01 Pengelolaan Perpustakaan	RAB.08.02.05.01.01 Pengoordinasian dan Pengelolaan Perpustakaan Dan Layanan Dokumen Standar		RAB.08.02.05.01. 01	pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.08 Hubungan Dalam Negeri	RAB.09.01.08.01 Kerja Sama Dalam Negeri	RAB.09.01.08.01.01 Pengoordinasian dan Pengelolaan Serta Dukungan Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri		RAB.09.01.08.01. 01	pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.01 Pembinaan Keuangan Instansi	RAB.09.02.01.01 Pembinaan Keuangan Instansi di Bidang	RAB.09.02.01.01.01 Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak		RAB.09.02.01.01. 01	verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Pengelolaan Standar Nasional	di Lingkungan Badan			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.05 Penganggaran	RAB.09.02.05.01 Penganggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.05.01.01 Pengoordinasian dan Penyusunan Anggaran di Lingkungan Badan		RAB.09.02.05.01. 01	pengoordinasian dan penyusunan anggaran di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.05 Penganggaran	RAB.09.02.05.01 Penganggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.05.01.02 Penyusunan Anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.02.05.01. 02	penyusunan anggaran pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.05 Penganggaran	RAB.09.02.05.01 Penganggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.05.01.03 Penyusunan Anggaran Pusat Data dan Informasi		RAB.09.02.05.01. 03	penyusunan anggaran pusat data dan informasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	RAB.09.02.06.01 Perbendaharaan di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.06.01.01 Pelaksanaan Perbendaharaan di Lingkungan Badan		RAB.09.02.06.01. 01	pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset	RAB.09.02.08.01 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.08.01.01 Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan		RAB.09.02.08.01. 01	pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset	RAB.09.02.08.02 Manajemen Aset di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.08.02.01 Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan		RAB.09.02.08.02. 01	pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.10 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	RAB.09.02.10.01 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.10.01.01 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Badan		RAB.09.02.10.01. 01	evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.10 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	RAB.09.02.10.01 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran di Bidang	RAB.09.02.10.01.02 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pusat Pengembangan		RAB.09.02.10.01. 02	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat pengembangan sumber daya

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Pengelolaan Standar Nasional	Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian			manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.10 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	RAB.09.02.10.01 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.02.10.01.03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pusat Data dan Informasi		RAB.09.02.10.01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB.09.03.01.01 Penyusunan Kebijakan Informatika	RAB.09.03.01.01.01 Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dalam Pengelolaan Data, Sistem		RAB.09.03.01.01.01	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem informasi,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Informasi, Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian			infrastruktur teknologi dan keamanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB.09.03.01.02 Pengelolaan Sistem Informasi	RAB.09.03.01.02.01 Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.03.01.02. 01	pengelolaan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB.09.03.01.03 Pengelolaan Infrastruktur Informatika	RAB.09.03.01.03.01 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,		RAB.09.03.01.03. 01	pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Serta Keamanan Informasi			serta keamanan informasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Data Statistik	RAB.09.03.02.01 Pengelolaan Data Statistik Sektoral	RAB.09.03.02.01.01 Pengelolaan Data di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.03.02.01. 01	pengelolaan data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.04.01 Pengelolaan Informasi Publik di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.03.04.01.01 Pendokumentasian Hukum dan Pemberian Informasi Hukum		RAB.09.03.04.01. 01	pendokumentasian hukum dan pemberian informasi hukum
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.04.01 Pengelolaan Informasi Publik di Bidang	RAB.09.03.04.01.02 Pengoordinasian dan Pengelolaan		RAB.09.03.04.01. 02	pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Pengelolaan Standar Nasional	Hubungan Masyarakat			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.04.01 Pengelolaan Informasi Publik di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.05.04.01.03 Publikasi dan Dokumentasi Badan		RAB.09.03.04.01. 03	publikasi dan dokumentasi Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.04 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.04.01 Pengelolaan Informasi Publik di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.05.04.01.04 Pengoordinasian dan Pengelolaan Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat		RAB.09.03.04.01. 04	pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Penyusunan Rencana	RAB.09.05.07.01 Penyusunan Rencana Pembangunan	RAB.09.05.07.01.01 Pengoordinasian dan Penyusunan		RAB.09.05.07.01. 01	pengoordinasian dan penyusunan rencana program di lingkungan Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
		Pembangunan Nasional	Nasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	Rencana Program di Lingkungan Badan			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.05.07.01.02 Penyusunan Rencana, Program, dan Kegiatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.05.07.01.02	penyusunan rencana, program, dan kegiatan pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Penyusunan Rencana	RAB.09.05.07.01 Penyusunan Rencana Pembangunan	RAB.09.05.07.01.03 Penyusunan Rencana, Program,		RAB.09.05.07.01.03	penyusunan rencana, program, dan kegiatan pusat data dan informasi

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
		Pembangunan Nasional	Nasional di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	dan Kegiatan Pusat Data dan Informasi			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	RAB.09.06.02.01 Pengawasan Internal	RAB.09.06.02.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern		RAB.09.06.02.01.01	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	RAB.09.06.02.01 Pengawasan Internal	RAB.09.06.02.01.02 Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Kineija dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan		RAB.09.06.02.01.02	pelaksanaan pengawasan intern terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Pengawasan Lainnya			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	RAB.09.06.02.01 Pengawasan Internal	RAB.09.06.02.01.03 Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Kepala Basan		RAB.09.06.02.01. 03	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala basan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	RAB.09.06.02.01 Pengawasan Internal	RAB.09.06.02.01.04 Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan		RAB.09.06.02.01. 04	penyusunan laporan hasil pengawasan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.03 Kelembagaan dan Tata Laksana	RAB.09.06.03.01 Sistem Kelembagaan	RAB.09.06.03.01.01 Penataan Organisasi di Lingkungan Badan		RAB.09.06.03.01. 01	penataan organisasi di lingkungan Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.03 Kelembagaan dan Tata Laksana	RAB.09.06.03.02 Tata Laksana	RAB.09.06.03.02.01 Penataan Tata Laksana di Lingkungan Badan		RAB.09.06.03.02.01	penataan tata laksana di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Manajemen ASN	RAB.09.06.04.01 Manajemen ASN di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.06.04.01.01 Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan		RAB.09.06.04.01.01	pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Manajemen ASN	RAB.09.06.04.01 Manajemen ASN di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.06.04.01.02 Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Standardisasi dan		RAB.09.06.04.01.02	penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Penilaian Kesesuaian;			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Manajemen ASN	RAB.09.06.04.01 Manajemen ASN di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.06.04.01.03 Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.06.04.01. 03	penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Manajemen ASN	RAB.09.06.04.01 Manajemen ASN di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.06.04.01.04 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Standardisasi dan		RAB.09.06.04.01. 04	pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Penilaian Kesesuaian			
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Manajemen ASN	RAB.09.06.04.01 Manajemen ASN di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.06.04.01.05 Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		RAB.09.06.04.01. 05	pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.02 Koordinasi Dengan Lembaga Negara	RAB.09.07.02.01 Hubungan Antar Lembaga	RAB.09.07.02.01.01 Pengoordinasian dan Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga		RAB.09.07.02.01. 01	pengoordinasian dan pengelolaan hubungan antar lembaga
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Manajemen Pimpinan Tinggi	RAB.09.07.03.01 Manajemen	RAB.09.07.03.01.01 Pelaksanaan Urusan Keprotokolan		RAB.09.07.03.01. 01	pelaksanaan urusan keprotokolan

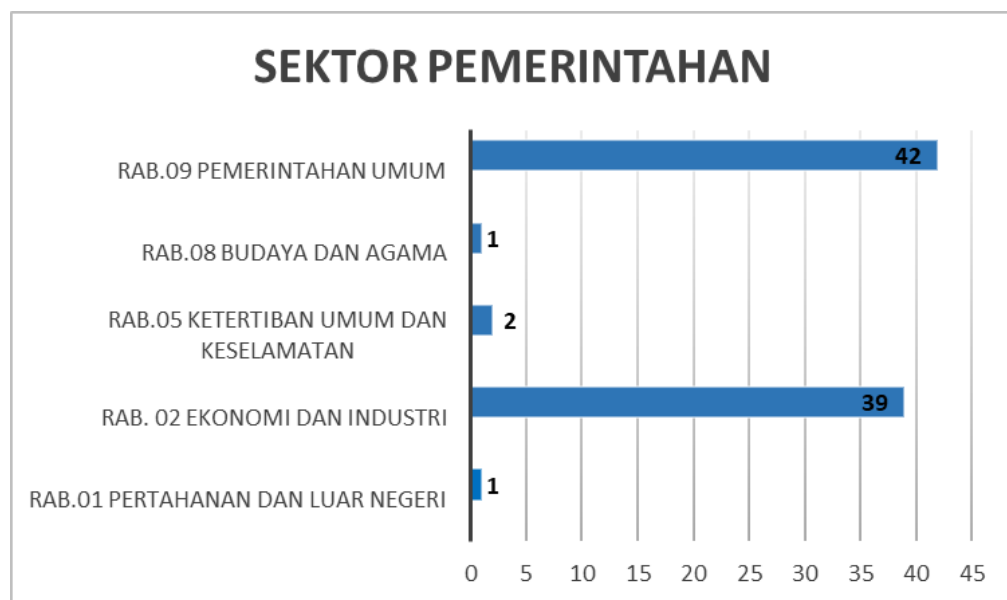
RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
			Pimpinan Tinggi Badan				
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Manajemen Pimpinan Tinggi	RAB.09.07.03.01 Manajemen Pimpinan Tinggi Badan	RAB.09.07.03.01.02 Penyiapan Koordinasi dan Pemberian Dukungan Informasi Strategis Kepada Pimpinan		RAB.09.07.03.01. 02	penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.06 Pembinaan Arsip Dinamis	RAB.09.07.06.01 Pembinaan Arsip Dinamis di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAB.09.07.06.01.01 Pelaksanaan Urusan Kearsipan Dinamis Badan		RAB.09.07.06.01. 01	pelaksanaan urusan kearsipan dinamis Badan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.01 Dukungan Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.01.01 Pelaksanaan Urusan Kerumahtangaan Badan		RAB.09.07.07.01. 01	pelaksanaan urusan kerumahtangaan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.02 Dukungan Administrasi Instansi	RAB.09.07.07.02.01 .01 Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Badan		RAB.09.07.07.02. 01	pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.02 Dukungan Administrasi Instansi	RAB.09.07.07.02.02 Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan		RAB.09.07.07.02. 02	pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan

RAB Level 1 (Sektor Pemerintahan)	RAB Level 2 (Urusan Pemerintahan)	RAB Level 3 (Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)	RAB Level 5	RAB Level 6	Kode Model Referensi	Nama Proses Bisnis
				Penilaian Kesesuaian			penilaian kesesuaian
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.02 Dukungan Administrasi Instansi	RAB.09.07.07.02.03 Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi		RAB.09.07.07.02. 03	pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pusat data dan sistem informasi
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Kerumahtangga an Instansi	RAB.09.07.07.02 Dukungan Administrasi Instansi	RAB.09.07.07.02.04 Pelaksanaan Administrasi Inspektorat		RAB.09.07.07.02. 04	pelaksanaan administrasi inspektorat

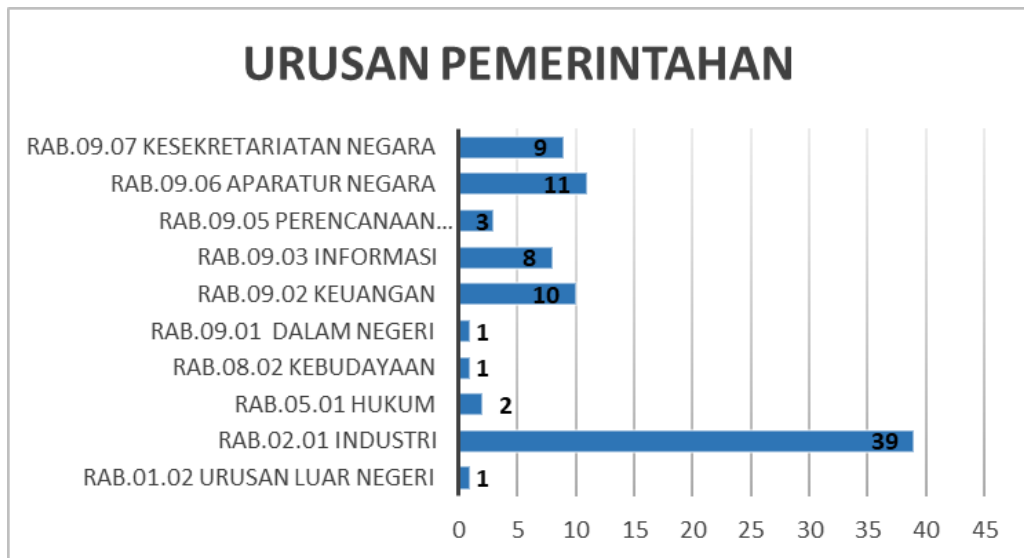
2. Analisis Proses Bisnis

Arsitektur proses bisnis BSN mengacu pada desain struktural dan organisasi proses bisnis dalam konteks operasional BSN. Arsitektur proses bisnis ini berfokus pada pemetaan dan optimalisasi proses yang spesifik untuk fungsi dan kegiatan BSN. Analisa terhadap proses bisnis yang ada dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut.



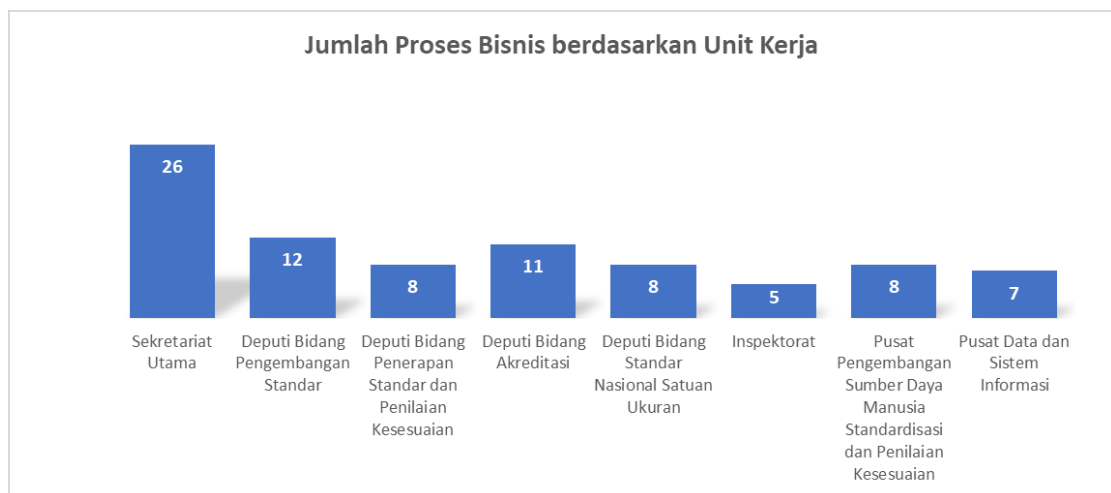
Gambar 3.1 RAB level 1 Nasional

Pada level 1 RAB nasional, terdapat 5 referensi arsitektur bisnis, RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri, RAB.02 Ekonomi dan Industri, RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan, RAB.08 Budaya dan Agama, dan RAB.09 Pemerintahan Umum, dimana terdapat total 85 Proses bisnis dengan rincian terdapat 1 Probis pada RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri, 29 Probis pada RAB.02 Ekonomi dan Industri, 2 Probis pada RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan, 1 Probis pada RAB.08 Budaya dan Agama, dan 42 Probis pada RAB.09 Pemerintahan Umum.



Gambar 3.2 RAB level 2 Nasional

RAB Level 2 Nasional yang terlihat pada gambar 3.2 diatas menunjukkan 1 Probis pada RAB.01.02 Urusan Luar Negeri, 39 Probis pada RAB 02.01 Industri, 2 Probis pada RAB.05.01 Hukum, 1 Probis pada RAB 08.02 Kebudayaan, 1 Probis pada RAB.09.01 Dalam Negeri, 10 Probis pada RAB.09.02 Keuangan, 8 Probis pada RAB.09.03 Informasi, 3 Probis merupakan RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional, 11 Probis pada RAB.09.06 Aparatur Negara, dan 9 Probis pada RAB.09.07 Kesekretariatan Negara.



Gambar 3.3 Unit Kerja terkait Proses Bisnis

Merujuk pada gambar 3.3 menjelaskan terkait dengan proses bisnis di masing-masing unit kerja (Eselon 1) BSN, terdapat 26 Probis milik Sekretariat Utama, 12 Probis milik Deputi Bidang Pengembangan Standar,

8 Probis milik Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, 11 Probis milik Deputy Bidang Akreditasi, 8 Probis milik Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, 5 Probis milik Inspektorat, 8 Probis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan 7 Probis milik Pusat Data dan Sistem Informasi.

3. Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Standardisasi Nasional (BSN), metadata proses bisnis memainkan peran penting dalam mengorganisir dan mengelola informasi terkait dengan berbagai aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh unit kerja di dalam BSN. Salah satu elemen metadata yang relevan adalah ID Metadata, yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap proses bisnis yang ada dalam sistem. ID Metadata memastikan bahwa setiap proses bisnis memiliki pengenal yang jelas dan dapat dikenali oleh sistem, sehingga memudahkan dalam pencarian dan pengelompokan informasi terkait.

Nama Proses Bisnis adalah elemen metadata lainnya yang memberikan gambaran singkat tentang kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses bisnis tertentu. Nama Proses Bisnis harus dirancang dengan jelas dan deskriptif agar mudah dipahami oleh pengguna dan memberikan panduan tentang tujuan utama dari proses bisnis tersebut. Uraian Proses Bisnis juga merupakan bagian penting dari metadata proses bisnis. Uraian ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah atau aktivitas yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Uraian yang baik dan komprehensif akan membantu pengguna untuk memahami alur kerja yang diperlukan dan memberikan petunjuk yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, metadata proses bisnis juga mencakup informasi tentang Unit Kerja yang terkait dengan setiap proses bisnis. Unit Kerja mengacu pada bagian atau divisi dalam BSN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis tersebut. Penyertakan informasi tentang Unit Kerja dalam metadata proses bisnis

memungkinkan pengguna atau pihak terkait untuk mengidentifikasi dengan jelas unit yang harus dihubungi atau bekerja sama terkait dengan proses bisnis yang sedang berjalan.

Secara keseluruhan, metadata proses bisnis seperti ID Metadata, Nama Proses Bisnis, Uraian Proses Bisnis, dan Unit Kerja merupakan komponen penting dalam SPBE BSN. Metadata ini membantu mengorganisir dan mengelola informasi terkait dengan proses bisnis yang ada, memastikan pengenalan unik, memberikan deskripsi yang jelas, dan menunjukkan unit kerja yang terlibat. Dengan demikian, Pengelola SPBE BSN dapat dengan mudah mencari, memahami, dan bekerja dengan proses bisnis yang relevan dan memastikan kelancaran operasional dan efektivitas kerja di BSN.

Tabel 3.2 Metadata Arsitektur Proses Bisnis BSN

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-01.02.01.01.01	Pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama luar negeri	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mengkoordinasikan dan mengelola serta mendukung administrasi kerja sama luar negeri	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-02.01.05.01.01.01	Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
BSN-DAB-02.01.05.01.01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan,	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup,	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
	perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	
BSN-DAB-02.01.05.01.01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
BSN-DAB-02.01.05.01.01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	Penyelenggaraan pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.01.02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
BSN-DAB-02.01.05.01.02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.01.02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
BSN-DAB-02.01.05.01.02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.01.03.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
BSN-DAB-02.01.05.01.03.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.01.03.03	pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
BSN-DAB-02.01.05.01.03.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.02.01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-02.01.05.02.01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.02.01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-02.01.05.02.01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-02.01.05.02.02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
	Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	
BSN-DAB-02.01.05.02.02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-02.01.05.02.02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.02.02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-02.01.05.03.01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
BSN-DAB-02.01.05.03.01.02	penyiapan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
		uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	
BSN-DAB-02.01.05.03.01.03	penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
BSN-DAB-02.01.05.03.01.04	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangsin sistem dan harmonisasi akreditasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangsin sistem dan harmonisasi akreditasi	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
BSN-DAB-02.01.05.03.01.05	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban intemasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.03.02.01	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Direktorat Akreditasi Laboratorium
BSN-DAB-02.01.05.03.02.02	pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Direktorat Akreditasi Laboratorium
BSN-DAB-02.01.05.03.02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan	Direktorat Akreditasi Laboratorium

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB- 02.01.05.03.03.01	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
BSN-DAB- 02.01.05.03.03.02	pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
BSN-DAB- 02.01.05.03.03.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
BSN-DAB- 02.01.05.04.01.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.04.01.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi
BSN-DAB-02.01.05.04.01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi
BSN-DAB-02.01.05.04.01.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa,	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
		panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi	
BSN-DAB-02.01.05.04.02.01	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
BSN-DAB-02.01.05.04.02.02	penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-02.01.05.04.02.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
BSN-DAB-02.01.05.04.02.04	penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-05.01.01.01.01	pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan Badan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-05.01.06.01.01	pelaksanaan advokasi hukum Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan advokasi hukum Badan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-08.02.05.01.01	pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.01.08.01.01	pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.02.01.01.01	verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.02.05.01.01	pengoordinasian dan penyusunan anggaran di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan anggaran di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.02.05.01.02	penyusunan anggaran pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan anggaran pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-09.02.05.01.03	penyusunan anggaran pusat data dan informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.02.06.01.01	pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.02.08.01.01	pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.02.08.02.01	pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.02.10.01.01	evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.02.10.01.02	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.02.10.01.03	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.03.01.01.01	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.03.01.02.01	pengelolaan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.03.01.03.01	pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan	Pusat Data dan Sistem Informasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	
BSN-DAB-09.03.02.01.01	pengelolaan data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.03.04.01.01	pendokumentasian hukum dan pemberian informasi hukum	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pendokumentasian hukum dan pemberian informasi hukum	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-09.03.04.01.02	pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.03.04.01.03	publikasi dan dokumentasi Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi Badan	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.03.04.01.04	pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.05.07.01.01	pengoordinasian dan penyusunan rencana program di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian pengoordinasian dan penyusunan rencana program di lingkungan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.05.07.01.02	penyusunan rencana, program, dan kegiatan pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-09.05.07.01.03	penyusunan rencana, program, dan kegiatan pusat data dan informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.06.02.01.01	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern	Inspektorat
BSN-DAB-09.06.02.01.02	pelaksanaan pengawasan intern terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	Inspektorat
BSN-DAB-09.06.02.01.03	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala basan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan	Inspektorat
BSN-DAB-09.06.02.01.04	penyusunan laporan hasil pengawasan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan	Inspektorat

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.06.03.01.01	penataan organisasi di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan Badan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-09.06.03.02.01	penataan tata laksana di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penataan tata laksana di lingkungan Badan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-09.06.04.01.01	pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
BSN-DAB-09.06.04.01.02	penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-09.06.04.01.03	penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
		fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	
BSN-DAB-09.06.04.01.04	pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-09.06.04.01.05	pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAB-09.07.02.01.01	pengoordinasian dan pengelolaan hubungan antar lembaga	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengelolaan layanan hubungan antar lembaga	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.07.03.01.01	pelaksanaan urusan keprotokolan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan urusan keprotokolan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.07.03.01.02	penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi
BSN-DAB-09.07.06.01.01	pelaksanaan urusan kearsipan dinamis Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan urusan kearsipan dinamis Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.07.07.01.01	pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.07.07.02.01	pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan
BSN-DAB-09.07.07.02.02	pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pusat pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	Unit Kerja
BSN-DAB-09.07.07.02.03	pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pusat data dan sistem informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pusat data dan informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
BSN-DAB-09.07.07.02.04	pelaksanaan administrasi inspektorat	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menyiapkan penyusunan pelaksanaan administrasi inspektorat	Inspektorat

B. Arsitektur Domain Layanan

1. Arsitektur Layanan

Layanan SPBE merupakan *output* dari satu atau beberapa proses bisnis. Sedangkan Arsitektur domain layanan SPBE adalah pendekatan struktural dalam merancang dan mengorganisir sistem dan layanan dalam lingkup SPBE. Arsitektur berperan sebagai panduan dan kerangka kerja yang konsisten dalam mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengelola layanan SPBE. Dengan arsitektur yang baik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat melalui SPBE.

Apabila dilihat dari perspektif *user* atau pengguna layanan dapat diklasifikasikan menjadi layanan publik (*Government to Citizen /G2C* dan *Government to Business/G2B*, dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee /G2E*).

Melalui penerapan Arsitektur Layanan SPBE, diharapkan pemerintah mampu menyediakan layanan yang disempurnakan dan disederhanakan kepada warga negara. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan arsitektur standar, pemerintah dapat menawarkan layanan yang berpusat pada pengguna, efisien, dan dapat diakses. Masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui saluran digital, seperti situs web atau aplikasi seluler, mengakses layanan dengan mudah, mengirimkan dokumen, melakukan pembayaran, dan melacak proses layanan secara online.

Tabel 3.3 Arsitektur Layanan BSN

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL.01.05.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.05.05.02 Penyelenggaraan Akreditasi		RAL.01.05.05.02.01	Layanan Akreditasi
			RAL.01.05.05.03 Pengembangan Kebijakan Standar Nasional		RAL.01.05.05.03.01	Layanan pengembangan kebijakan SNI
			RAL.01.05.05.04 Pengembangan Standar Nasional		RAL.01.05.05.04.01	Layanan pengembangan SNI
			RAL.01.05.05.05 Penerapan Standar Nasional		RAL.01.05.05.05.01	Layanan penerapan SNI
			RAL.01.05.05.06 Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		RAL.01.05.05.06.01	Layanan Informasi Barang SNI yang Tersertifikasi dan Proses SPPT SNI

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
			RAL.01.05.05.07 Dokumen Standar Nasional	RAL.01.05.05.07.01 Pembelian Dokumen Standar	RAL.01.05.05.07.01.01	Layanan Pembelian Dokumen Standar
			RAL.01.05.05.08 Kerja Sama Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.01.05.05.08.01	Layanan Kerjasama
	RAL.01.28 Hukum	RAL.01.28.01 Penyelenggaraan Peraturan danPerundang- Undangan	RAL.01.28.01.01 Penyelenggaraan Peraturan danPerundang- Undangan Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.01.28.01.01.01	Layanan Hukum

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.04 Pengelolaan Informasi Publik	RAL.01.43.04.01 Pengaduan Pelayanan Publik	RAL.01.43.04.01.01 Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.43.04.01.01.01	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
RAL.01.43.04.02 Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum			RAL.01.43.04.02.01 Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.43.04.02.01.01	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	
RAL.01.43.04.03 Layanan Informasi			RAL.01.43.04.03.01 Layanan Informasi Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.43.04.03.01.01	Layanan Informasi BSN	

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
			RAL.01.43.04.04 Layanan Hubungan Masyarakat	RAL.01.43.04.04.01 Layanan Hubungan Masyarakat Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.43.04.04.01.01	Layanan Humas
			RAL.01.43.04.05 Layanan Data Terbuka	RAL.01.43.04.05.01 Data Terbuka Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.01.43.04.05.01.01	Layanan Data Terbuka
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.01 Pembinaan Keuangan Instansi	RAL.02.02.01.01 Pembinaan Keuangan Instansi Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.02.01.01.01	Layanan Program dan Keuangan
		RAL.02.02.05 Penganggaran	RAL.02.02.05.01 Penganggaran Bidang		RAL.02.02.05.01.01	Layanan Penganggaran dan

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
			Pengelolaan Standar Nasional			Keuangan Organisasi
		RAL.02.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset	RAL.02.02.08.01 Pengelolaan Barang/Jasa di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.02.02.08.01.01 Pengelolaan Barang Milik Negara di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.02.02.08.01.01.01	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara
			RAL.02.02.08.02 Manajemen Aset di Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.02.08.02.01	Layanan Aset
			RAL.02.02.08.03 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset di Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.02.08.03.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Organisasi

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
		RAL.02.02.10 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	RAL.02.02.10.01 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran di Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.02.02.10.01.01 Monitoring dan Evaluasi	RAL.02.02.10.01.01.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi
	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.07 Perencanaan	RAL.02.03.07.01 Perencanaan Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.03.07.01.01	Layanan Perencanaan Organisasi
	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	RAL.02.04.01.01 Manajemen Reformasi Birokrasi	RAL.02.04.01.01.01 Manajemen Reformasi Birokrasi Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.02.04.01.01.01.01	Layanan Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) BSN
		RAL.02.04.03 Manajemen Asn	RAL.02.04.03.01 Manajemen Asn di	RAL.02.04.03.01.01 Kepegawaian Organisasi	RAL.02.04.03.01.01.01	Layanan Kepegawaian Organisasi

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
			Bidang Pengelolaan Standar Nasional	RAL.02.04.03.01.02 Kinerja Pegawai	RAL.02.04.03.01.02.01	Layanan Kinerja Pegawai
				RAL.02.04.03.01.03 Pengembangan Karir Pegawai	RAL.02.04.03.01.03.01	Layanan Pengembangan Karir
	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL.02.05.06 Pembinaan Arsip Dinamis	RAL.02.05.06.01 Pembinaan Arsip Dinamis di Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.05.06.01.01	Layanan Kearsipan Organisasi
	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL.02.06.06 Dukungan Substantif Organisasi	RAL.02.06.06.01 Dukungan Informasi Manajemen	RAL.02.06.06.01.01 Manajemen Terintegrasi	RAL02.06.06.01.01.01	Layanan Sistem Manajemen Terintegrasi

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
					RAL02.06.06.01.01.02	Layanan Integrasi Manajemen
	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL.02.07.01 Pembinaan Kegiatan Pengawasan	RAL.02.07.01.01 Pengawasan Internal Pemerintah		RAL.02.07.01.01.01	Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah
		RAL.02.07.02 Pengawasan Kinerja	RAL.02.07.02.01 Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.07.02.01.01	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL.02.08.03 Pembinaan Organisasi	RAL.02.08.03.01 Pembinaan Organisasi di Bidang Pengelolaan Standar Nasional		RAL.02.08.03.01.01	Layanan Organisasi dan Tata Laksana

RAL Tingkat 1 (Domain Layanan)	RAL Tingkat 2 (Area Layanan)	RAL Tingkat 3 (Kategori Layanan)	RAL Tingkat 4 (Sub- Kategori Layanan)	RAL Tingkat 5	Kode	Nama Layanan
	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL.02.09.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	RAL.02.09.01.01 Infrastruktur dan Keamanan Tik		RAL.02.09.01.01.01	Layanan Infrastruktur dan Keamanan TIK
		RAL.02.09.02 Penyelenggaraan Informatika	RAL.02.09.02.01 Tata Kelola Tik		RAL.02.09.02.01.01	Layanan Tata kelola TIK
		RAL.02.09.03 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL.02.09.04.01 Pengelolaan Aplikasi dan Data		RAL.02.09.04.01.01	Layanan Aplikasi dan Data
			RAL.02.09.04.02 Konsultasi Tik		RAL02.09.04.02.01	Layanan Konsultasi Program
			RAL.02.09.04.03 Pengaduan dan Permintaan Terkait It		RAL02.09.04.03.01	Layanan pengaduan dan permintaan terkait TI

Pembangunan Nasional, RAL.02.05 Kesekretariatan Negara, dan RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola yang masing-masing memiliki 1 Layanan.

3. Metadata Arsitektur Layanan

Metadata arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Standardisasi Nasional mencakup beberapa informasi penting yang membantu dalam pengelolaan dan pengoperasian layanan tersebut. Pertama, ID Metadata merupakan identifikasi unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap layanan secara spesifik dalam SPBE. ID Metadata ini berguna dalam pelacakan dan penelusuran informasi terkait layanan yang spesifik. Kedua, Nama Layanan merujuk pada nama yang diberikan kepada layanan tertentu dalam SPBE. Nama Layanan ini mencerminkan tujuan dan fungsi utama layanan tersebut. Misalnya, "Pendaftaran Pajak Online" atau "Permohonan Izin Usaha". Ketiga, Tujuan Layanan menjelaskan mengapa layanan tersebut disediakan dalam SPBE. Tujuan ini mungkin termasuk peningkatan efisiensi, mempercepat proses, meningkatkan kualitas layanan, atau menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Misalnya, tujuan layanan "Pendaftaran Pajak Online" mungkin untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pendaftaran dan pembayaran pajak.

Selain ID Metadata, Nama Layanan, dan Tujuan Layanan, metadata arsitektur layanan SPBE juga mencakup informasi lain seperti Unit Pelaksana yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan, Kementerian atau Lembaga terkait yang terlibat dalam penyediaan layanan tersebut, Urusan Pemerintahan Terkait yang tercakup dalam layanan, Target Layanan yang menjelaskan siapa yang dapat menggunakan layanan dan dalam konteks apa, serta Metode Layanan yang menggambarkan bagaimana layanan tersebut dapat diakses dan digunakan oleh pengguna.

Tabel 3.4 Metadata Arsitektur Layanan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
BSN-DAL.01.05.05.02.01	Layanan Akreditasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan proses akreditasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh stakeholder terkait	G2B
BSN-DAL.01.05.05.03.01	Layanan Pengembangan Kebijakan SNI	Layanan bertujuan untuk menghasilkan proses pengembangan kebijakan SNI yang efektif, efisien, dan akuntabel	Direktorat di Deputi Bidang Pengembangan Standar	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN-DAL.01.05.05.04.01	Layanan Pengembangan SNI	Layanan bertujuan untuk menghasilkan proses	Direktorat di Deputi Bidang	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		pengembangan SNI yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pengembangan Standar				
BSN-DAL.01.05.05.05.01	Layanan Penerapan SNI	Layanan bertujuan untuk menghasilkan proses penerapan SNI yang efektif, efisien, dan akuntabel	Direktorat di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN-DAL.01.05.05.06.01	Layanan Informasi Barang SNI yang Tersertifikasi dan Proses SPPT SNI	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan proses SPPT SNI serta informasi barang SNI yang efektif, efisien, dan akuntabel	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
BSN-DAL.01.05.05.07.01	Layanan Pembelian Dokumen Standar	Layanan bertujuan untuk menghasilkan proses pembelian dokumen standar yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN-DAL.01.05.05.08.01	Layanan Kerjasama	Layanan bertujuan untuk pengelolaan kerjasama technical barrier kepada WTO yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh stakeholder terkait	G2B
BSN-DAL.01.28.01.01.01	Layanan Hukum	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan layanan hukum organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
BSN- DAL.01.43.04.01.01.01	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN- DAL.01.43.04.02.01.01	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif,	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		efisien, dan akuntabel					
BSN-DAL.01.43.04.03.01.01	Layanan Informasi BSN	Layanan bertujuan untuk menyediakan portal informasi resmi BSN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN-DAL.01.43.04.04.01.01	Layanan Humas	Layanan bertujuan untuk menyediakan portal informasi resmi BSN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C
BSN-DAL.01.43.04.05.01.01	Layanan Data Terbuka	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan data	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel					
BSN-DAL.02.02.01.01.01	Layanan Program dan Keuangan	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran dan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.02.05.01.01	Layanan Penganggaran dan Keuangan Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran dan keuangan yang	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		efektif, efisien, dan akuntabel.					
BSN-DAL.02.02.08.01.01.01	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.02.08.02.01	Layanan Aset	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan aset yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.02.08.03.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan barang/jasa yang	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh unit kerja terkait pengadaan barang dan jasa BSN,	G2B

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		efektif, efisien, dan akuntabel.				stakeholder eksternal terkait lainnya	
BSN-DAL.02.02.10.01.01.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan monev yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.03.07.01.01	Layanan Perencanaan Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.04.01.01.01.01	Layanan Manajemen Reformasi	Layanan bertujuan untuk penilaian manajemen	Biro Sumber Daya Manusia,	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Publik	Seluruh masyarakat	G2C

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
	Birokrasi (RB) BSN	reformasi birokarasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Organisasi, dan Hukum				
BSN- DAL.02.04.03.01.01.01	Layanan Kepegawaian Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN- DAL.02.04.03.01.02.01	Layanan Kinerja Pegawai	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
BSN- DAL.02.04.03.01.03.01	Layanan Pengembangan Karir	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan pengembangan karir yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.05.06.01.01	Layanan Kearsipan Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN- DAL02.06.06.01.01.01	Layanan Sistem Manajemen Terintegrasi	Layanan bertujuan untuk penyediaan dokumen dan informasi sistem manajemen terintegrasi yang	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		efektif, efisien, dan akuntabel					
BSN- DAL02.06.06.01.01.02	Layanan Integrasi Manajemen	Layanan bertujuan untuk penyediaan dokumen dan informasi sistem manajemen terintegrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.07.01.01.01	Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Inspektorat	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
BSN-DAL.02.07.02.01.01	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.08.03.01.01	Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Layanan bertujuan untuk pengelolaan organisasi dan tata laksana yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.09.01.01.01	Layanan Infrastruktur dan Keamanan TIK	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan infrastruktur dan keamanan TIK yang	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		efektif, efisien, dan akuntabel.					
BSN-DAL.02.09.02.01.01	Layanan Tata Kelola TIK	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan tata kelola TIK yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL.02.09.04.01.01	Layanan Aplikasi dan Data	Layanan bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan aplikasi dan data yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E
BSN-DAL02.09.04.02.01	Layanan Konsultasi Program	Layanan bertujuan untuk pengelolaan konsultasi program	Biro Perencanaan, Keuangan,	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di	G2E

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan
		yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Umum, dan Pengadaan			lingkungan BSN	
BSN-DAL02.09.04.03.01	Layanan Pengaduan dan Permintaan terkait TI	Layanan bertujuan untuk menghasilkan proses pengaduan dan permintaan terkait TI yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Layanan Administrasi Pemerintahan	Seluruh unit kerja di lingkungan BSN	G2E

C. **Arsitektur Domain Data dan Informasi**

1. **Arsitektur Data dan Informasi**

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di BSN yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis BSN, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
- b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
- d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). BSN dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh Unit Kerja di BSN, selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap referensi arsitektur data dan informasi di BSN sesuai arahan Arsitektur SPBE Nasional. Berikut ini disajikan arsitektur data dan informasi secara terperinci yang dikelola oleh BSN

Tabel 3.5 Arsitektur Data dan Informasi BSN

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAD.02.01.05.01	Data SNI Non Adopsi	Terbuka	-Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.02	Data SNI Adopsi	Terbatas	-Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	
			RAD.02.01.05.03	Data SNI Wajib	Terbatas	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.04	Data SNI Sukarela	Terbatas	-Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi,	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	
			RAD.02.01.05.05	Data Pnps	Terbuka	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Personal, dan Ekonomi Kreatif	
			RAD.02.01.05.06	Data Jajak Pendapat Masyarakat	Terbatas	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			RAD.02.01.05.07	Data Komite Teknis	Terbuka	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.08	Data Anggota Komite Teknis	Terbatas	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal -Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi,	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Elektronik, Transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	
			RAD.02.01.05.09	Data Skema Sertifikasi Sni	Terbuka	Direktorat Sistem Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.10	Data Penerap Sertifikasi SNI Skema Produk	Terbatas	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.11	Data Penerap Sertifikasi SNI Skema Chse	Terbatas	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			RAD.02.01.05.12	Data Masa Transisi Sni	Terbuka	Direktorat Sistem Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.13	Data Lembaga Sertifikasi Terakreditasi	Terbuka	Direktorat Lembaga Akreditasi dan Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.14	Data Laboratorium Terakreditasi	Terbuka	Direktorat Akreditasi Laboratorium	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.15	Data Lembaga Inspeksi Terakreditasi	Terbuka	Direktorat Lembaga Akreditasi dan Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.16	Data Skema Akreditasi	Terbuka	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.17	Data Assesor	Tertutup	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			RAD.02.01.05.18	Data Pelanggan Layanan Kalibrasi Snsu	Tertutup	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.19	Data Layanan Kalibrasi Snsu	Terbuka	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.01.05.20	Data Peralatan Laboratorium Kalibrasi	Terbatas	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	
	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.06 Standardisasi dan Pengendalian Mutu	RAD.02.02.06.01	Data Penerap SNI Bina Umk	Tertutup	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.02.06.02	Data Pembinaan Penerapan SNI (Non LPK)	Terbatas	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.02.02.06.03	Data Pembinaan Penerapan SNI (LPK)	Terbatas	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.01.01	Data Pembina Umkm	Terbatas	Direktorat Penguatan Penerapan Spk	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang- Undangan	RAD.05.01.01.01	Data Notifikasi Regulasi Teknis Indonesia	Terbuka	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.05.01.01.02	Data Notifikasi Regulasi Teknis Negara Member Wto	Terbuka	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.08 Pendidikan Vokasi	RAD.06.01.08.01	Data Pengguna Elearning	Tertutup	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.06.01.08.02	Data Sertifikasi Pengguna Elearning	Terbatas	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi

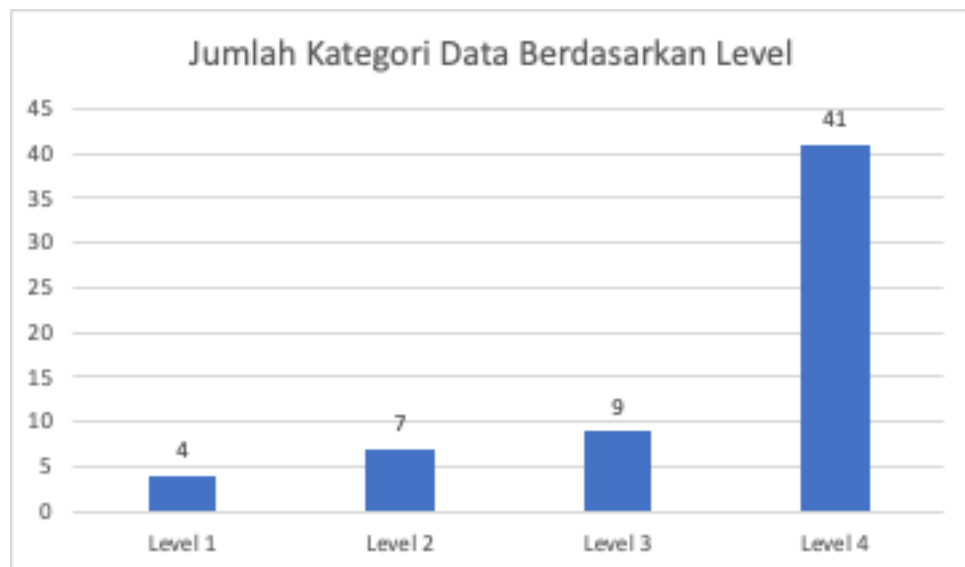
RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			RAD.06.01.08.03	Data Pengguna Layanan Diklat	Tertutup	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.06.01.08.04	Data Layanan Diklat Bsn	Terbuka	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.06.01.08.05	Data Instruktur Pelatihan Diklat	Tertutup	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
RAD.09 Informasi Pemerintah an Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.05 Penganggaran	RAD.09.02.05.01	Data Pagu Anggaran	Terbatas	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.09.02.05.02	Data Realisasi Anggaran	Terbatas	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Pusat Data dan Sistem Informasi
		RAD.09.02.08 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset	RAD.09.02.08.01	Data Aset Bmn	Terbatas	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Pusat Data dan Sistem Informasi
	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Manajemen Asn	RAD.09.06.04.01	Data Pegawai Bsn	Tertutup	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.09.06.04.02	Data Riwayat Jabatan Pegawai Bsn	Terbatas	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data dan Sistem Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	RAD Level 4	Nama Data	Sifat Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
			RAD.09.06.04.03	Data Presensi Pegawai Bsn	Terbatas	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.09.06.04.04	Data Cuti Pegawai Bsn	Terbatas	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data dan Sistem Informasi
		RAD.09.06.05 Manajemen Pelayanan Publik	RAD.09.06.05.01	Data Koleksi Perpustakaan	Terbatas	Biro Humas, Kerjasama, Dan Layanan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.09.06.05.02	Data Peminjaman Koleksi Perpustakaan	Terbatas	Biro Humas, Kerjasama, Dan Layanan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi
			RAD.09.06.05.03	Data Pengujung Layanan Informasi Bsn	Terbatas	Biro Humas, Kerjasama, Dan Layanan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi

2. Analisis Diagram Data dan Informasi

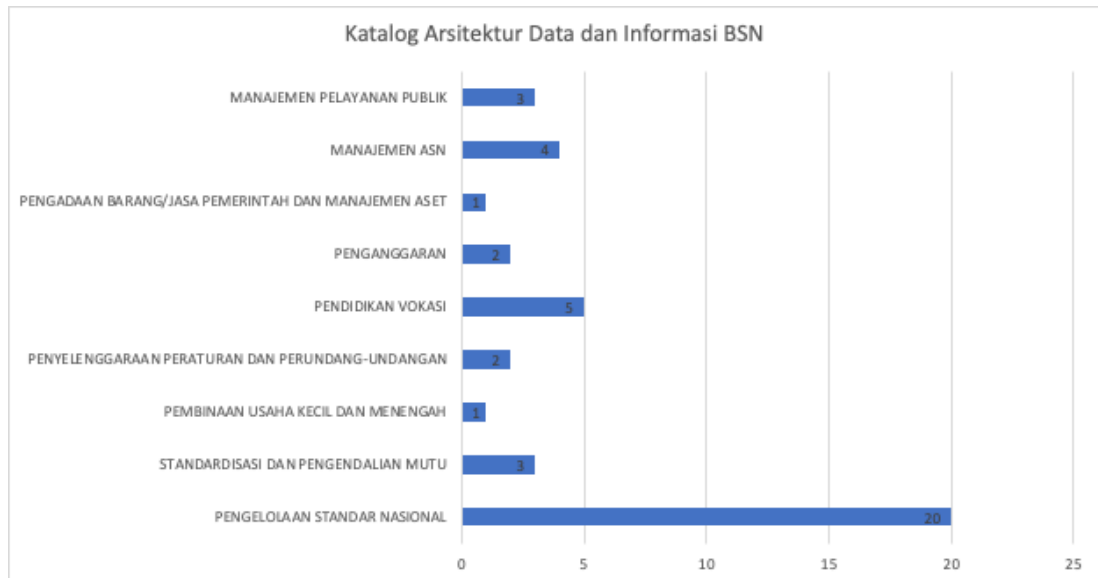
Arsitektur data dan informasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat dilihat dari 4 level arsitektur. Pada Level 1, terdapat empat kategori informasi utama yang mencakup Informasi Ekonomi dan Industri, Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan, Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja, serta Informasi Pemerintahan Umum. Kategori-kategori ini memberikan gambaran luas tentang jenis informasi yang dikelola oleh BSN. Selanjutnya, pada Level 2, terdapat pemecahan yang lebih rinci dari masing-masing kategori Level 1. Kategori-kategori tersebut mencakup Data Industri, Data Hukum, Data Pendidikan, Data Keuangan, dan Data Aparatur Negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam arsitektur data dan informasi BSN, terdapat pemecahan yang lebih terperinci berdasarkan jenis informasi yang dikelola.



Gambar 3.6 Kontribusi Data Berdasarkan Level Arsitektur

Arsitektur Data dan Informasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki total 41 data pada level terdalam dengan rincian yang beragam. Beberapa kategori data yang dapat dianalisis pada level 3 yang merupakan acuan dari total data tersebut adalah Pengelolaan Standar Nasional, Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan, Pendidikan

Vokasi, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset, Manajemen ASN, dan Manajemen Pelayanan Publik.



Gambar 3.7 Katalog Arsitektur Data dan Informasi BSN

Dalam kategori Standardisasi dan Pengendalian Mutu, terdapat 3 data yang berisi informasi tentang upaya BSN dalam memastikan standardisasi dan mengendalikan mutu secara nasional. Sementara itu, Pengelolaan Standar Nasional merupakan kategori dengan jumlah data terbanyak, yaitu 20 data. Data ini mungkin berhubungan dengan pengelolaan standar nasional yang menjadi fokus utama BSN. Standar nasional penting dalam menjamin kualitas produk dan layanan di Indonesia.

Di sisi lain, terdapat juga beberapa kategori dengan jumlah data yang lebih sedikit, seperti Penyelenggaraan Peraturan dan Perundang-undangan, Pendidikan Vokasi, Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Aset, Manajemen ASN, dan Manajemen Pelayanan Publik. Meskipun jumlah datanya lebih sedikit, tetapi data-data ini memberikan informasi penting terkait dengan aspek-aspek manajemen dan operasional BSN.

Analisis data ini menunjukkan bahwa BSN memiliki fokus yang kuat pada pengelolaan standar nasional, yang diwakili oleh jumlah data yang signifikan dalam kategori tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya peran BSN dalam menetapkan standar yang berlaku di Indonesia. Selain itu, data-data lainnya juga memberikan gambaran tentang upaya BSN dalam membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, pendidikan vokasi, pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan manajemen aset, serta manajemen ASN dan pelayanan publik. Data ini merupakan landasan yang penting bagi BSN dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang berwenang di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

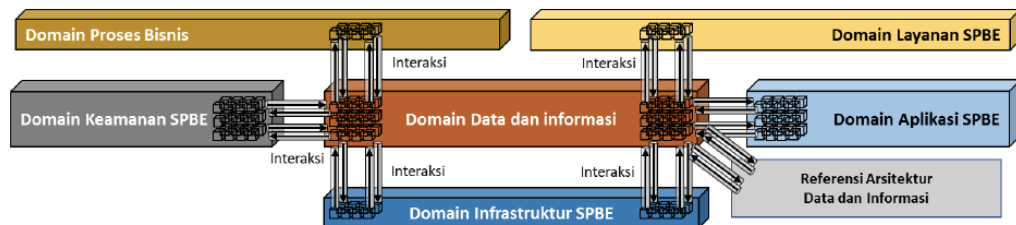
3. **Metadata Arsitektur Data dan Informasi**

Dalam konteks arsitektur data dan informasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), metadata memegang peranan penting dalam menggambarkan karakteristik dan atribut data yang ada. Metadata ini mencakup beberapa atribut seperti ID Metadata, Nama Data, Uraian Data, Tujuan Data, Jenis Data, Validitas Data, Penghasil Data/Produsen Data, Penanggung Jawab Data/Wali Data, Instansi, dan atribut lainnya.

ID Metadata adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap entitas data dalam arsitektur. Setiap data juga memiliki Nama Data yang menjelaskan identitas dan deskripsi singkat mengenai data tersebut. Uraian Data memberikan penjelasan lebih rinci tentang isi dan karakteristik data, sedangkan Tujuan Data menjelaskan tujuan penggunaan data tersebut dalam konteks BSN.

Jenis Data mencerminkan kategori atau tipe data yang dimiliki oleh BSN, seperti data ekonomi, data hukum, atau data pendidikan. Validitas Data mengindikasikan tingkat keabsahan atau keandalan data, sedangkan Penghasil Data/Produsen Data mengidentifikasi entitas atau unit yang bertanggung jawab dalam menghasilkan atau mengumpulkan data tersebut. Penanggung Jawab Data/Wali Data mencerminkan

entitas atau individu yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan data. Metadata juga mencantumkan atribut Instansi yang menunjukkan entitas atau unit terkait dengan data tersebut.



Gambar 3.8 Relasi Langsung Pada domain Data dan Informasi

Dengan metadata yang mencakup atribut-atribut ini, BSN dapat mengelola data dengan lebih baik. Metadata memfasilitasi pencarian, pemahaman, dan penggunaan data yang efisien. Atribut-atribut metadata tersebut membantu dalam menjaga konsistensi, integritas, dan keamanan data. Selain itu, metadata juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara entitas dan unit-unit di dalam BSN, serta memastikan bahwa data yang digunakan dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan di BSN dapat diandalkan dan bermanfaat.

Untuk melacak dan memantau perkembangan pembinaan penerapan SNI serta mengumpulkan informasi mengenai Pelaku Usaha Mikro Kecil yang dibina oleh BSN sesuai dengan amanah UU no 20 tahun 2014 dan juga menjadi program prioritas nasional, BSN juga menyediakan data UMK yang dibina yang terintegrasi dengan sistem informasi kementerian lain melalui OSS.

Tabel 3.6 Metadata Data dan Informasi di BSN

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.01	Data SNI Non Adopsi	Data Standar Nasional Indonesia yang di kembangkan secara mandiri dan menjadikan standar internasional lainnya hanya sebagai acuan/referensi	Data digunakan untuk pembinaan, penerapan, dan proses sertifikasi SNI	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.02	Data SNI Adopsi	Data Standar Nasional Indonesia yang di kembangkan berdasarkan standar internasional dengan mengambil keseluruhan I isi yang ada pada dokumen standar intrtnasional tersebut	Data digunakan untuk pembinaan, penerapan, dan proses sertifikasi SNI	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						-Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.03	Data SNI Wajib	Data Standar Nasional Indonesia yang bersifat wajib dilakukan sertifikasi dikarenakan adanya regulasi teknis dari K/L	Data digunakan sebagai acuan produk, proses, jasa yang bersifat wajib untuk	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika,	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			dilakukan sertifikasi			energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.04	Data SNI Sukarela	Data Standar Nasional Indonesia yang bersifat sukarela untuk di lakukan	Data digunakan sebagai acuan produk, proses, jasa yang	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
		Penerapan dan sertifikasi	bersifat sukarela untuk dilakukan sertifikasi			-Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.05	Data PNPS	Data Usulan Perumusan SNI yang sudah di tetapkan oleh kepala BSN	Data PNPS di gunakan sebagai acuan atau data awal untuk proses perumusan	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.06	Data Jajak Pendapat Masyarakat	Data Jajak pendapat Masyarakat terhadap rumusan SNI	Digunakan untuk Pengambilan Keputusan pada Tahapan Penyusunan RSNI	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.07	Data Komite Teknis	Data yang berisi daftar komite teknis sebagai perumus standar beserta sekretariatnya	Digunakan Sebagai data untuk melakukan proses perumusan RSNI menjadi SNI	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.08	Data Anggota Komite Teknis	Data profile Anggota Komite teknis perumusan standar	Digunakan sebagai data pihak-pihak yang melakukan proses perumusan SNI	Data Sektoral	2022	-Direktotat Pengembangan Standar Agro, Kimia, kesehatan, dan Halal -Direktorat pengembangan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						standar mekanika, energi, elektronik, transportasi, dan Teknologi Informasi -Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif		
BSN-DAD-02.01.05.09	Data Skema Sertifikasi SNI	Data skema sertifikasi atau petunjuk teknis untuk proses sertifikasi	Data yang digunakan oleh pelaku usaha dan lembaga	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			penilaian kesesuaian dalam proses penerapan dan sertifikasi SNI			penilaian Kesesuaian		
BSN-DAD-02.01.05.10	Data Penerap sertifikasi SNI skema produk	Data para pelaku usaha yang menerapkan SNI produk dan sudah melakukan sertifikasi produk dan memohon sppt sni ke bsn untuk sni sukarela dan sni wajib dari kementrian teknis	Data yang menunjukkan jumlah dan profile penerap SNI Produk di Indonesia	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.11	Data Penerap sertifikasi SNI skema CHSE	Data para pelaku usaha yang menerapkan SNI CHSE dan sudah melakukan sertifikasi produk dan memohon sppt sni ke bsn untuk sni sukarela dan sni wajib dari kementerian teknis	Data yang menunjukkan jumlah dan profile penerap SNI CHSE di Indonesia	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-02.01.05.12	Data Masa Transisi SNI	Data SNI yang akan di ganti oleh SNI Baru akan masuk fase masa transisi untuk	Data yang digunakan oleh pelaku usaha dan lembaga penilaian	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
		masa berlaku standar tersebut	kesesuaian terkait masa berlaku SNI yang telah dilakukan revisi					
BSN-DAD-02.01.05.13	Data Lembaga Sertifikasi Terkreditasi	Data Lembaga Sertifikasi untuk keseluruhan skema yang telah di akreditasi	Memudahkan masyarakat dalam mencari lembaga sertifikasi yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup serta jarak dan lokasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Lembaga Akreditasi dan Lembaga Inspeksi dan lembaga Sertifikasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.14	Data Laboratorium Terakreditasi	Data Laboratorium untuk keseluruhan skema, baik laboratorium uji, kalibrasi, dan lain -lain yang telah di akreditasi	Memudahkan pelaku usaha dan LPK dalam mencari laboratorium yang diakreditasi KAN yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup serta jarak dan lokasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Akreditasi Laboratorium	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.15	Data Lembaga Inspeksi Terakreditasi	Data yang mencakup daftar dan profil lengkap dari lembaga-lembaga inspeksi yang telah melewati proses akreditasi dan memenuhi standar kompetensi serta integritas yang diperlukan untuk melakukan kegiatan inspeksi dengan tingkat keandalan dan kualitas yang tinggi	Memudahkan pelaku usaha dan LPK dalam mencari lembaga inspeksi yang diakreditasi KAN yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup serta jarak dan lokasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Lembaga Akreditasi dan Lembaga Inspeksi dan lembaga Sertifikasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.16	Data Skema Akreditasi	Berisikan Data Skema Akreditasi apa saja yang dimiliki oleh BSN	Menjadi acuan pelaku usaha dan LPK dalam kegiatan akreditasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-02.01.05.17	Data Assesor	Data profil pribadi assesor dibawah naungan komite akreditasi nasional	Digunakan oleh sekretariat KAN dalam menentukan assesor yang tepat dan sesuai untuk kegiatan proses akreditasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-02.01.05.18	Data Pelanggan Layanan Kalibrasi SNSU	Berisikan Data pengguna layanan Kalibrasi SNSU	Data yang digunakan oleh Dit SNSU dalam mengelola pelanggan	Data Sektoral	2022	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-02.01.05.19	Data Layanan Kalibrasi SNSU	Daftar Katalog Layanan Kalibrasi SNSU berdasarkan ruang lingkup seperti panjang, suhu, suara, dan lainnya	Data yang dipakai oleh pelanggan dalam layanan kalibrasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
						Termoelektrik dan Kimia		
BSN-DAD-02.01.05.20	Data Peralatan Laboratorium Kalibrasi	Data Peralatan yang di miliki laboratorium Kalibrasi SNSU untuk memproses layanan kalibrasi untuk keseluruhan ruang lingkup	Data yang dipakai untuk pemetaan ketersediaan peralatan laboratorium kalibrasi	Data Sektoral	2022	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-02.02.06.01	Data Penerap SNI Bina UMK	Data Pelaku Usaha Mikro Kecil yang di bina oleh BSN berdasarkan aturan	Data digunakan untuk melacak dan memantau	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
		berserta progress pembinaannya	perkembangan pembinaan serta mengumpulkan informasi mengenai pelaku Usaha Mikro Kecil yang dibina oleh BSN sesuai dengan aturan yang berlaku.			Penilaian Kesesuaian		
BSN-DAD-02.02.06.02	Data Pembinaan	Data Pelaku Usaha yang di bina oleh BSN	Data digunakan untuk	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan Standar	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
	penerapan SNI (non lpk)	berserta progress pembinaannya	memonitor dan mengelola perkembangan pembinaan Pelaku Usaha yang dibina oleh BSN.			dan Penilaian Kesesuaian		
BSN-DAD-02.02.06.03	Data Pembinaan penerapan SNI (lpk)	Data LPK yang di bina oleh BSN berserta progress pembinaannya	Data digunakan untuk memonitor dan mengelola perkembangan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			yang dibina oleh BSN.					
BSN-DAD-02.10.01.01	Data Pembina UMKM	Data yang mencakup profil dan rekam jejak pembina atau pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang meliputi informasi mengenai kegiatan pembinaan, program-program yang diselenggarakan, serta hasil dan dampak dari dukungan yang	Data yang digunakan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai pembina atau pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna	Data Sektoral	2022	Direktorat Penguatan Penerapan SPK	Pusat Data dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
		diberikan kepada UMKM.	memfasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program pembinaan UMKM serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari upaya pembinaan					

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			yang dilakukan.					
BSN-DAD-05.01.01.01	Data Notifikasi Regulasi Teknis Indonesia	Data regulasi dari kementerian/lembaga terhadap impor produk kepada negara member WTO	Data yang digunakan oleh negara lain terkait persyaratan regulasi teknis dalam perdagangan produk di Indonesia	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-05.01.01.02	Data Notifikasi Regulasi Teknis Negara member WTO	Data regulasi dari negara-negara member WTO terhadap indonesia	Data yang digunakan oleh pelaku usaha dan	Data Sektoral	2022	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
		yang akan di ekspor kepada negara-negara luar member WTO	pemerintah terkait persyaratan regulasi teknis dalam perdagangan produk ke negara tujuan ekspor					
BSN-DAD-06.01.08.01	Data Pengguna Elearning	Data Para pengguna elearning yang sudah melakukan registrasi/ Mendaftar pada apalikasi elearning bsn	Data digunakan oleh Pusbang SDM BSN dalam mengelola pelanggan Diklat	Data Sektoral	2022	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-06.01.08.02	Data Sertifikasi pengguna Elearning	Data Sertifikat bagi para pengguna layanan yang lulus ujian	Data digunakan oleh Pusbang SDM BSN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat	Data Sektoral	2022	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-06.01.08.03	Data Pengguna Layanan Diklat	Data user akun pada aplikasi diklat	Data digunakan oleh Pusbang SDM BSN dalam mengelola pelanggan Diklat	Data Sektoral	2022	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-06.01.08.04	Data Layanan Diklat BSN	Merupakan data katalog layanan pelatihan dari Pusbang BSN	Data yang digunakan oleh stakeholder untuk keikutsertaan dalam Diklat	Data Sektoral	2022	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-06.01.08.05	Data Instruktur Pelatihan Diklat	Data instruktur untuk kegiatan pelatihan di layanan diklat BSN	Data digunakan oleh Pusbang SDM BSN dalam mengelola pelanggan Diklat	Data Sektoral	2022	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-09.02.05.01	Data Pagu Anggaran	Data Pagu anggaran tiap unit kerja yang ada di BSN yang sudah di tetapkan dan tercatat di kementerian Keuangan	Digunakan Sebagai acuan saldo awal pada	Data Sektoral	2022	Biro Perencanaan, Keuangan, umum, dan Pengadaan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-09.02.05.02	Data Realisasi Anggaran	Berisikan data realisasi usulan anggaran/kegiatan yang sudah sp2d	Data yang digunakan dalam montitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis APBN	Data Sektoral	2022	Biro Perencanaan, Keuangan, umum, dan Pengadaan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
BSN-DAD-09.02.08.01	Data Aset BMN	Data Aset Barang Milik Negara yang tercatat di Kementerian keuangan	Digunakan sebagai daftar aset BSN untuk di gunakan keperluan kedinasan serta dapat di pinjam untuk keperluan kedinasan	Data Sektoral	2022	Biro Perencanaan, Keuangan, umum, dan Pengadaan	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-09.06.04.01	Data Pegawai BSN	Data pribadi Pegawai BSN Seperti nama, alamat, notelepon, dll	Digunakan Sebagai basis data utama pada setiap	Data Sektoral	2022	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			bisnis proses yang ada					
BSN-DAD-09.06.04.02	Data Riwayat Jabatan Pegawai BSN	Data histori jabatan pegawai berdasarkan SK dimulai dari SK cpns hingga SK terkini	Digunakan Sebagai referensi untuk mutasi, promosi, dan lainnya	Data Sektoral	2022	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-09.06.04.03	Data Presensi Pegawai BSN	Merupakan data kehadiran/presensi pegawai BSN setiap harinya	Digunakan untuk memproses hukuman disiplin dan, Perhitungan uang makan Pehitungan	Data Sektoral	2022	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			Tunjangan Kinerja					
BSN-DAD-09.06.04.04	Data Cuti Pegawai BSN	Data saldo cuti pegawai dan historical cuti pegawai BSN setiap tahunnya	Digunakan Sebagai dasar perhitungan Uang makan dan Proses lainnya	Data Sektoral	2022	Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-09.06.05.01	Data Koleksi Perpustakaan	Data koleksi perpustakaan baik berupa buku, majalah serta baik berupa efile maupun tercetak	Data digunakan oleh Bagian Layanan Informasi dalam peminjaman	Data Sektoral	2022	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

ID Metadata	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Instansi
			koleksi perpustakaan					
BSN-DAD-09.06.05.02	Data Peminjaman Koleksi Perpustakaan	Data Peminjaman Koleksi Perpustakaan BSN baik data peminjaman, pengembalian serta denda	Data digunakan oleh Layanan Informasi dalam mengelola pelanggan	Data Sektoral	2022	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional
BSN-DAD-09.06.05.03	Data Pengunjung Layanan Informasi BSN	Data Pengunjung layanan informasi BSN baik secara fisik hadir, melalui email, maupun melalui Telepon	Data digunakan oleh Layanan Informasi dalam mengelola pelanggan	Data Sektoral	2022	Biro Humas, Kerjasama, dan Layanan Informasi	Pusat Data Dan Sistem Informasi	Badan Standardisasi Nasional

D. **Arsitektur Domain Aplikasi**

1. **Arsitektur Aplikasi**

Arsitektur Aplikasi SPBE merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur Aplikasi SPBE menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE dapat disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan *delivery*/prosesnya.

Arsitektur Aplikasi SPBE di BSN diharapkan mampu mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, Pasal 1 ayat 21).

Analisis kondisi aplikasi saat ini dilakukan dengan menyusun arsitektur aplikasi SPBE untuk memetakan sejauh mana transformasi digital telah dilakukan oleh BSN dalam menjalankan layanan yang dimilikinya. Hasil dari arsitektur aplikasi SPBE ini dijadikan acuan dalam menyusun kebutuhan pengembangan aplikasi di BSN. Berikut ini disajikan arsitektur aplikasi SPBE di lingkungan BSN.

Tabel 3.7 Arsitektur Aplikasi BSN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.01	JDIH BSN	Layanan Dukungan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Standardisasi Nasional	Informasi produk hukum	Biro SDMOH	BSN
		RAA.01.01.02	Website KAN	Layanan informasi publik	Informasi akreditasi	Direktorat di Dep Akreditasi	BSN
	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.01	Simpeg	Layanan kepegawaian	Informasi kepegawaian dan kinerja	Biro SDMOH	BSN
		RAA.01.02.02	RB BSN	Layanan RB	Informasi reformasi birokrasi	Biro SDMOH	BSN
		RAA.01.02.03	PMRB BSN	Layanan RB	Informasi reformasi birokrasi	Biro SDMOH	BSN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
		RAA.01.02.04	Srikandi	Layanan persuratan	Naskah dinas elektronik	Eksternal (ANRI)	BSN
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	RAA.02.01.01	Diklat BSN	Layanan diklat	Sertifikat diklat	Pusbang SDM	BSN
		RAA.02.01.02	KANMIS	Layanan akreditasi	Layanan akreditasi	Direktorat di Dep Akreditasi	BSN
		RAA.02.01.03	SISPK BSN	Layanan informasi publik	SNI	Direktorat Pengembangan Standar	BSN
		RAA.02.01.04	Sipakar	Layanan penganggaran	Laporan anggaran	Biro PKUP	BSN
		RAA.02.01.05	TBT WTO	Layanan informasi publik	Notifikasi dan regulasi	Direktorat SPSPK	BSN
		RAA.02.01.06	IIN BSN	Layanan penerbitan IIN	IIN	Biro HKLI	BSN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
		RAA.02.01.07	Sijamas	Layanan kerjasama	Laporan kerjasama	Direktorat HKLI	BSN
		RAA.02.01.08	SPARTA	Layanan kalibrasi	Sertifikat kalibrasi	Direktorat di Dep SNSU	BSN
		RAA.02.01.09	Jam Atom	Layanan jam atom	Jam standar Indonesia	Direktorat SNSU TK	BSN
		RAA.02.01.10	Silat	Layanan pemeliharaan aset	Laporan aset	Biro PKUP	BSN
		RAA.02.01.11	Sipatlha	Layanan penyusunan laporan	Laporan audit	Inspektorat	BSN
		RAA.02.01.12	Pembimbingan SNI	Layanan pembimbingan SNI	Pembimbingan UMKM	Direktorat PPSPK	BSN
		RAA.02.01.13	DW BSN	Layanan Internal BSN	Data statistik tentang Standar dan Penilaian Kesesuaian	BSN	BSN

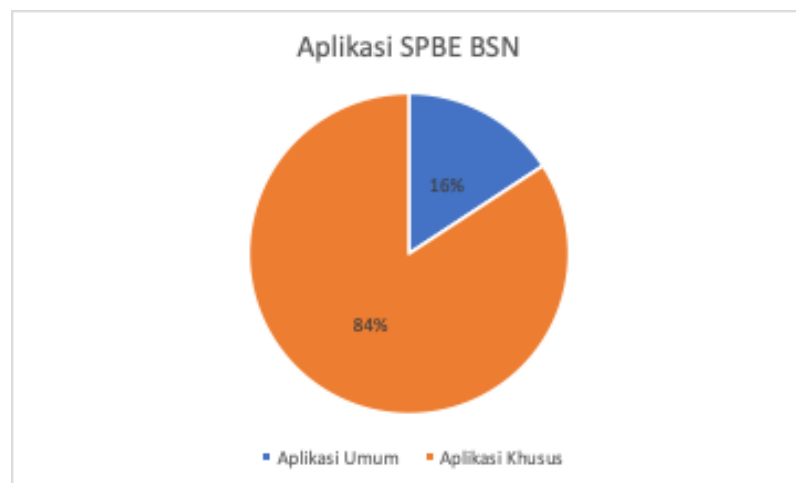
RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
		RAA.02.01.14	Peta LPK	Layanan Informasi SPK	Data sebaran LPK	Direktorat di Dep Akreditasi	BSN
		RAA.02.01.15	e-komtek	Layanan Informasi SPK	RSNI	Direktorat Pengembangan Standar	BSN
		RAA.02.01.16	WBS	Layanan Pengaduan	Laporan pengaduan	Inspektorat	BSN
		RAA.02.01.17	Bina UMK	Layanan Pelatihan	Laporan data Bina UMK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Panilaian Kesesuaian	BSN
	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	RAA.02.02.01	e-Learning BSN	Layanan Pelatihan	Sertifikat diklat	Pusat Pengembangan SPK	BSN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
		RAA.02.02.02	Website BSN	Layanan Informasi BSN	Berita, Pengumuman dan Peraturan BSN	BSN	BSN
		RAA.02.02.03	Perpustakaan Digital BSN	Layanan Internal BSN	Laporan data pengguna perpustakaan	HKLI	BSN
		RAA.02.02.04	Bangbeni	Layanan Internal BSN	Data produk yang bertanda SNI	Direktorat SPSPK	BSN
		RAA.02.02.05	Intranet	Layanan Internal BSN	Informasi, Berita dan Pengumuman	BSN	BSN
		RAA.02.02.06	Pesta BSN	Layanan Informasi SPK	Laporan pembelian dokumen SNI	Biro HKLI	BSN
		RAA.02.02.07	Akses SNI BSN	Layanan Informasi SPK	Laporan data statistik pembaca SNI	BSN	BSN
		RAA.02.02.08	e-SMKI	Layanan Internal BSN	Dokumen SMKI	BSN	BSN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	RAA Tingkat 3	Nama Aplikasi	Layanan Yang Didukung	Luaran Aplikasi	Unit Operasional Teknologi	Instansi
		RAA.02.02.09	ePerformance	Layanan Internal BSN	Laporan pencapaian kinerja BSN	Biro PKUP	BSN
		RAA.02.02.10	eTap BSN	Layanan Internal BSN	Peraturan BSN	Biro SDMOH	BSN
		RAA.02.02.11	Hadir BSN	Layanan Internal BSN	Laporan data kehadiran pegawai	BSN	BSN
		RAA.02.02.12	Dahara	Layanan Internal BSN	Laporan data kehadiran rapat	BSN	BSN
		RAA.02.02.13	Lips	Layanan Internal BSN	Laporan permintaan dokumen SNI	Biro HKLI	BSN
		RAA.02.02.14	eticketing	Layanan Internal BSN	Laporan permintaan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi	BSN	BSN
		RAA.02.02.15	Simasadi	Layanan administrasi	Laporan pelaporan penggantian uang yang diterima asesor setelah asesment	Direktorat di Dep Akreditasi	BSN

2. Analisis Diagram Aplikasi SPBE

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki total 38 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari jumlah tersebut, terdapat 6 aplikasi yang merupakan aplikasi umum (13%) dan 32 aplikasi lainnya merupakan aplikasi khusus (84%).

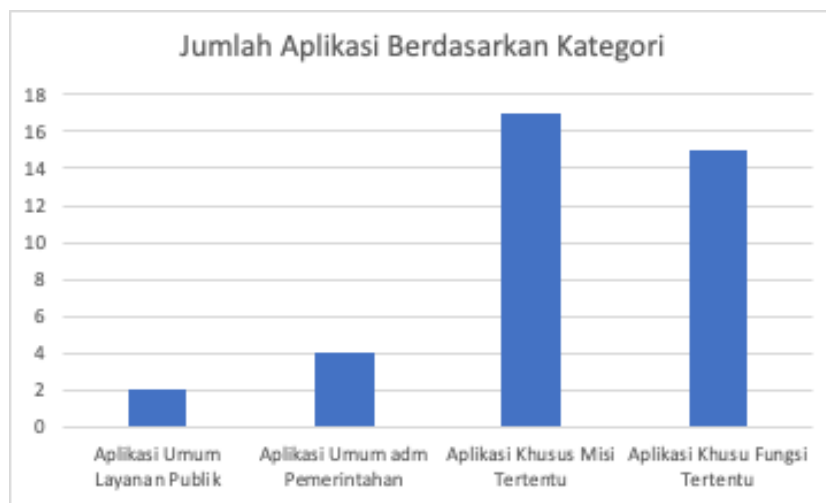


Gambar 3.9 Aplikasi SPBE BSN

Dalam kategori aplikasi umum, terdapat 2 aplikasi yang digunakan untuk layanan publik karena memberikan aksesibilitas publik terhadap informasi yang berkaitan dengan layanan standardisasi nasional. Selain itu, terdapat juga 4 aplikasi umum yang digunakan untuk administrasi pemerintahan. Aplikasi ini dapat membantu BSN dalam mengelola data dan menjalankan proses administrasi internal.

Sementara itu, aplikasi khusus merupakan mayoritas dari total aplikasi SPBE BSN. Dari 32 aplikasi khusus, 17 aplikasi digunakan untuk misi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa BSN memiliki kebutuhan khusus dalam menjalankan tugas-tugas yang unik dan tidak umum dalam layanan di bidang Standardisasi nasional. Selain itu, terdapat juga 15 aplikasi khusus yang berfokus pada fungsi tertentu, seperti pengolahan data, analisis, atau penelitian.

Aplikasi khusus ini dapat membantu BSN dalam melaksanakan tugas-tugas yang spesifik dan penting dalam mendukung fungsi dan misi organisasi.



Gambar 3.10 Aplikasi SPBE BSN Berdasarkan Kategori

Dari analisis data ini, dapat disimpulkan bahwa BSN memiliki perhatian yang signifikan terhadap pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Proporsi aplikasi khusus yang lebih besar menunjukkan bahwa BSN memerlukan solusi yang spesifik dan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi umum lebih berfokus pada pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, sementara aplikasi khusus memberikan dukungan yang lebih spesifik dalam menjalankan misi dan fungsi BSN sebagai lembaga pemerintah yang menangani kegiatan standardisasi nasional.

3. Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE

Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE meliputi informasi penting yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang aplikasi tersebut. Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE terdiri dari beberapa atribut utama seperti ID Metadata, Nama Aplikasi, Uraian Fungsi, Layanan Yang Didukung, Basis Aplikasi, Komputasi Awan, Tipe Lisensi Aplikasi, Unit

Pengembang, Unit Operasional Teknologi, instansi dan beberapa atribut lainnya.

ID Metadata merupakan identifikasi unik untuk setiap aplikasi SPBE. Hal ini digunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi aplikasi secara khusus. Nama Aplikasi adalah nama yang diberikan kepada aplikasi SPBE yang memberikan informasi tentang tujuan atau fungsi utama dari aplikasi tersebut. Uraian Fungsi menggambarkan secara rinci fungsi dan tujuan dari aplikasi SPBE. Informasi ini meliputi penggunaan aplikasi, fitur-fitur yang disediakan, dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi tersebut. Layanan Yang Didukung merujuk pada jenis layanan atau kegiatan yang dapat diakses atau dilayani melalui aplikasi SPBE.

Basis Aplikasi mengacu pada platform atau teknologi yang digunakan dalam mengembangkan dan menjalankan aplikasi SPBE. Komputasi Awan menunjukkan apakah aplikasi tersebut menggunakan infrastruktur komputasi awan untuk penyimpanan dan pengolahan data. Sedangkan Tipe Lisensi Aplikasi merujuk pada jenis lisensi atau perjanjian penggunaan yang berlaku untuk aplikasi tersebut. Unit Pengembang adalah unit atau tim yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPBE. Unit Operasional Teknologi adalah unit atau tim yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi.

Dengan metadata arsitektur aplikasi SPBE yang mencakup informasi seperti ID Metadata, Nama Aplikasi, Uraian Fungsi, Layanan Yang Didukung, Basis Aplikasi, Komputasi Awan, Tipe Lisensi Aplikasi, Unit Pengembang, Unit Operasional Teknologi, dan Instansi, pengguna atau pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi tersebut. Metadata ini memberikan panduan yang komprehensif tentang karakteristik dan konteks aplikasi SPBE yang diperlukan untuk pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang efektif.

Tabel 3.8 Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE BSN

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
BSN-DAA-01.01.01	JDIH BSN	JDIH BSN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Memberikan informasi terkait dokumen hukum di lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Layanan Dukungan Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Standardisasi Nasional	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro SDMOH
BSN-DAA-01.01.02	Website KAN	Website utama Komite Akreditasi Nasional	Sebagai website resmi Komite	Layanan informasi public di bidang	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat di Dep Akreditasi

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			Akreditasi Nasional	penilaian kesesuaian				
BSN-DAA-01.02.01	Simpeg	Aplikasi Kepegawaian BSN	Aplikasi kepegawaian BSN, terdiri dari 4 aplikasi yakni SIAP (sistem informasi administrasi pegawai), Presensi (sistem informasi kehadiran pegawai),	Layanan kepegawaian	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro SDMOH

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			Kinerja (sistem sasaran kerja pegawai) dan SMM (sistem manajemen mutu)					
BSN-DAA-01.02.02	RB BSN	Web penilaian Reformasi Birokrasi	Web penilaian Reformasi Birokrasi	Layanan RB	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro SDMOH
BSN-DAA-01.02.03	PMRB BSN	Web penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Web penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Layanan RB	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro SDMOH
BSN-DAA-01.02.04	Srikandi	Srikandi adalah aplikasi berbagi pakai tata	Sebagai sarana persuratan	Layanan persuratan	Web	Aplikasi berbagi pakai	Opensource	Eksternal (ANRI)

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
		naskah dinas elektronik milik ANRI	seluruh pegawai BSN					
BSN-DAA-02.01.01	Diklat BSN	Aplikasi Registrasi Diklat PNBPN BSN	Aplikasi pendaftaran pelatihan public training dan in-house training BSN	Layanan diklat	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Pusbang SDM
BSN-DAA-02.01.02	KANMIS	Aplikasi sistem informasi KAN	Aplikasi terkait proses akreditasi dan penilaian kesesuaian	Layanan proses akreditasi	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat di Dep Akreditasi

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
BSN-DAA-02.01.03	SISPK BSN	Aplikasi sistem informasi SPK	Aplikasi terkait proses pengembangan SNI dan juga pencarian SNI	Layanan informasi public terkait SNI	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat di Dep Pengembangan Standar
BSN-DAA-02.01.04	Sipakar	Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	Aplikasi internal terkait kebutuhan anggaran beserta satuan pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan yang telah disetujui oleh	Layanan penganggaran	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro PKUP

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			pimpinan unit kerja terkait					
BSN-DAA-02.01.05	TBT WTO	Web site resmi pengelolaan Technical Barrier To Trade World Trade Organization	Web site resmi pengelolaan Technical Barrier To Trade World Trade Organization	Layanan informasi publik	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat SPSPK
BSN-DAA-02.01.06	IIN BSN	Aplikasi Penerbitan dan Pengawasan IIN	Aplikasi BSN terkait PNBPNomor IIN baik untuk penerbitan	Layanan penerbitan IIN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro HKLI

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			maupun pengawasan nomor IIN					
BSN-DAA-02.01.07	Sijamas	Sijamas adalah aplikasi kerjasama BSN	Aplikasi internal BSN yang merupakan kumpulan dokumentasi segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BSN baik dengan pihak di luar maupun dalam	Layanan kerjasama	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro HKLI

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			negeri, dimana hasilnya disinergikan dengan aplikasi kerjasama yang dimiliki oleh kemenristek					
BSN-DAA-02.01.08	SPARTA	Aplikasi layanan Kalibrasi	Menyediakan layanan kalibrasi bagi SNSU	Layanan kalibrasi	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat di Dep SNSU
BSN-DAA-02.01.09	Jam Atom	NTP jam atom Indonesia	Domain resmi acuan jam standar	Layanan jam atom	NTP (Network)	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat SNSUTK

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			nasional indonesia		Time Protocol)			
BSN-DAA-02.01.10	Silat	Aplikasi Sistem Informasi Layanan Terpadu	Aplikasi internal BSN terkait pelaksanaan kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum terkait Pemeliharaan Aset, Pengajuan PDLN, jadwal pimpinan, BMN,	Layanan pemeliharaan aset	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Biro PKUP

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			Peminjaman Aset, Layanan Pengadaan dan Pengajuan Sarpras.					
BSN-DAA-02.01.11	Sipattha	Sipattha adalah aplikasi penyusunan laporan tahunan BSN	Aplikasi penyusunan laporan tahunan BSN	Layanan penyusunan laporan	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Inspektorat
BSN-DAA-02.01.12	Pembimbingan SNI	Pembimbingan SNI adalah aplikasi layanan bimbingan penerapan SNI bagi UKM/Organisasi	Aplikasi yang ditujukan bagi UMKM yang hendak melakukan pembimbingan penerapan SNI	Layanan pembimbingan SNI	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat PPSPK

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
BSN-DAA-02.01.13	DW BSN	Aplikasi Dashboard Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah aplikasi menyajikan data dan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pegawai BSN secara tepat waktu (real time)	Menampilkan data statistik tentang Statistik SNI, Statistik LPK, Statistik Produk bertanda SNI dan lain sebagainya	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.01.14	Peta LPK	aplikasi sistem informasi geografis yang menampilkan lokasi Lembaga penilaian kesesuaian	Menampilkan peta sebaran dan data LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	Layanan Informasi SPK	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Direktorat di Dep Akreditasi

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
BSN-DAA-02.01.15	e-komtek	Aplikasi pengembangan SNI lingkup pembahasan SNI oleh Komite Teknis secara online	Memberikan layanan untuk pembahasan SNI oleh Komite Teknis secara online	Layanan Informasi SPK	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Direktorat di Dep Pengembangan Standar
BSN-DAA-02.01.16	WBS	WBS atau Whistleblowing System adalah Aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pelaporan dan pengungkapan pelanggaran, kecurangan, atau perilaku tidak etis di	Untuk memfasilitasi pelaporan dan pengungkapan pelanggaran, kecurangan, atau perilaku tidak etis di dalam instansi Badan	Layanan Pelaporan pelanggaran	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Inspektorat

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
		dalam instansi Badan Standardisasi Nasional	Standardisasi Nasional					
BSN-DAA-02.01.17	SNI Bina UMK	SNI Bina UMK adalah Aplikasi yang menyediakan layanan untuk memberikan pembinaan kepada UMK dalam penerapan SNI	Memberikan pembinaan untuk UMK dalam penerapan SNI untuk risiko rendah yang terintegrasi dengan OSS	Layanan Pembinaan penerapan SNI	Web	Server Cloud	Open Source	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
BSN-DAA-02.02.01	e-Learning BSN	Aplikasi pembelajaran online mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian	Memberikan pembelajaran secara online tentang standardisasi	Layanan Pendidikan dan Pelatihan di bidang SPK	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Pusat Pengembangan SPK

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			dan penilaian kesesuaian serta memberikan sertifikat bagi peserta yang mengikuti pembelajaran secara online					
BSN-DAA-02.02.02	Website BSN	Website utama Badan Standardisasi Nasional	Website utama BSN yang berisi tentang profile BSN, Informasi publik, publikasi	Layanan Informasi BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			Kebijakan dan Undang-Undang, Pengumuman atau berita dan Informasi-informasi lain tentang kegiatan BSN					
BSN-DAA-02.02.03	Perpustakaan Digital BSN	Website resmi layanan perpustakaan BSN	Menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan khusus di bidang	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Biro HKLI

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			standardisasi dan penilaian kesesuaian					
BSN-DAA-02.02.04	Bangbeni	BangBeni atau Barang BerSNI adalah Aplikasi yang menyediakan layanan untuk pencarian barang yang telah bersertifikasi SNI serta memberikan layanan pengajuan SPPT SNI	Meyediakan layanan public untuk pencarian barang-barang yang sudah memiliki sertifikat SNI dan menyediakan layanan kepada pelaku usaha dalam	Layanan publik	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Direktorat SPSPK

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			pengajuan SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI)					
BSN-DAA-02.02.05	Intranet	Aplikasi yang menyediakan informasi dan komunikasi untuk internal BSN	Menyediakan layanan komunikasi internal BSN	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.02.06	Pesta BSN	Aplikasi Pesta atau Pemesanan Standar adalah aplikasi yang menyediakan layanan untuk pemesanan dokumen SNI	Menyediakan layanan untuk pemesanan atau pembelian dokumen SNI atau standar	Layanan pembelian dokumen standar	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Biro HKLI

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			lain secara online					
BSN-DAA-02.02.07	Akses SNI BSN	Akses SNI adalah Aplikasi yang menyediakan akses dokumen SNI secara online	Menyediakan layanan untuk membaca dokumen SNI secara online untuk masyarakat dan internal BSN	Layanan Informasi SPK	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.02.08	e-SMKI	Aplikasi ini adalah aplikasi sistem manajemen BSN untuk modul sistem	Mengelola sistem manajemen terkait keamanan	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
		manajemen keamanan informasi	informasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional					
BSN-DAA-02.02.09	ePerforman ce	Aplikasi pemantuan kinerja BSN	Untuk memonitoring hasil pencapaian kinerja BSN	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Biro PKUP
BSN-DAA-02.02.10	eTap BSN	Aplikasi pemantauan/monitoring penetapan peraturan BSN	Untuk memantau atau memonitoring penetapan peraturan BSN	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Biro SDMOH

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
BSN-DAA-02.02.11	Hadir BSN	Aplikasi Presensi kehadiran pegawai BSN secara online	Untuk mengelola data presensi pegawai secara online	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.02.12	Dahara	Aplikasi Dahara adalah aplikasi daftar hadir rapat secara online	Untuk mengelola data presensi rapat secara online	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.02.13	Lips	Lips atau Layanan Internal Permintaan Standard adalah aplikasi yang menyediakan layanan untuk permintaan dokumen	Untuk menyediakan layanan permintaan dokumen standar bagi	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	Biro HKLI

ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
		standar bagi internal BSN	internal BSN secara online					
BSN-DAA-02.02.14	eticketing	e-Ticketing adalah aplikasi layanan Pusat Data dan Sistem Informasi	Untuk mengelola permintaan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi secara online	Layanan Internal BSN	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Open Source	BSN
BSN-DAA-02.02.15	Simasadi	Sistem Informasi dan Administrasi Akreditasi	Pengembangan sistem kepatuhan terhadap komitmen anti	Layanan administrasi	Web	Server On-Premis (Co-Location)	Opensource	Direktorat Akreditasi

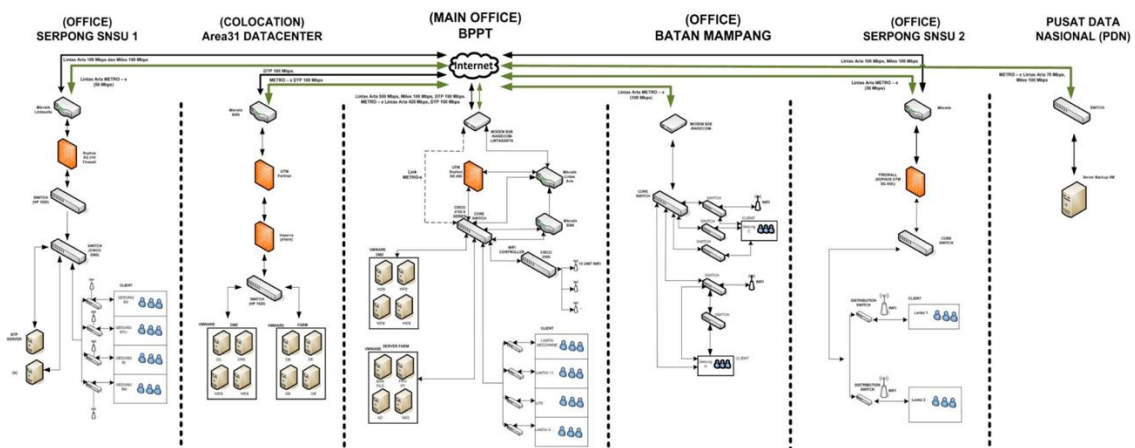
ID Metadata	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Layanan Yang Didukung	Basis Aplikasi	Komputasi Awan	Tipe Lisensi Aplikasi	Unit Operasional Teknologi
			penyuapan pada penyelenggara n pelayanan akreditasi KAN.					

E. Arsitektur Domain Infrastruktur

1. Arsitektur Infrastruktur

Dalam upaya untuk menjamin pengelolaan teknologi informasi yang mendukung dan selaras dengan bisnis model Badan Standardisasi Nasional, khususnya terkait dengan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola teknologi informasi. Arsitektur Infrastruktur Teknologi juga merupakan bagian dari pengelolaan risiko dari penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang tidak sesuai dengan standar. Akibat atau permasalahan yang mungkin timbul dari penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang tidak sesuai standar adalah permasalahan dalam berbagi data, interkoneksi, interoperabilitas, kemampuan dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, terkait usia pakai, skalabilitas dan penggunaan jangka panjang. Oleh karena itu arsitektur infrastruktur SPBE dikembangkan dengan pengertian bahwa perubahan teknologi dapat timbul dan berkembang dengan cepat.

Dengan konsep integrasi pada arsitektur data dan aplikasi maka arsitektur infrastruktur SPBE dituntut untuk bisa mendukung konsep tersebut. Integrasi juga perlu dilakukan pada area infrastruktur jaringan dengan tidak ada lagi terjadi penggelaran infrastruktur terpisah dimasing-masing unit kerja. Pada gambar berikut ini merupakan topologi jaringan yang terintegrasi pada satu pusat data di Badan Standardisasi Nasional.



Gambar 3.11 Topologi Jaringan Badan Standardisasi Nasional

Adapun rincian substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi target arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan arah kebijakan SPBE yang selaras dengan Peraturan PERPRES No.132 Tahun 2022, yaitu :

1. Fasilitas komputasi;
2. Sistem integrasi; dan
3. Platform.

Tabel 3.9 Arsitektur Infrastruktur SPBE

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan	Pusdatin	Pusdatin
	RAI.01.02 Pusat Kendali	RAI.01.02.01 Network Operation Center	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.02.02 Data Operation Center	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.02.03 Command/Operation Center	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.02.04 Security Operation Center	Pusdatin	Pusdatin

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center	Pusdatin	Pusdatin
	RAI.01.03 Fasilitas Komputasi	RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.01.03.03 Workstation Farm	Pusdatin	Pusdatin
RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah	Pusdatin	Pusdatin

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.05 Peripheral	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.06 Mobile Device	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	Pusdatin	Pusdatin
	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.03.02.01 PaaS	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.02.02 IaaS	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.02.03 SaaS	Pusdatin	Pusdatin
		RAI.03.02.04 BaaS	Pusdatin	Pusdatin

Penjelasan pada setiap komponen dalam arsitektur infrastruktur SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

a. Fasilitas Komputasi (RAI 01)

Lapisan ini terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI01.03) yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional.

b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01) Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di

bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi; dan

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02) Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.

c. Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:

1. Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI 03.01)

Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

2. Komputasi Awan (RAI 03.02)

Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS).

2. Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE Badan Standardisasi Nasional dituangkan dalam 3 komponen utama dan 10 atribut metadata pendukung, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional serta Peta Proses Bisnis Organisasi. Cakupan metadata pada domain arsitektur infrastruktur SPBE meliputi:

- 1) Metadata Fasilitas Komputasi
- 2) Metadata Sistem Integrasi
 - a. Metadata jaringan intra pemerintah;
 - b. Metadata sistem penghubung layanan pemerintah.
- 3) Metadata Platform
 - a. Metadata komputasi awan;
 - b. Metadata perangkat keras server;
 - c. Metadata perangkat keras media penyimpanan;
 - d. Metadata perangkat keras jaringan;
 - e. Metadata perangkat keras keamanan;
 - f. Metadata perangkat keras peripheral;
 - g. Metadata perangkat lunak platform;
 - h. Metadata komputasi awan.

Adapun rincian terkait metadata arsitektur SPBE Badan Standardisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Metadata Fasilitas Komputasi

ID Metadata	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan (Information)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas
BSN-DAI-01.01.01	Pusat Data Area31	100 Mbps	100 Mbps	Tapos Depok	Area31	Pusdatin	Tier 3
BSN-DAI-01.01.02	Pusat Kendali dan Komputasi BPPT	600 Mbps	600 Mbps	Gedung BPPT/Kemenkomarves Lantai 11	BSN	Pusdatin	Tier 3
BSN-DAI-01.01.03	Pusat Kendali dan Komputasi SNSU 1	200 Mbps	200 Mbps	Gedung 1 SNSU BSN Puspitek Serpong	BSN	Pusdatin	Tier 3
BSN-DAI-01.01.04	Pusat Kendali dan Komputasi SNSU 2	200 Mbps	200 Mbps	Gedung 2 Lab.SNSU BSN, Puspitek Serpong	BSN	Pusdatin	Tier 3
BSN-DAI-01.01.05	Pusat Kendali Mampang	100 Mbps	100 Mbps	Gedung BATAN/BRIN, Kuningan, Jakarta	BSN	Pusdatin	Tier 3

Tabel 3.11 Metadata Jaringan Intra Pemerintah

ID Metadata	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
BSN-DAI-02.01.02.01	BPPT-Lintas Arta	Link Metro E Point to Point dari BPPT ke SNSU1, SNSU2, PDN, Mampang	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	420 Mbps	VPN	VPN
BSN-DAI-02.01.02.02	BPPT-DTP	Link Metro E Point to Point dari BPPT ke Area31 - Tapos Depok	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	100 Mbps	VPN	VPN
BSN-DAI-02.01.02.03	SNSU1-Lintas Arta	Link Metro E Point to Point dari BPPT ke SNSU 1 - Serpong Gd. Puspitek	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	50 Mbps	VPN	VPN
BSN-DAI-02.01.02.04	SNSU2-Lintas Arta	Link Metro E Point to Point dari BPPT	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	50 Mbps	VPN	VPN

ID Metadata	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		ke SNSU 2 - Serpong Gd. Puspitek							
BSN-DAI-02.01.02.05	PDN-Lintas Arta	Link Metro E Point to Point dari PDN ke BPPT	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	70 Mbps	VPN	VPN
BSN-DAI-02.01.02.06	PDN-Miles	Link Metro E Point to Point dari PDN ke BPPT	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	100 Mbps	VPN	VPN
BSN-DAI-02.01.02.07	Mampang-Lintas Arta	Link Metro E Point to Point dari BPPT ke BATAN Kuningan, Mampang, Jakarta	Metro E P2P	Swasta Dalam Negeri	BSN	Pusdatin	100 Mbps	VPN	VPN

Tabel 3.12 Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

ID Metadata	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik
BSN-DAI-02.02.01.01	OSS Bina UMK	Integrasi data OSS milik BKPM dengan aplikasi Bina UMK BSN	Sistem penghubung pemerintah	BKPM	BKPM
BSN-DAI-02.02.01.02	NPWP KANMIS	Integrasi data NPWP milik DJP Kementerian Keuangan dengan aplikasi KANMIS	Sistem penghubung pemerintah	DJP	DJP Kementerian Keuangan

Tabel 3.13 Metadata Perangkat Keras Server

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor
BSN-DAI.03.01.01.01	X3650-M5(Area31)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	Area31	Lenovo	195 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.02	X3650-M5(Area31)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	Area31	Lenovo	130 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.03	X3650-M4(Area31)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	Area31	Lenovo	65 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.04	X3650-M4(Area31)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	Area31	Lenovo	69 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.05	X3650-M3(BPPT)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	BPPT	Lenovo	16 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.06	X3250-M5(BPPT)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	BPPT	Lenovo	16 GB	Intel Xeon
BSN-DAI.03.01.01.07	X3650-M5(BPPT)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	BPPT	Lenovo	32 GB	Intel Xeon

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor
BSN-DAI.03.01.01.08	X3620-M3 (SNSU1)	Lenovo	Hypervisor	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN	BPPT	Lenovo	16 GB	Intel Xeon

Tabel 3.14 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

ID Metadata	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Metode Akses Data Sharing
BSN-DAI-03.01.02.01	IBM Storewize V5000	Menjalankan fungsi penyimpanan server virtualisasi	Milik Sendiri	Pusdatin	Pusdatin	Area31	Storage Area Network/SAN
BSN-DAI-03.01.02.02	IBM Storewize V5000	Menjalankan fungsi penyimpanan server virtualisasi	Milik Sendiri	Pusdatin	Pusdatin	Area31	Storage Area Network/SAN
BSN-DAI-03.01.02.03	HPE MSA 2060	Menjalankan fungsi penyimpanan server virtualisasi	Milik Sendiri	Pusdatin	Pusdatin	Area31	Storage Area Network/SAN

Tabel 3.15 Metadata Perangkat Keras Jaringan

ID Metadata	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
BSN-DAI- 03.01.03.01	Mikrotik Routerboard RB3011	Router	Router BGP	BUMN	MILES-TELKOM	Pusdatin
BSN-DAI- 03.01.03.02	HPE OfficeConnect 1920S	Core Switch	Switch	Milik Sendiri	BSN	Pusdatin
BSN-DAI- 03.01.03.03	Cisco SG110-24	Switch	Switch	Milik Sendiri	BSN	Pusdatin
BSN-DAI- 03.01.03.04	Cisco Aironet 1850 Series	Access Point	Access Point	Milik Sendiri	BSN	Pusdatin

Tabel 3.16 Metadata Perangkat Keras Keamanan

ID Metadata	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
BSN-DAI-03.01.04.01	Fortinet FortiGate 600C	Firewall BSN	Firewall	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.04.02	Sophos XG-210	Firewall BSN	Firewall	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.04.03	Sophos SG-450	Firewall BSN	Firewall	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.04.04	WAF Imperva	Firewall BSN	Firewall	Milik Sendiri	PUSDATIN	PUSDATIN

--	--	--	--	--	--

Tabel 3.17 Metadata Perangkat Keras Periferal

ID Metadata	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/ <i>Communication Device</i>
BSN-DAI-03.01.05.01	Rack Server	Rack Server yang sudah terintegrasi dari sisi pendinginan dan backup power	Input/Output	BPPT	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.05.02	Rack Server	Rack Server yang sudah terintegrasi dari sisi pendinginan dan backup power	Input/Output	SNSU 1	PUSDATIN

ID Metadata	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/ <i>Communication Device</i>
BSN-DAI-03.01.05.03	Rack Server	Rack Server yang sudah terintegrasi dari sisi pendinginan dan backup power	Input/Output	SNSU 2	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.05.04	UPS	Energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama.	Input/Output	BPPT	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.05.05	UPS	Energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama.	Input/Output	SNSU 1	PUSDATIN
BSN-DAI-03.01.05.06	UPS	Energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama.	Input/Output	SNSU 2	PUSDATIN

Tabel 3.18 Metadata Perangkat Lunak Platform

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
BSN-DAI-03.01.07.01	VMware ESXi 5.5	Operating System untuk Hypervisor	Sistem Operasi	VM Ware	-	-	Lisensi seumur hidup	Pusdatin	VMWare
BSN-DAI-03.01.07.02	Windows Server 2012 R2. (64-bit)	Operating System Windows Server	Sistem Operasi	Windows	-	-	Lisensi seumur hidup	Pusdatin	Microsoft

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
BSN-DAI-03.01.07.03	FortiOS 600e	Operating System Perangkat Keamanan	Sistem Utilitas	FortiOS	-	-	Lisensi seumur hidup	Pusdatin	FortiOS
BSN-DAI-03.01.07.04	HP Software - 5.20.99 Release 1115	Operating System Perangkat Jaringan	Sistem Utilitas	HP	-	-	Lisensi seumur hidup	Pusdatin	HPE

Tabel 3.19 Metadata Komputasi Awan

ID Metadata	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Jangka Waktu Pelayanan
-------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------	--------------	---------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------



- 259 -

BSN-DAI-03.02.01	PDN	Virtual Private Server	IaaS	Instansi Pemerintah Lain	Kemenkominfo	0	Direktorat LAIP	Pusdatin		24/7
BSN-DAI-03.02.02	Area31	Virtual Private Server	IaaS	Swasta Dalam Negeri	Area31	0	BSN	Pusdatin		24/7

F. Arsitektur Domain Keamanan

1. Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE dan menjadi acuan sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif pada lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan metadata domain keamanan SPBE, Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur, sesuai dengan arah kebijakan SPBE berupa komponen :

- a. Standar Keamanan SPBE,
- b. Penerapan Keamanan SPBE,
- c. Kelaikan Keamanan SPBE.

Tabel 3.20 Arsitektur Keamanan SPBE

RAK Tingkat 1	Kode RAK Tingkat 2	Deskripsi Kegiatan	Unit Kerja	Satuan Kerja
RAK.01 Standar Keamanan	RAK.01.01 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	Pusdatin	Pusdatin
	RAK.01.02 Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
	RAK.01.03 Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
RAK.02 Penerapan Keamanan	RAK.02.01 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin

RAK Tingkat 1	Kode RAK Tingkat 2	Deskripsi Kegiatan	Unit Kerja	Satuan Kerja
	RAK.02.02 Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
	RAK.02.03 Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
	RAK.02.04 Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
	RAK.02.05 Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.	Pusdatin	Pusdatin
RAK.03 Kelaikanan Keamanan	RAK.03.01 Kelaikanan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikanan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional.	Pusdatin	Pusdatin

RAK Tingkat 1	Kode RAK Tingkat 2	Deskripsi Kegiatan	Unit Kerja	Satuan Kerja
		Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.		
	RAK.03.02 Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.	Pusdatin	Pusdatin

Penjelasan pada setiap komponen dalam arsitektur keamanan SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

d. Standar Keamanan (RAK 01)

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional meliputi:

1. peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;

2. standar nasional dan internasional terkait keamanan informasi;
dan
3. regulasi lainnya.

e. Penerapan Keamanan (RAK 02)

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko keamanan SPBE. Program kerja keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Target pelaksanaan program kerja keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Program kerja keamanan SPBE, paling sedikit meliputi:

1. edukasi kesadaran keamanan SPBE;
2. identifikasi kerentanan keamanan SPBE;
3. peningkatan keamanan SPBE;
4. penanggulangan insiden keamanan SPBE; dan
5. audit keamanan SPBE.

f. Kelaikan Keamanan (RAK 03)

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa terhadap Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

2. Metadata Arsitektur Keamanan SPBE

Metadata Arsitektur Keamanan SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan setiap metadata pada Arsitektur Keamanan SPBE. Cakupan atribut metadata arsitektur keamanan SPBE diantaranya adalah ID metadata, nama perangkat keamanan, uraian perangkat keamanan, tipe perangkat keamanan, status kepemilikan, nama pemilik, dan unit pengelola. Atribut metadata tersebut digunakan untuk membedakan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE dengan metadata domain Arsitektur SPBE lainnya.

Metadata Arsitektur Keamanan SPBE Badan Standardisasi Nasional mencakup beberapa rincian yang penting dalam memastikan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pertama, Metadata Standar dan Prosedur Keamanan SPBE memberikan pedoman dan langkah-langkah standar yang harus diikuti untuk menjaga keamanan SPBE. Metadata ini meliputi kebijakan keamanan, prosedur penanganan insiden keamanan, dan protokol keamanan yang harus dipatuhi.

Kedua, Metadata Penerapan Keamanan SPBE terdiri dari beberapa sub-metadata yang berfokus pada aspek keamanan tertentu. Metadata Audit Keamanan digunakan untuk melacak dan memantau kegiatan audit keamanan yang dilakukan pada SPBE. Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan mencakup informasi mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang praktik keamanan yang tepat. Metadata Identifikasi Kerentanan Keamanan mencatat dan menganalisis potensi kerentanan dalam SPBE. Metadata Penanganan Insiden Keamanan menjelaskan langkah-langkah untuk menangani insiden keamanan yang terjadi. Metadata Kegiatan Peningkatan Keamanan mencakup upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan keamanan SPBE.

Terakhir, Metadata Kelaikan Keamanan SPBE merujuk pada data yang menentukan kelaikan keamanan SPBE. Metadata ini mencakup sertifikasi keamanan, hasil penilaian risiko, dan evaluasi keamanan secara berkala. Metadata Kelaikan Keamanan digunakan untuk



- 266 -

memastikan bahwa SPBE memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan dan siap untuk digunakan oleh pihak terkait.

Dengan adanya metadata arsitektur keamanan SPBE, Badan Standardisasi Nasional dapat mengatur dan mengelola aspek keamanan SPBE secara terstruktur dan efektif. Metadata ini membantu dalam pengembangan kebijakan keamanan, pelacakan kegiatan audit dan penanganan insiden, meningkatkan kesadaran pengguna, mengidentifikasi kerentanan keamanan, serta memastikan bahwa SPBE memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Tabel 3.21 Metadata Standar dan Prosedur Keamanan SPBE

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
BSN-DAK-01.03.01	P.SID.2 Rev 2 Klasifikasi kerahasiaan Informasi	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan peniadaan jaminan kepastian informasi klarifikasi kerahasiaan sudah sesuai ketentuan	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.02	P.SID.3 Rev 1 Survey Kepuasan Pelanggan	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Pusdatin tidak dapat diukur	16 July 2019	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.03	P.SID.4 Rev.1 Antivirus	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dibuat atau tidak dilaksanakan maka akan memperbesar terjadinya insiden keamanan informasi	17 June 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			yang disebabkan oleh infeksi virus komputer			
BSN-DAK-01.03.04	P.SID.5 Rev.3 Pengelolaan Aset Sistem Informasi	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dibuat atau dilaksanakan maka pelaksanaan prosedur ini akan tertunda	30 January 2023	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.05	P.SID.6 Rev.2 Penanganan Kepedulian Keamanan Informasi	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dibuat atau dilaksanakan maka pelaksanaan prosedur ini akan tertunda	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.06	P.SID.8 Rev.2 Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dibuat atau dilaksanakan maka pelaksanaan prosedur ini akan tertunda	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.07	P.SID.9 Rev.1 Pengelolaan Media Simpan Bergerak	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan terjadinya pemindahan tangan dan atau	16 July 2019	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			penyalahgunaan data yang dapat merugikan instansi.			
BSN-DAK-01.03.08	P.SID.21 Rev.1 Program Utilitas	Prosedur	Program Utilitas adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau memelihara komputer.	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.09	P.SID.22 Rev.1 Pengelolaan Website BSN	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan adanya ancaman keamanan informasi	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.10	P.SID.23 Rev.6 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi	Prosedur	Apabila prosedur pengembangan sistem informasi ini tidak dijalankan	30 January 2023	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			maka akan mengakibatkan pengembangan sistem informasi di BSN menjadi tidak terkendali sehingga meningkatkan resiko <i>thread</i> dan <i>vulnerability</i>			
BSN-DAK-01.03.11	P.SID.24 Rev.1 Tata Cara Kerja Pengelola Tim SMKI	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi diterapkan secara konsisten dan juga untuk memberikan panduan kepada personel Pusdatin didalam melaksanakan tugas terkait keamanan informasi.	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.12	P.SID.25 Rev.1 Pengelolaan Lingkungan Kerja	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka terdapat	17 June 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			potensi kehilangan aset atau informasi			
BSN-DAK-01.03.13	P.SID.27 Rev.3 Keberlanjutan Operasional Kerja (Business Continuity Plan)	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisir efek dari kejadian yang tidak diharapkan atau bencana yang terjadi di Badan Standardisasi Nasional, sehingga operasional kerja penting, berbasis Teknologi Informasi (TI) tetap bisa berjalan kembali, sehingga kebutuhan konsumen terhadap layanan BSN tetap dapat berjalan.	21 October 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.14	P.SID.28 Rev.1 Pengelolaan Pemasok	Prosedur	Prosedur ini digunakan untuk memastikan para pemasok memiliki	17 June 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			komitmen untuk menjaga keamanan informasi sebelum, saat dan sesudah mengerjakan pekerjaan di BSN			
BSN-DAK-01.03.15	P.SID.10 Rev.2 Pengelolaan Perangkat Bergerak	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan perangkat bergerak (mobile device) didaslam mengakses backend aplikasi dan atau basis data dari atau jaringan teknologi informasi BSN	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.16	P.SID.11 Rev.2 Teleworking	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keamanan setiap pegawai BSN dan atau pemasok yang bekerja dari jarak jauh dalam mengakses backend aplikasi	17 June 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			dan atau basis data dan atau jaringan teknologi informasi BSN,			
BSN-DAK-01.03.17	P.SID 12 Rev.2 Instalasi Aplikasi Pihak Ketiga	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keamanan aplikasi yang diinstal di peralatan yang terhubung Jaringan/Sistem Teknologi Informasi di Lingkungan BSN	8 July 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.18	P.SID.13 Rev.3 Pengelolaan Server dan Jaringan	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai Badan Standardisasi Nasional untuk pengelolaan Server dan Jaringan	21 October 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.19	P.SID.15. Rev.4 Pengelolaan Akses	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan	21 October 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
			mengakibatkan tersedianya celah keamanan yang berbahaya bagi keamanan data dan sistem informasi			
BSN-DAK-01.03.20	P.SID.16 Rev.3 Kriptografi	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang penggunaan kriptografi untuk perlindungan data dan informasi dari akses yang tidak sah sebagai akibat dari kesalahan manusia, serangan berbahaya, dan kehilangan atau pencurian peralatan.	7 October 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.21	P.SID.17 Rev.3 Prosedur Pengelolaan Password	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk mengelola penggunaan akun dan password (email, domain, wifi) di lingkungan kerja BSN.	7 October 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
BSN-DAK-01.03.22	P.SID.18 Rev.2 Autentikasi	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses akses ke akun aplikasi selalu diverifikasi oleh sistem dilakukan oleh pemilik akun sebenarnya	7 October 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.23	P.SID.19 Rev.2 Pengelolaan Email	Prosedur	Apabila Prosedur ini tidak dibuat ataupun dilaksanakan maka pelaksanaan prosedur ini akan tertunda	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.24	P.SID.20 Rev.2 Pengelolaan Database	Prosedur	Apabila prosedur ini tidak dijalankan maka akan mengakibatkan database menjadi tidak terkendali.	17 June 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.25	P.SID.29. Rev.1 Manajemen Perubahan	Prosedur	Prosedur ini digunakan untuk memastikan setiap perubahan terdokumentasi, terverifikasi dan tertelusur.	17 June 2022	sekarang	BSN

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
BSN-DAK-01.03.26	P.SID.30 Pemenuhan SMKI BSN	Prosedur	Apabila pengendalian Gratifikasi tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tujuan/sasaran kegiatan pengawasan internal tidak tercapai.	7 October 2022	sekarang	BSN
BSN-DAK-01.03.27	P.SID.31 Manajemen Kapasitas	Prosedur	Prosedur ini bertujuan untuk memastikan aset sistem informasi BSN dikelola dengan baik dan benar.	21 October 2022	sekarang	BSN

Tabel 3.22 Metadata Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan	Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan	Hasil Audit Keamanan	Jenis Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Instansi
BSN-DAK-02.05.01	Audit Internal SMKI SNI ISO/IEC 27001	Kegiatan pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai SNI ISO/IEC 27001	Identifikasi Risiko TI di tiap unit kerja belum terdefinisi dengan jelas	Audit Internal SMKI	Unit Kerja mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi Risiko TI sesuai dengan risiko masing-masing unit kerja	2022	BSN
BSN-DAK-02.05.02	Penetration Test Internal BSN	Kegiatan rutin dalam rangka persiapan go live aplikasi terbaru	Hasil yang didapat apabila mendapat temuan kritikal dan tinggi, maka harus di perbaiki	Audit Kerentanan Aplikasi	Perbaikan terhadap Aplikasi atau meningkatkan Policy Keamanan	2022	BSN

Tabel 3.23 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan

ID Metadata	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan	Instansi
BSN-DAK-02.01.01	Himbauan Keamanan Berbahaya kepada Pengawai BSN	Himbawan melalui media Whatsaspp	June 2023	BSN

Tabel 3.24 Metadata Identifikasi Kerentanan Keamanan

ID Metadata	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan	Instansi
BSN-DAK-02.02.01	Identifikasi VA Sistem Informasi BSN	Pengecekan Kerentanan Sistem Informasi BSN	30 May 2023	Pusdatin BSN

Tabel 3.25 Metadata Penanganan Insiden Keamanan

ID Metadata	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan	Instansi
-	-	-	-	-	-

Tabel 3.26 Kegiatan Peningkatan Keamanan

ID Metadata	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan	Instansi
BSN-DAK-02.03.01	Audit Eksternal SMKI SNI ISO/IEC 27001	Kegiatan audit sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	16-18 November 2022	BSN
BSN-DAK-02.03.02	Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT	Kegiatan simulasi teknis dalam melakukan pengamanan insiden keamanan siber	29-31 Januari 2023	BSSN



- 280 -

ID Metatada	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan	Instansi
	Organisasi Pemerintah Pusat			
BSN-DAK-02.03.03	Communication Check Triwulan I Gov-CSIRT	Kegiatan pelaksanaan tanggap insiden siber sektor pemerintah untuk menjalin pola koordinasi dan komunikasi yang optimal	20 March 2023	BSSN

Tabel 3.27 Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE

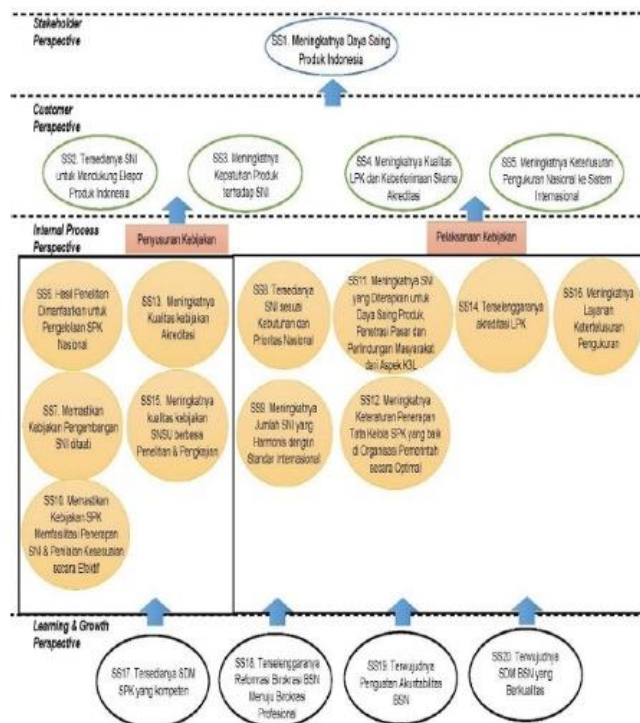
ID Metadata	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan	Deskripsi Kegiatan Kelaikan Keamanan	Tanggal Kelaikan Keamanan	Instansi
BSN-DAK-03.01.01	Audit Eksternal SMKI SNI ISO/IEC 27001	Kegiatan audit sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	16-18 November 2022	Sucofindo
BSN-DAK-03.01.02	Information Technology Security Assessment (ITSA)	Layanan untuk menunjang keamanan TI dan membantu kelancaran penyelenggaraan berbagai layanan publik	3 March 2023	BSSN
BSN-DAK-03.01.03	Penetration Test	Kegiatan untuk mengevaluasi keamanan dari suatu sistem jaringan komputer	17 February 2020	BRIN
BSN-DAK-03.01.04	Cyber Security Maturity (CSM)	Kegiatan untuk menilai tingkat kematangan keamanan siber bagi organisasi	11-13 Oktober 2022	BSSN

BAB IV PETA RENCANA SPBE

A. Sasaran dan Inisiatif Strategis

1. Sasaran Strategis Badan Standardisasi Nasional

Sasaran Strategis BSN menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN sampai pada tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi dan menuju ke arah birokrasi yang lebih professional (*Sasaran Strategis 18*). Dengan mengadopsi SPBE, BSN berupaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, memungkinkan BSN untuk melakukan tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SPBE juga membawa manfaat bagi BSN dalam peningkatan kinerja dan efisiensi. Dengan adopsi teknologi modern, proses internal BSN dapat diotomatisasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Sistem otomatisasi juga memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih akurat dan real-time, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Selain itu, SPBE juga memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi publik dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi, layanan, dan proses pelayanan yang transparan dan responsif. Dengan demikian, penerapan SPBE menjadi langkah penting BSN dalam mencapai reformasi birokrasi yang berkualitas dan profesional, sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan standardisasi.

B. Muatan Peta Rencana

1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya tata kelola yang mencakup pengaturan, pengarahan, dan pengendalian penerapan SPBE secara selaras dan terpadu. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengembangan SPBE diarahkan mencapai tiga tujuan utama, yaitu mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Selain itu, disebutkan juga bahwa tata kelola SPBE dan manajemen SPBE secara nasional diperlukan dalam rangka peningkatan keterpaduan dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam kerangka kerja ini, fungsi TI tidak hanya sekedar sebagai penunjang kegiatan pemerintahan yang ada, tetapi justru sebagai agen yang memicu perubahan yang mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

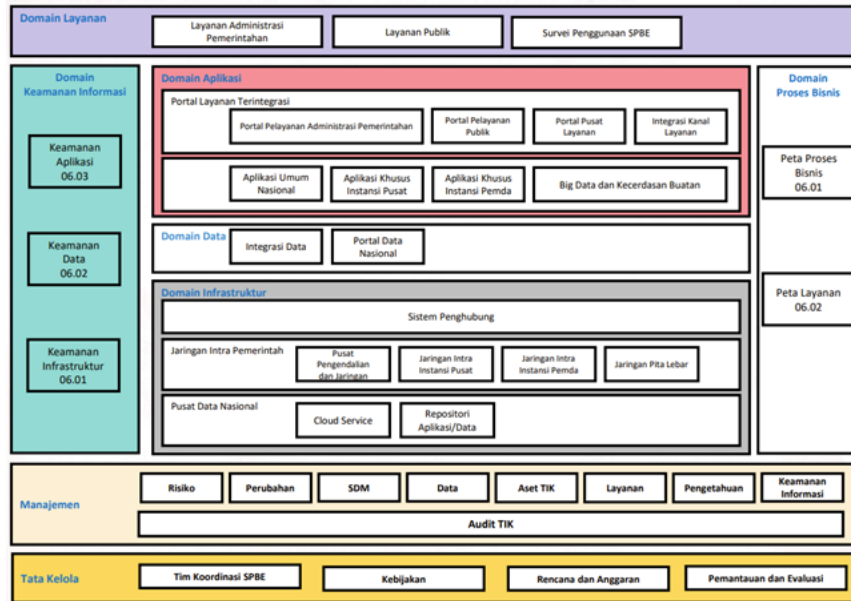
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE merupakan kebijakan internal yang perlu dimiliki oleh instansi khususnya BSN yang berisi ruang lingkup Tata Kelola SPBE. Karakteristik dari kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu ditetapkan oleh pimpinan instansi, memiliki nomor, dan telah ditandatangani. Beberapa ruang lingkup Tata Kelola SPBE yang masuk di dalam Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ditunjukkan pada Gambar 4.2.

01 KEBIJAKAN INTERNAL ARSITEKTUR SPBE INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH	06 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN JARINGAN INTRA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH
02 KEBIJAKAN INTERNAL PETA RENCANA SPBE INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH	07 KEBIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH
03 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN DATA	08 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
04 KEBIJAKAN INTERNAL PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE	09 KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
05 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA	10 KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

Gambar 4.2 Cakupan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

1) **Arsitektur SPBE**

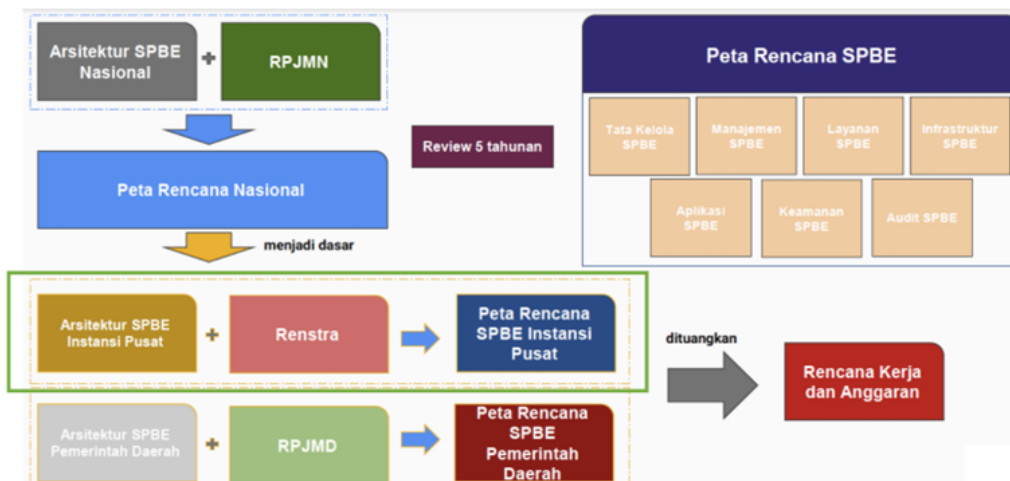
Komponen selanjutnya yaitu tersusunnya sebuah dokumen Arsitektur SPBE yang dapat menjadi suatu kerangka dasar bagi BSN untuk mendefinisikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, tata kelola, manajemen dan layanannya. Dengan begitu diharapkan terciptanya layanan SPBE yang terintegrasi di BSN. Berikut ditunjukkan penggambaran Arsitektur SPBE pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Arsitektur SPBE

2) Peta Rencana SPBE

Pada komponen Peta Rencana SPBE, perlu disiapkan suatu dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan, pelaksanaan, dan pengembangan SPBE yang terintegrasi. Dokumen Peta Rencana SPBE mencakup Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit TIK. Peta Rencana SPBE didukung juga dengan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Berikut pada Gambar 4.4 ditunjukkan alur penyusunan Peta Rencana SPBE.



Gambar 4.4 Alur Penyusunan Peta Rencana SPBE

3) Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE adalah sebuah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE. Rencana dan Anggaran SPBE di BSN perlu disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah, serta berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

4) Inovasi Proses Bisnis SPBE

Proses Bisnis BSN adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BSN. Proses bisnis harus disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan. Inovasi proses bisnis perlu dilakukan secara selaras dengan Arsitektur SPBE dan berpedoman pada proses penyusunan peta proses bisnis. Dokumen model proses bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal. Dokumen Proses bisnis menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

5) Pembangunan Aplikasi SPBE

Pada komponen Pembangunan Aplikasi SPBE, aplikasi dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi dari layanan SPBE. Proses pembangunan ataupun pengembangannya dilakukan melalui siklus pembangunan aplikasi. Siklus pembangunan aplikasi terdiri dari tahapan perencanaan, analisis, implementasi dan pemeliharaan. Dokumen perencanaan aplikasi berisi daftar aplikasi yang dibuat termasuk proses pendokumentasiannya. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus berdasarkan pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA.

6) Tim Koordinasi SPBE

Tim Koordinasi SPBE BSN merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE. Tim Koordinasi SPBE ini dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun sebuah *Steering Committee*. Berikut ditunjukkan pada Gambar 4.5 sebuah model generik dari Tim Koordinasi SPBE



Gambar 4.5 Model Generik Tim Koordinasi SPBE

7) Kolaborasi Penerapan SPBE

Kolaborasi Penerapan SPBE merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Seluruh kolaborasi penerapan SPBE dilakukan secara formal dan terpadu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan oleh BSN dalam memberikan layanan SPK kepada stakeholder.

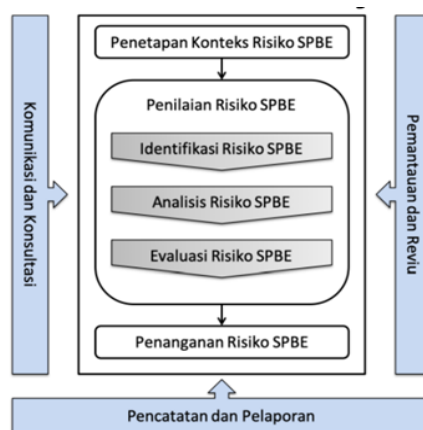
2. Manajemen SPBE

Mengacu pada Arsitektur SPBE, pada domain Manajemen SPBE melingkupi beberapa bagian yang harus dijalankan secara efektif dan efisien. Bagian tersebut antara lain manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen

SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Berikut dijelaskan secara singkat masing-masing bagian pada domain Manajemen SPBE.

1) Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE saat ini telah menjadi acuan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui Manajemen Risiko SPBE dapat menjamin meminimalkan dampak risiko dalam penerapan SPBE di BSN. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Berikut ditunjukkan pada Gambar 4.6 yang merupakan proses umum dari Manajemen Risiko SPBE yang mengacu pada PermenpanRB No. 5/2020.



Gambar 4.6 Proses Umum Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE, BSN perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang di PermenpanRB No. 5/2020 yang digambarkan pada Gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Struktur Manajemen Risiko SPBE

2) Manajemen Keamanan Informasi

Keamanan Informasi saat ini menjadi isu yang sangat penting dalam penerapan SPBE karena Keamanan Informasi SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, jaringan, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Manajemen Keamanan Informasi SPBE di BSN dilaksanakan sesuai persyaratan yang ada di SNI ISO/IEC 27001 dan berdasarkan pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang dikeluarkan oleh BSSN melalui Perban BSSN No. 4/2021. Pada peraturan ini dijelaskan mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Pada pelaksanaannya, pimpinan Kementerian dapat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Beberapa aktivitas Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang perlu dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE

3) Manajemen Data

Manajemen Data SPBE dapat dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Selain itu,

kegiatan Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pelaksanaan Manajemen Data SPBE berhubungan juga dengan instruksi dari Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan hal ini, pimpinan K/L dapat berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Tujuan dari Manajemen Data SPBE sendiri adalah untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pedoman pelaksanaan Manajemen Data SPBE juga telah tertuang melalui Permen PPN No. 16/2020 yang secara gambaran umumnya dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.

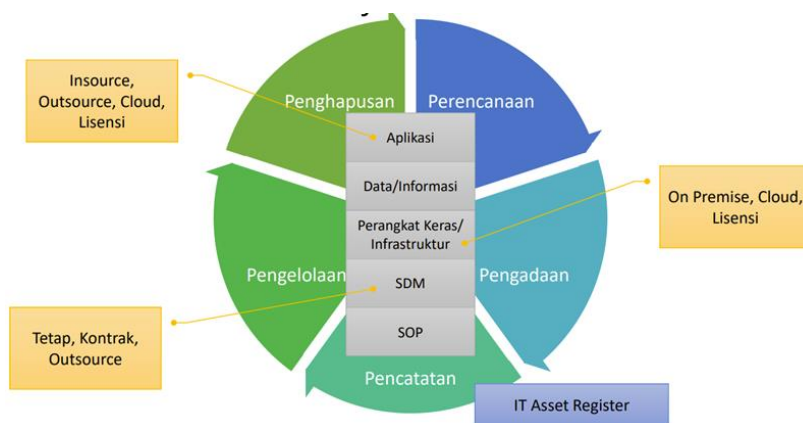


Gambar 4.9 Gambaran Umum Manajemen Data SPBE

4) Manajemen Aset TIK

Melalui manajemen aset TIK dapat bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE di BSN. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Pelaksanaan Manajemen Aset TIK dapat dikoordinasikan

dan dikonsultasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pelaksanaan juga nantinya akan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang saat ini masih menunggu peraturan acuan yang akan dikeluarkan oleh BSN. Secara garis besar kegiatan Manajemen Aset TIK dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut ini.



Gambar 4.10 Manajemen Aset TIK

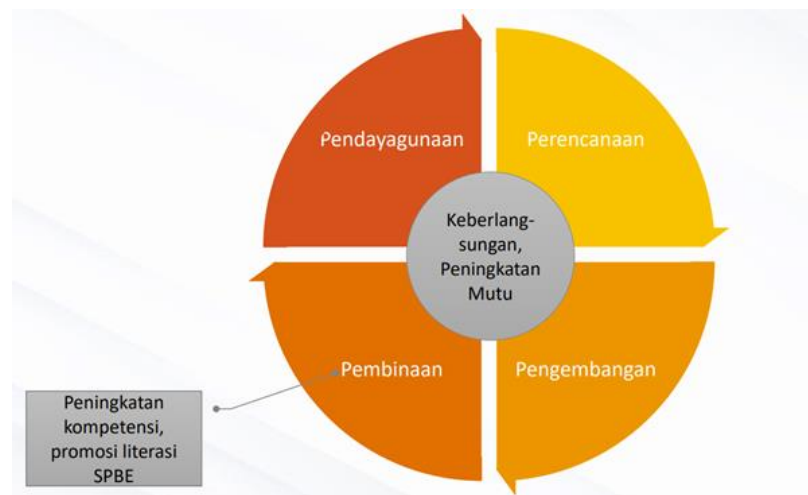
5) Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada penerapan Manajemen SDM SPBE, perlu dilaksanakannya serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam penerapan SPBE. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE. Selain itu, Manajemen SDM juga dapat memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di BSN. Berikut beberapa bidang kompetensi SDM SPBE yang diperlukan dalam penerapan SPBE ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Bidang Kompetensi SDM SPBE

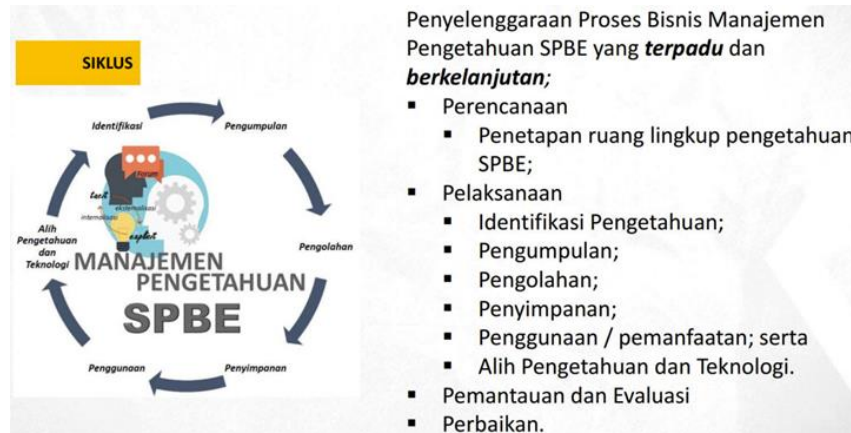
Dalam proses pelaksanaan Manajemen SDM SPBE, BSN berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan SDM BSN khususnya di bidang TIK. Proses umum Manajemen SDM SPBE juga telah tertuang melalui KepmenPANRB No. 962/2021 yang dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.



Gambar 4.12 Proses Umum Manajemen SDM SPBE

6) Manajemen Pengetahuan

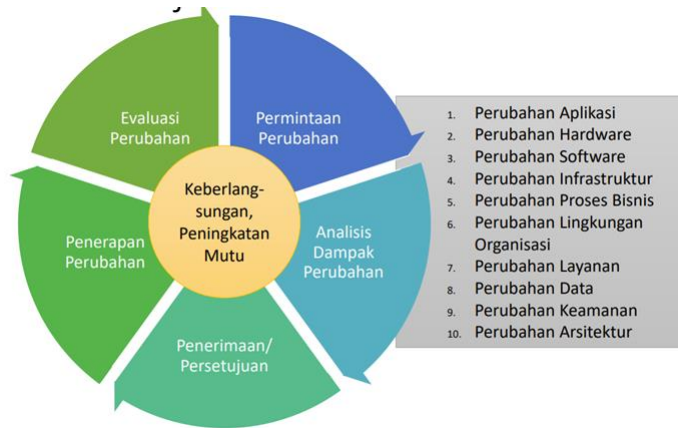
Manajemen Pengetahuan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Pada kegiatan Manajemen Pengetahuan, proses yang dilakukan yaitu mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE. Dalam penerapan manajemen pengetahuan, BSN perlu memetakan kompetensi SDM BSN yang mempunyai keahlian dan passion di bidang TIK. Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan SDM SPK BSN. Secara garis besar, dapat dilihat pada Gambar 4.13 yang merupakan proses umum dari penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.



Gambar 4.13 Proses Umum Manajemen Pengetahuan SPBE

7) Manajemen Perubahan

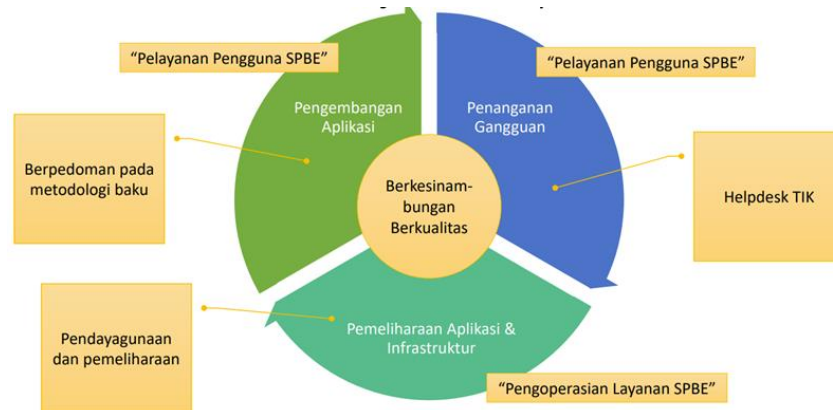
Manajemen Perubahan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Perencanaan dari Manajemen Perubahan SPBE juga perlu tertuang dalam Peta Rencana SPBE. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap SPBE. Pelaksanaan dari Manajemen Perubahan SPBE nantinya akan mengacu pada pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang akan segera dikeluarkan oleh KemenPANRB melalui Peraturan Menteri. Pelaksanaan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE di BSN dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN. Secara garis besar, dapat dilihat pada Gambar 4.14 yang merupakan proses umum dari penerapan Manajemen Perubahan SPBE.



Gambar 4.14 Proses Umum Manajemen Perubahan SPBE

8) Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Pelaksanaan dari Manajemen Layanan SPBE nantinya akan mengacu pada pedoman Manajemen Layanan SPBE yang akan segera dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan kegiatan Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi BSN. Secara garis besar, dapat dilihat pada Gambar 4.15 yang merupakan proses umum dari penerapan Manajemen Layanan SPBE.



Gambar 4.15 Proses Umum Manajemen Layanan SPBE

3. Layanan SPBE

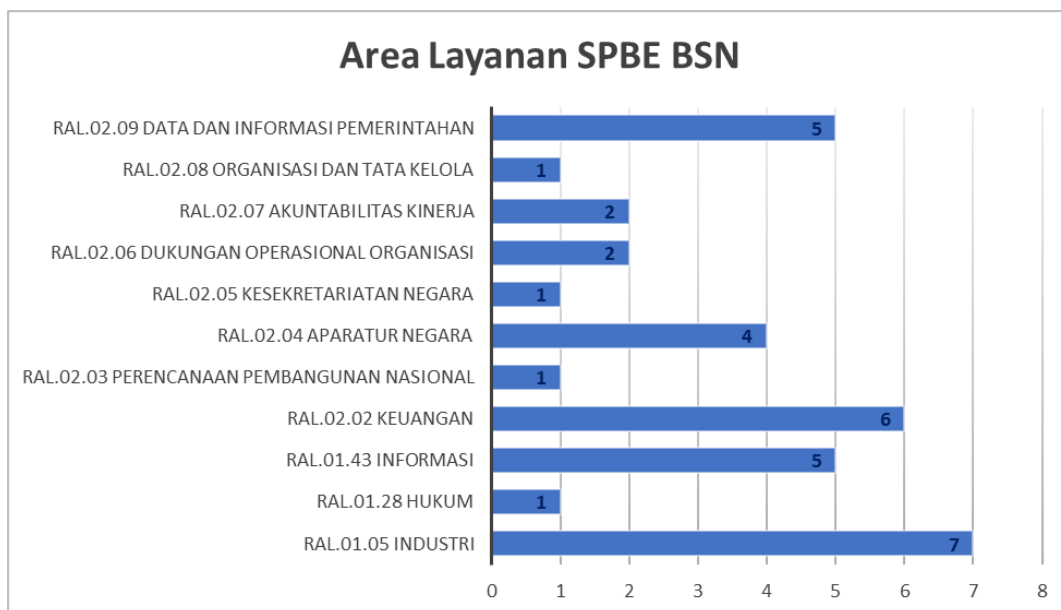
Layanan SPBE merupakan layanan yang meliputi layanan administrasi dan layanan publik menyangkut semua aspek tata pemerintahan yang berjalan. Secara umum aplikasi layanan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu layanan SPBE yang mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Standardisasi Nasional. Layanan pemerintahan berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronik. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah. Contoh aplikasi yang termasuk jenis ini adalah sistem informasi eksekutif yang memanfaatkan data warehouse untuk mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan jajaran pimpinan. Layanan Administrasi Pemerintahan meliputi :

- 1) Layanan Program dan Keuangan
- 2) Layanan Penganggaran dan Keuangan Organisasi
- 3) Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara
- 4) Layanan Aset
- 5) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Organisasi
- 6) Layanan Monitoring dan Evaluasi

- 7) Layanan Perencanaan Organisasi
 - 8) Layanan Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) BSN
 - 9) Layanan Kepegawaian Organisasi
 - 10) Layanan Kinerja Pegawai
 - 11) Layanan Pengembangan Karir
 - 12) Layanan Kearsipan Organisasi
 - 13) Layanan Sistem Manajemen Terintegrasi
 - 14) Layanan Integrasi Manajemen
 - 15) Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah
 - 16) Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 17) Layanan Organisasi dan Tata Laksana
 - 18) Layanan Infrastruktur dan Keamanan TIK
 - 19) Layanan Tata kelola TIK
 - 20) Layanan Aplikasi dan Data
 - 21) Layanan Konsultasi Program
 - 22) Layanan pengaduan dan permintaan terkait TI
- b. Layanan Publik yaitu layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Layanan ini berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat umum. Adapun layanan Publik yang dimiliki BSN adalah sebagai berikut:
- 1) Layanan Akreditasi
 - 2) Layanan pengembangan Kebijakan SNI
 - 3) Layanan pengembangan SNI
 - 4) Layanan penerapan SNI
 - 5) Layanan Informasi Barang SNI yang Tersertifikasi dan Proses SPPT SNI
 - 6) Layanan Pembelian Dokumen Standar
 - 7) Layanan Kerjasama
 - 8) Layanan Hukum
 - 9) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
 - 10) Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- 11) Layanan Informasi BSN
- 12) Layanan Humas
- 13) Layanan Data Terbuka



Gambar 4.16 Area Layanan SPBE

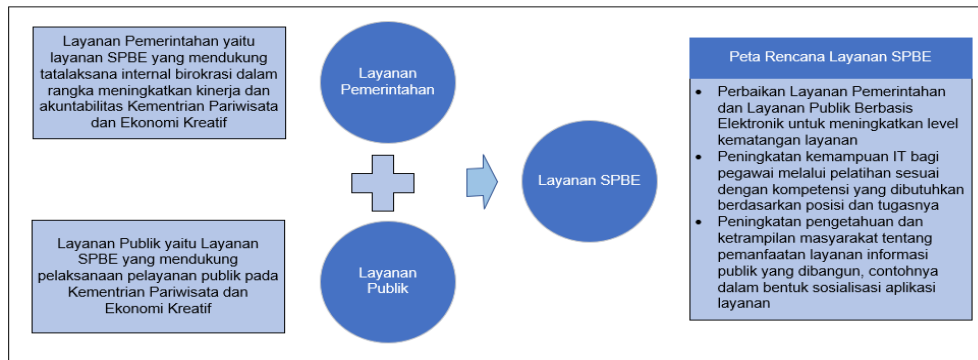
Arsitektur Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas: Layanan SPBE dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai saluran digital, seperti situs web, aplikasi seluler, dan portal *online*. Aksesibilitas ini menghilangkan hambatan geografis dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengunjungi kantor pemerintah secara fisik. Dengan membuat layanan lebih mudah diakses, BSN dapat menjangkau pengguna yang lebih luas dan memastikan masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan layanan SPK yang mereka butuhkan.
- 2) Proses yang Disederhanakan: Arsitektur layanan SPBE memungkinkan otomatisasi dan penyederhanaan proses, meniadakan dokumen manual, meminimalkan proses yang

redundan. Penyederhanaan proses ini mengurangi birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyampaian layanan.

- 3) Personalisasi dan Kustomisasi: Layanan SPBE dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi khusus pengguna layanan. Melalui akun pengguna yang dipersonalisasi, pelaku usaha dan masyarakat dapat mengakses dasbor yang dipersonalisasi, menerima notifikasi yang ditargetkan, dan mengakses informasi dan layanan yang relevan berdasarkan profil mereka. Penyesuaian ini meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan pelaku usaha dan masyarakat menerima informasi dan layanan yang paling relevan dan tepat waktu.
- 4) Integrasi dan Interoperabilitas: Arsitektur layanan SPBE memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas berbagai sistem dan basis data pemerintah. Integrasi ini memungkinkan berbagi dan pertukaran data tanpa batas antara departemen dan lembaga yang berbeda, memungkinkan pandangan holistik informasi warga. Ini memastikan bahwa pegawai pemerintah memiliki akses ke informasi yang akurat dan terkini, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih terinformasi dan efisien kepada warga negara.
- 5) Umpan Balik dan Peningkatan Berkesinambungan: Arsitektur layanan SPBE memungkinkan pengumpulan umpan balik dari warga terkait pengalaman mereka dengan layanan pemerintah. Melalui formulir *online feedback*, survei, dan peringkat pengguna, pemerintah dapat mengumpulkan wawasan berharga dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Hal ini membuat pemerintah untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan layanan mereka berdasarkan *feedback* warga, memastikan kualitas penyampaian layanan yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan arsitektur yang dirancang dengan baik, BSN dapat meningkatkan kualitas layanan SPK dan menjadikannya lebih mudah diakses, efisien, dipersonalisasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 4.17 Peta Rencana Layanan SPBE

4. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Peta Rencana SPBE pada domain aplikasi merupakan suatu gambaran strategis yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah pengembangan aplikasi di dalam domain tersebut. Dalam konteks aplikasi SPBE, peta rencana dapat membantu mengatur prioritas pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, baik pada tingkat aplikasi umum maupun aplikasi khusus.

Pada tingkat aplikasi umum, peta rencana dapat mencakup pengembangan aplikasi umum layanan publik dan layanan publik administrasi pemerintahan. Tujuan pengembangan aplikasi umum layanan publik mungkin melibatkan peningkatan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Sementara itu, pengembangan aplikasi layanan publik administrasi pemerintahan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses administrasi pemerintahan, seperti pengelolaan kepegawaian, keuangan, atau perizinan.

Di sisi aplikasi khusus, peta rencana dapat mencakup pengembangan aplikasi khusus misi tertentu dan aplikasi khusus fungsi tertentu. Aplikasi khusus misi tertentu mungkin difokuskan pada memenuhi kebutuhan khusus suatu misi atau program pemerintah, seperti sistem informasi penanggulangan bencana atau sistem

pengawasan dan pengendalian keamanan. Sementara itu, aplikasi khusus fungsi tertentu dapat mencakup pengembangan aplikasi yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam pemerintahan, seperti pengelolaan data keuangan, penganggaran, atau pengadaan barang/jasa.

Melalui peta rencana ini, pengembangan aplikasi SPBE dapat terarah dan terkoordinasi dengan baik. Peta rencana membantu dalam mengidentifikasi prioritas, menyelaraskan pengembangan aplikasi dengan kebutuhan dan tujuan pemerintahan, serta memastikan adanya integrasi dan keselarasan antara aplikasi umum dan aplikasi khusus. Dengan adanya peta rencana yang jelas, pengembangan aplikasi SPBE dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih luas.

Tabel 4.1 Katalog Aplikasi dan Layanan BSN

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
Layanan perencanaan	E-Performance	Aplikasi layanan yang digunakan untuk monitoring kinerja instansi BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	eperformance.bsn.go.id			
Layanan Penganggaran	Aplikasi Sipakar	Aplikasi untuk melakukan pengajuan usulan kebutuhan dana untuk pengelolaan barang/jasa, pemantauan serapan dan pagu anggaran serta realisasi anggaran pengadaan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	sipakar.bsn.go.id			
	Aplikasi SAS	aplikasi berbasis desktop yang digunakan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
	(Berbasis Desktop)	sebagai sarana untuk menjalankan berbagai tugas kerja mulai dari Data Kontrak, RPD Harian,		
		SPM, LPJ Bendahara bagi Satker dan sebagainya		
	Aplikasi SAKTI	aplikasi yang dibangun guna	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	sakti.kemenkeu.go.id	mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)		
Layanan Keuangan	Aplikasi Sipakar	Aplikasi untuk melakukan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	sipakar.bsn.go.id	pengajuan usulan kebutuhan dana untuk pengelolaan barang/jasa,		
		pemantauan serapan dan pagu anggaran serta realisasi anggaran pengadaan		
	Aplikasi SAS	aplikasi berbasis desktop yang digunakan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	(Berbasis Desktop)	sebagai sarana untuk menjalankan berbagai tugas kerja mulai dari Data Kontrak, RPD Harian,		
		SPM, LPJ Bendahara bagi Satker dan sebagainya		

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
	<p>Aplikasi SAKTI</p> <p>sakti.kemenkeu.go.id</p>	<p>aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)</p>	<p>Pegawai BSN</p>	<p>24 Jam / Jam Kerja</p>
<p>Layanan Penggunaan Barang dan Jasa</p>	<p>Aplikasi LPSE</p> <p>lpse.bppt.go.id/eproc4/</p>	<p>Aplikasi untuk mengelola system pengadaan secara elektronik yang ditujukan untuk Pelaku Pengadaan yaitu Pokja, PPK, dan Pejabat Pengadaan</p>	<p>Publik</p>	<p>24 Jam / Jam Kerja</p>
	<p>Aplikasi E-Katalog</p> <p>e-katalog.lkpp.go.id</p>	<p>Aplikasi yang digunakan oleh K/L untuk melakukan pengadaan secara elektronik melalui metode e-katalog</p>	<p>Publik</p>	<p>24 Jam / Jam Kerja</p>
	<p>Aplikasi Simpeg (SIAP, Absensi, SIM Kinerja dan SMM)</p> <p>simpeg.bsn.go.id</p>	<p>Aplikasi layanan kepegawaian yang melayani absensi, baik selama masa pandemic ataupun sebelum masa pandemi, penilaian kinerja pegawai, kalkulasi uang makan, dokumentasi sistem manajemen terintegrasi, dan dokumentasi metadata PNS di BSN</p>	<p>Pegawai BSN</p>	<p>24 Jam / Jam Kerja</p>

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN	
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI	Aplikasi Layanan yang bertujuan untuk pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja	
	srikandi.arsip.go.id				
		TNDE	Aplikasi Layanan yang bertujuan untuk pengelolaan tata naskah dinas yang dinamis berbasis elektronik	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
		intranet.bsn.go.id			
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Simak BMN	Aplikasi layanan yang bertujuan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk dan keluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan Barang milik negara	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja	
	(Merupakan aplikasi standalone/ install based)				
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	WBS	Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Standardisasi Nasional bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja	
	wbs.bsn.go.id				

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
		Badan Standardisasi Nasional.		
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	E-Performance	Aplikasi layanan yang digunakan untuk monitoring kinerja instansi BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	eperformance.bsn.go.id			
Layanan Kinerja Pegawai	SIM Kinerja	Aplikasi layanan untuk melayani penilaian SKP dan Kinerja PNS di lingkungan BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	simpeg.bsn.go.id/kinerja			
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N Lapor	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	lapor.go.id			
Layanan Data Terbuka	Digital Dashboard	Aplikasi layanan untuk melayani masyarakat dalam mengakses data terbuka yang disediakan oleh BSN	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	dw.bsn.go.id			
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	JDIH	Aplikasi layanan Sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bsn, menampilkan	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	jdi.bsn.go.id			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
Hukum (JDIH)	-	semua produk-produk hukum yang dihasilkan oleh BSN maupun produk hukum luar BSN yang digunakan untuk referensi pelaksanaan pemerintahan di lingkungan BSN		
Layanan Akreditasi	KANMIS	Aplikasi layanan proses akreditasi dan penilaian kesesuaian	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	akreditasi.bsn.go.id			
	-			
Layanan Informasi Barang SNI yang Tersertifikasi dan Proses SPPT SNI	Bangbeni	Aplikasi layanan untuk pencarian informasi barang yang telah sertifikasi SNI serta pengajuan SPPT SNI	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	bangbeni.bsn.go.id			
	-			
Layanan Pembelian Dokumen Standar	PESTA	Aplikasi layanan untuk pemesanan dokumen SNI dan non SNI beserta konsultasi mengenai dokumen SNI dan non SNI	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	pesta.bsn.go.id			
	-			
Layanan pengaduan dan	E-Ticketing	Aplikasi Layanan Aduan dan Permintaan Keperluan TI di BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	e-ticketing.bsn.go.id			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
permintaan terkait TI	-			
Layanan pengembangan kebijakan SNI	SISPK	Aplikasi layanan proses pengembangan SNI dan juga pencarian SNI	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	sispk.bsn.go.id			
	-			
Layanan pengembangan SNI	SISPK	Aplikasi layanan proses pelaku usaha dan masyarakat	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	sispk.bsn.go.id			
	-			
Layanan penerapan SNI	SNI Bina UMK	Aplikasi layanan pembinaan penerapan SNI bagi UMK	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	Binaumk.bsn.go.id			
	-			
Layanan Manajemen Reformasi Birokrasi (RB) BSN	RB BSN	Aplikasi layanan penilaian Reformasi Birokrasi	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	rb.bsn.go.id			
	-			
Layanan Sistem	SM	Aplikasi layanan dokumentasi sistem	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
Manajemen Terintegrasi	simpeg.bsn.go.id/smm	manajemen terintegrasi		
Layanan Organisasi dan Tata Laksana	SM simpeg.bsn.go.id/smm -	Aplikasi layanan dokumentasi organisasi dan tata laksana	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
Layanan Program dan Keuangan	Aplikasi Sipakar sipakar.bsn.go.id	Aplikasi untuk melakukan pengajuan usulan kebutuhan dana untuk pengelolaan barang/jasa, pemantauan serapan dan pagu anggaran serta realisasi anggaran pengadaan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	Aplikasi SAS	aplikasi berbasis desktop yang digunakan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	(Berbasis Desktop)	sebagai sarana untuk menjalankan berbagai tugas kerja mulai dari Data Kontrak, RPD Harian, SPM, LPJ Bendahara bagi Satker dan sebagainya		
	Aplikasi SAKTI			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
	sakti.kemenkeu.go.id	aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
Layanan Aset	Simak BMN	Aplikasi layanan yang bertujuan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk dan keluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan Barang milik negara	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	(Merupakan aplikasi standalone/ install based)			
Layanan Kerjasama	TBT	Aplikasi layanan kerjasama pengelolaan <i>Technical Barrier To Trade World Trade Organization</i>	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	tbt.bsn.go.id			
Layanan Hukum	JDIH	Aplikasi layanan Sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bsn, menampilkan semua produk-produk hukum yang dihasilkan oleh BSN maupun produk hukum luar BSN	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	jdih.bsn.go.id			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
		yang digunakan untuk referensi pelaksanaan pemerintahan di lingkungan BSN		
	E-tap	Aplikasi layanan pemantauan/monitoring penetapan peraturan BSN	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	etap.bsn.go.id			
Layanan Informasi	Portal BSN	Aplikasi layanan portal informasi resmi Badan Standardisasi Nasional	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	bsn.go.id			
Layanan Humas	Portal BSN	Aplikasi layanan portal informasi resmi Badan Standardisasi Nasional	Publik	24 Jam / Jam Kerja
	bsn.go.id			
Layanan Monitoring dan Evaluasi	E-Performance	Aplikasi layanan yang digunakan untuk monitoring kinerja instansi BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	eperformance.bsn.go.id			
	SIM Kinerja			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
Layanan Pengembangan Karir	simpeg.bsn.go.id/kinerja	Aplikasi layanan untuk melayani penilaian SKP dan Kinerja PNS di lingkungan BSN	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
Layanan Tata kelola TIK	E-ticket	Aplikasi layanan untuk pengelolaan keluhan / malfungsi terkait TIK baik dari sisi aplikasi dan data maupun dari infrastruktur dan keamanan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	e-ticketing.bsn.go.id			
Layanan Aplikasi dan Data	E-ticket	Aplikasi layanan untuk pengelolaan keluhan / malfungsi terkait TIK baik dari sisi aplikasi dan data maupun dari infrastruktur dan keamanan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	e-ticketing.bsn.go.id			
Layanan Infrastruktur dan Keamanan TIK	E-ticket	Aplikasi layanan untuk pengelolaan keluhan / malfungsi terkait TIK baik dari sisi aplikasi dan data maupun dari infrastruktur dan keamanan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	e-ticketing.bsn.go.id			
Layanan Integrasi Manajemen BSN	SM	Aplikasi layanan dokumentasi sistem manajemen terintegrasi	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	simpeg.bsn.go.id/smm			

NAMA LAYANAN	APLIKASI SPBE	DESKRIPSI	PENGGUNA LAYANAN	TARGET TINGKAT LAYANAN
Layanan Konsultasi Program	E-ticket	Aplikasi layanan untuk pengelolaan keluhan / malfungsi terkait TIK baik dari sisi aplikasi dan data maupun dari infratraktur dan keamanan	Pegawai BSN	24 Jam / Jam Kerja
	e-ticketing.bsn.go.id			

5. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat terdiri atas Jaringan Intra Pemerintahan, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan. Jaringan Intra Instansi Pemerintahan yang dimaksud merupakan jaringan intra yang diselenggarakan lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan yang dimaksud merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh BSN untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintahan. Penggunaan Infrastruktur SPBE BSN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal BSN. Infrastruktur SPBE terdiri dari:

a. Pusat Data Nasional

Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh BSN.

a. Jaringan Intra Pemerintahan

Penggunaan Jaringan Intra pemerintahan bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi BSN dengan K/L/D.

b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

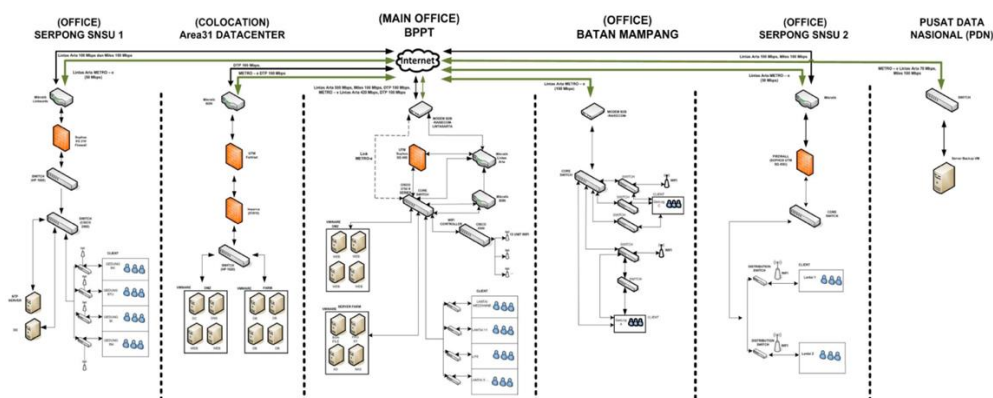
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

Infrastruktur *backbone* jaringan intra pemerintahan juga perlu dibangun dengan mekanisme yang baik, misal dengan membangun link metro antar Satuan Kerja atau mekanisme VPN. Disamping konektivitas jaringan server dan datacenter perlu diperhatikan, ruang data center

harus memiliki luas dan desain yang sesuai dengan standar mutu sebuah NOC yang dapat digunakan untuk layanan 7 hari kali 24 jam. Selain itu, untuk mengantisipasi hilang atau kerusakan data akibat bencana alam atau faktor lainnya maka perlu dibuat backup data di area yang berbeda dari data center. Pola backup data-nya diupayakan real time dengan sistem *mirroring* Infrastruktur untuk penghubung layanan antar pemerintah juga perlu disiapkan termasuk sistem keamanan yang berlapis.

Peta Rencana SPBE berikut ini merupakan penurunan rencana strategis menjadi inisiatif dan program-program yang perlu dilakukan dalam pencapaian Visi dan misi Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Badan Standardisasi Nasional. Pengembangan Infrastruktur TI di BSN yang harus dilakukan meliputi:

- 1) Standardisasi jaringan;
- 2) Pengembangan Server dan *Storage*;
- 3) Pengembangan *Data center* dan pembangunan DRC;
- 4) Standardisasi *End-User Computing*.



Gambar 4.18 Topologi Jaringan BSN

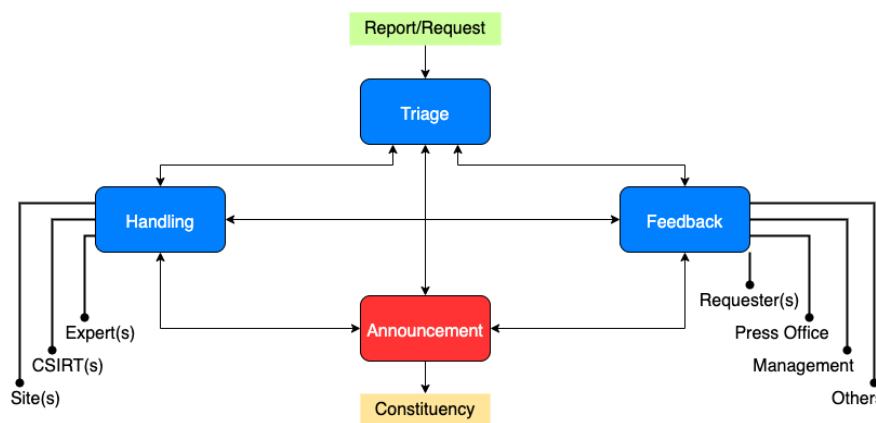
6. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Untuk menjamin keamanan SPBE Perlu dilakukan pemantauan dan respon cepat terhadap insiden siber yang terjadi, tim tersebut berupa *Government CSIRT* sesuai program dari BSSN. *Government - Computer Security Incident Response Team Indonesia* atau *Gov-CSIRT Indonesia* merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018. *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* di lingkungan BSN.

CSIRT memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden, koordinasi insiden dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: *cybersecurity drill test*, workshop atau bimbingan teknis dan asistensi pembentukan CSIRT di lingkungan BSN. CSIRT menyajikan data statistik mengenai insiden yang terjadi pada sektor pemerintah sebagai bentuk sentra informasi keamanan siber pada sektor pemerintah. Alur Kerja CSIRT dalam menangani insiden dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut.



Gambar 4.19 Alur Kerja CSIRT dalam menangani insiden

Selain CSIRT, BSN juga perlu menyimpan *Security Operation Center* untuk mendukung keamanan SPBE. *Security Operation Center* (SOC) bertugas untuk memantau proses dan kejadian pada sistem informasi dan melihat alert atau tanda tanda akan terjadinya insiden.

Security Operation Center (SOC), merupakan unit pusat yang menangani permasalahan keamanan dalam sebuah organisasi secara teknis dan mendetail. Kelengkapan SOC diantaranya adalah Access monitoring, controlling of lighting dan alarm. SOC juga mencakup ruang lingkup *Network Operating Center* (NOC), NOC merupakan perangkat infrastruktur yang melakukan fungsi-fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan jaringan (*network*) sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan. Tugas NOC adalah menangani konfigurasi dan perubahan manajemen jaringan, *network* security, performance dan policy monitoring, pelaporan, jaminan kualitas, scheduling dan dokumentasi dengan memanfaatkan kemampuan management *network*, monitoring dan *analysis tools*.



Gambar 4.20 Security Operation Center

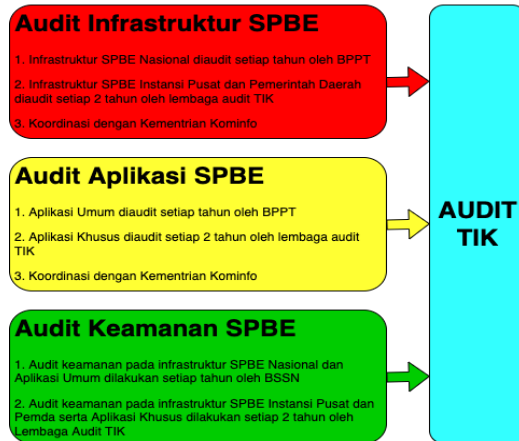
Teknologi SOC didasarkan pada *system Security Information and Event Management (SIEM)* mutakhir yang menggunakan tools analitik canggih yang membantu meningkatkan keamanan, dan mitigasi risiko 24x7. SOC nantinya akan menjadi garda terdepan pengamanan sistem SPBE dengan menghasilkan reporting, monitoring yang realtime, dan rekomendasi serta analisis resiko yang terjadi selama proses berjalannya sistem.

7. Audit TIK

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK terdiri atas audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya pada lingkungan BSN.

Pada proses evaluasinya audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4.21 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

C. Peta Rencana SPBE BSN

Peta Rencana SPBE BSN berisi langkah strategis penerapan SPBE di lingkungan BSN yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Adapun Peta Rencana SPBE BSN adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Peta Rencana SPBE Badan Standardisasi Nasional

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS:			
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN menuju Birokrasi Profesional			
Indikator :	Indeks Reformasi Birokrasi BSN	85	87

No	Domain/Kegiatan		Unit Kerja	2023	2024
1	Tata Kelola SPBE			TARGET	
	A	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
	1	Sosialisasi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
	2	Evaluasi dan Reviu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
	3	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
	B	Arsitektur SPBE		
1	Penyusunan dan Penetapan Arsitektur SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Evaluasi dan Reviu Dokumen Arsitektur SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
3	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Arsitektur SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	C	Peta Rencana SPBE		
1	Penyusunan dan Penetapan Peta Rencana SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Evaluasi dan Reviu Dokumen Peta Rencana SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
3	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Peta Rencana SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	D	Rencana dan Anggaran SPBE		
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		- Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
2	Penetapan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
3	Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Anggaran SPBE dengan Unit Kerja/Pengelola TIK	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Evaluasi dan Reviu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	E	Inovasi Proses Bisnis SPBE		
1	Penyusunan Dokumen Model Peta Proses Bisnis SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Penetapan Dokumen Model Peta Proses Bisnis SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
3	Sosialisasi Model Peta Proses Bisnis SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
4	Evaluasi dan Reviu Dokumen Model Peta Proses Bisnis SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Model Peta Proses Bisnis SPBE (Business Process Automation/Business Process Improvement/Business Process Reengineering)	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	F	Pembangunan Aplikasi SPBE		
1	Penyusunan Dokumentasi Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE (SDLC)	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
2	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dengan	Pusat Data dan Sistem Informasi		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	Ynit Kerjaterkait Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE			
3	Evaluasi dan Reviu pada Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
4	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dalam Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
5	Penyusunan Dokumentasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi SPBE yang Baru	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
G	Tim Koordinasi SPBE			
1	Sosialisasi Tim Koordinasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Penetapan Tugas/Program Kerja Tim Koordinasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan Seluruh Unit Kerja	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Evaluasi dan Reviu Tugas/Program Kerja Tim Koordinasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	Tugas/Program Kerja Tim Koordinasi SPBE			
H	Kolaborasi Penerapan SPBE			
1	Penyusunan dan Penetapan Aktivitas Kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
3	Evaluasi dan Reviu dari Kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
2	Manajemen SPBE			
A	Manajemen Risiko SPBE			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Program Kerja Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	- Inspektorat	√	√
		- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan		
2		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
		- Inspektorat		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pedoman Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan - Pusat Data dan Sistem Informasi		
3	Penerapan Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	- Inspektorat - Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan - Pusat Data dan Sistem Informasi		√
4	Penyusunan Dokumentasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE	- Inspektorat - Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan - Pusat Data dan Sistem Informasi		√
5	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	- Inspektorat - Biro Perencanaan, Keuangan,		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		Umum dan Pengadaan		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
		- Inspektorat		
6	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan		√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	- Inspektorat		
		- Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan		√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
B	Manajemen Keamanan Informasi			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Program Kerja Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
2	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
3	Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Penyusunan Dokumentasi Pengendalian Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
5	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
6	Reviu serta evaluasi Pedoman dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Pengendalian Keamanan Informasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
C	Manajemen Data			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Program Kerja Manajemen Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
2	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Manajemen Data	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
3	Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Data SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
4	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Data	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Penerapan Manajemen Data	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
D	Manajemen Aset TIK			
1	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Kegiatan Manajemen Aset TIK	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
2	Penyusunan Laporan Inventaris Aset TIK Seluruh Unit Kerja	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
3	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Aset TIK	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Aset TIK	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Kegiatan Manajemen Aset TIK	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	E	Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE		
	1	<p>Pelaksanaan Perencanaan, Identifikasi, Analisis, dan pelaksanaan SDM SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian - Pusat Data dan Sistem Informasi 	√	√
	2	<p>Penyusunan Kerangka Kompetensi SDM SPBE untuk SDM SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian - Pusat Data dan Sistem Informasi 	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
3	Penyusunan dan Penetapan Peta Jalan Pengembangan SDM Sesuai Kompetensi SPBE	- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√
		- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
4	Pelaksanaan Pelatihan/Sertifikasi SDM yang Sesuai dengan Standar Kompetensi SPBE	- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√
		- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
5		- Biro Sumber Daya Manusia,	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		Organisasi dan Hukum		
	Evaluasi dan Reviu Penerapan Manajemen SDM SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
		- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum		
6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Kegiatan Manajemen SDM SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
F	Manajemen Pengetahuan			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
2	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
3	Penerapan Sistem Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	√	√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
4	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		dan Penilaian Kesesuaian		
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
5	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		√
		- Pusat Data dan Sistem Informasi		
G	Manajemen Perubahan			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia,	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		Organisasi dan Hukum		
2	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√
3	Penyusunan Form/Log Perubahan dalam Rangka Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√
4	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum		√
5	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum		√
6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	- Pusat Data dan Sistem Informasi - Biro Sumber Daya Manusia,		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
		Organisasi dan Hukum		
H	Manajemen Layanan SPBE			
1	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
2	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
3	Penyediaan dan Penerapan SLA/OLA pada Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
4	Penyediaan Platform Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
5	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
6	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
7	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Perbaikan Pedoman dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√

No	Domain/Kegiatan		Unit Kerja	2023	2024
3	Layanan SPBE				
	A	Layanan Publik			
	1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa P3DN			
		Pengembangan Digitalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui ekatalog Sektoral	Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
	2	Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi			
		Optimalisasi Layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	√	√
	3	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)			
		Optimalisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif, efisien dan akuntabel	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
4	Layanan Standar dan Penilaian Kesesuaian			
	Pengembangan Sistem informasi terintegrasi SISPK modul 1 pengembangan, modul 2 terkait penerapan, modul 3 terkait akreditasi dan modul 4 terkait SNSU yang terintegrasi dengan sistem informasi instansi terkait	Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		√
		Deputi Akreditasi	√	√
		Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran	√	√
		Deputi Pengembangan Standar		√
5	Layanan pembinaan penerapan SNI kepada UMK			
	Pengembangan Sistem informasi layanan penerapan SNI kepada UMK yang terintegrasi dengan sistem di OSS melalui Aplikasi SNI Bina UMK	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	√	√
6	Layanan Pelaporan Pelanggaran (WBS)			
	Optimalisasi Layanan pelaporan pelanggaran dari publik untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran oleh pegawai BSN	Inspektorat	√	

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
B	Layanan Administrasi Pemerintahan			
1	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi			
	Optimalisasi dan upgrade layanan e-Reformasi Birokrasi terintegrasi dengan SPBE	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	√	√
2	Layanan Perencanaan			
	Pengembangan Digitalisasi Layanan Perencanaan untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel terintegrasi dengan sistem lainnya	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
3	Layanan Penganggaran			
	Pengembangan Digitalisasi Layanan Penganggaran untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel terintegrasi dengan sistem lainnya	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
4	Layanan Keuangan			

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	Pengembangan Digitalisasi Layanan Keuangan untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel terintegrasi dengan sistem lain dan di Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
5	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara			
	Pengembangan Digitalisasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
6	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi			
	Pengembangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang Terintegrasi dengan sistem lainnya untuk menghasilkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel			
7	Layanan Manajemen SDM dan Kinerja terintegrasi			
	Pengembangan digitalisasi pengelolaan SDM dan kinerja pegawai	Biro SDMOH	√	√
10	Layanan Dukungan Inspektorat			
	Pengembangan digitalisasi pengelolaan manajemen risiko, pelaporan gratifikasi yang terintegrasi dengan WBS	Inspektorat	√	
4	Aplikasi SPBE			
A	Aplikasi Umum			
1	Penguatan Kolaborasi penerapan Aplikasi Srikandi (ANRI)	Pusdatin	√	√
2	Penguatan Kolaborasi penerapan Aplikasi Sakti (Kemenkeu)	Pusdatin	√	√
3	Penguatan Kolaborasi penerapan Aplikasi e-Monev (Bappenas)	Pusdatin	√	√
4	Penguatan Kolaborasi penerapan Aplikasi SI-ASN (BKN)	Pusdatin	√	√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
5	Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (BSrE BSSN)	Pusdatin	√	√
5	Implementasi e-Katalog Sektoral (LKPP)	Pusdatin dan Biro PKUP	√	√
B	Aplikasi Khusus			
1	Aplikasi Pengembangan Diklat BSN	Pusbang SDM	√	
2	Aplikasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui ekatalog Sektoral	Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan	√	√
3	Aplikasi Layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	√	√
4	Aplikasi Pengembangan Sistem informasi terintegrasi SISPK modul 2 terkait penerapan, modul 3 terkait akreditasi dan modul 4 terkait SNSU yang terintegrasi dengan sistem informasi instansi terkait	Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		√
		Deputi Akreditasi	√	
		Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran	√	√
5	Aplikasi Sistem informasi layanan penerapan SNI kepada UMK yang terintegrasi dengan	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	sistem di OSS melalui Aplikasi SNI Bina UMK	Penilaian Kesesuaian		
6	Aplikasi Pelaporan Pelanggaran (WBS)	Inspektorat	√	
7	Optimalisasi Layanan pelaporan pelanggaran dari publik untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran oleh pegawai BSN	Inspektorat	√	
8	Pengembangan digitalisasi sistem informasi terintegrasi manajemen SDM dan kinerja	Sekretariat Utama	√	
9	Pengembangan digitalisasi sistem informasi terintegrasi manajemen Keuangan dan Perencanaan Anggaran yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas	Sekretariat Utama	√	
10	Pengembangan digitalisasi sistem informasi Barang Milik Negara (BMN)	Sekretariat Utama	√	
11	Koneksi data kepegawaian (BKN My Sapk)	Sekretariat Utama	√	

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
12	Integrasi satu data Indonesia	Pusdatin		√
5	Infrastruktur SPBE			
A	Layanan Pusat Data			
	- Integrasi Pusat Data Kementerian terhadap PDN	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
	- Migrasi Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Peningkatan Kapasitas Storage	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Penerapan standarisasi Pusat Data (<i>Tier 2</i>)	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
B	Pembangunan Sistem Penghubung Layanan			
	- Merencanakan Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
	- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Monitoring Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
C	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah			

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	- Merencanakan Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Implementasi Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Monitoring Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Kerjasama pemanfaatan Perangkat VPN Setneg		√	√
	D Standardisasi jaringan			
	- Jaringan Komunikasi Data WAN	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Jaringan Komunikasi Data MAN (Metro-E)	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Jaringan Komunikasi Data LAN	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
6	Keamanan SPBE			
	A Manajemen Keamanan SPBE			
	- Penyusunan dan Penerapan <i>Cyber Security Framework</i> Sektor Pemerintah	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Penyusunan dan Penerapan Pedoman Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Instanansi Pusat	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	- Penyusunan dan Penerapan Instrumen Uji Kelaikan Secara Mandiri pada Instansi Pusat	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Penyusunan Prosedur Vulnerability Assessment	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Penyusunan Prosedur Monitoring dan Pemeliharaan Jaringan	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	B Penanganan Insiden Siber			
	- Pemantauan dan respon cepat terhadap insiden siber	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Pembentukan <i>Government - Computer Security Incident Response Team</i>	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	C Standardisasi			
	- Standardisasi Backup Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
	- Standardisasi SNI ISO/IEC 27001:2013	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Pengelolaan Hak Akses	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	D Penerapan Budaya Keamanan Informasi			
	- Penerapan Prosedur <i>Security Operation Center (SOC)</i>	Pusat Data dan Sistem Informasi		√

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	- Penerapan Prosedur <i>Network Operating Center</i> (NOC)	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
E	Pembangunan SDM Kemananan SPBE			
	- Pelatihan SDM internal kompetensi Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
	- Sertifikasi SDM internal kompetensi Keamanan Siber	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	√
7	Audit TIK			
A	Audit Infrastruktur			
	- Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Infrastruktur SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Infrastruktur SPBE Internal	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Infrastruktur SPBE Eksternal	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
B	Audit Aplikasi			
	- Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aplikasi SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Aplikasi SPBE Internal	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	

No	Domain/Kegiatan	Unit Kerja	2023	2024
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Aplikasi SPBE Eksternal	Pusat Data dan Sistem Informasi		√
C	Audit Keamanan			
	- Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Keamanan SPBE	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Keamanan SPBE Internal	Pusat Data dan Sistem Informasi	√	
	- Menyelenggarakan kegiatan audit Keamanan SPBE Eksternal	Pusat Data dan Sistem Informasi		√

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BSN ini disusun untuk memberikan gambaran kondisi saat ini arsitektur SPBE BSN selaras dengan Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang mencakup 6 domain utama yaitu proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Sementara itu, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan acuan kegiatan pelaksanaan SPBE yang mencakup 7 domain utama yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Arsitektur SPBE ini merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan BSN yang terintegrasi dan terpadu secara nasional. Melalui Arsitektur SPBE, BSN dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik di bidang standar dan penilaian kesesuaian.

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan SPBE di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sampai tahun 2024 mendatang. Dengan Keputusan Kepala BSN ini diharapkan terwujudnya layanan digital yang terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik di bidang standar dan penilaian kesesuaian yang lebih sistematis, sederhana, dan terpadu.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD